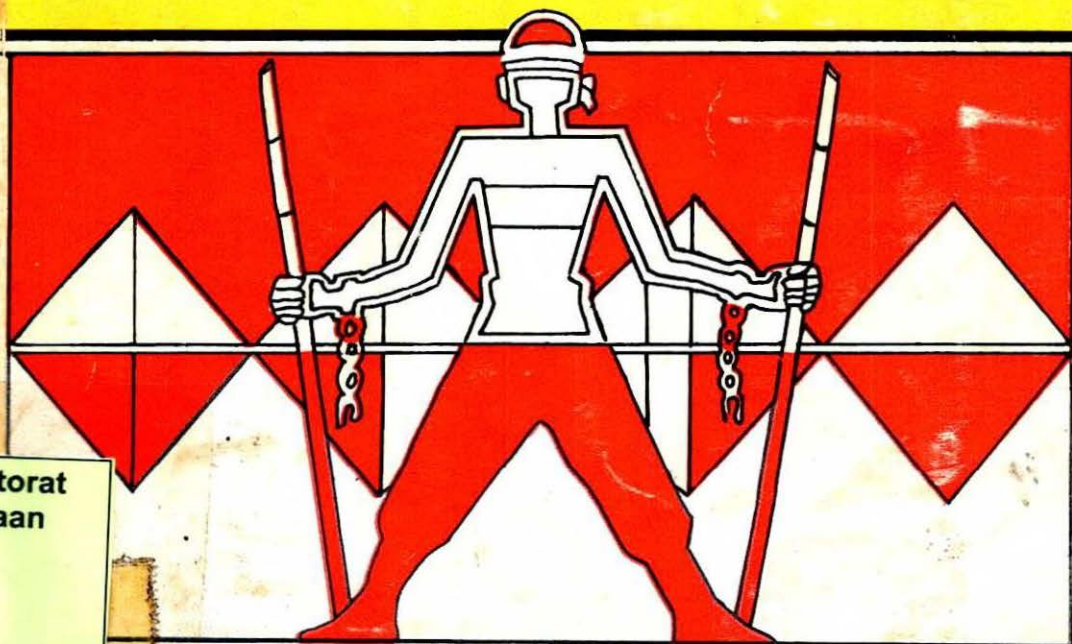




2.0.2

SEJARAH REVOLUSI KEMERDEKAAN **(1945 – 1949)**

DAERAH SUMATERA UTARA



irektorat
dayaan

11/1984

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

MILIK DEPDIKBUD
Tidak diperdagangkan

SEJARAH REVOLUSI KEMERDEKAAN
(1945 — 1949)

DAERAH SUMATERA UTARA

PERPUSTAKAAN
DIREKTORAT SEJARAH &
NILAI TRADISIONAL

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1979/1980

PERPUSTAKAAN
DIT. SEJARAH & NILAI TRADISIONAL

Nomor induk : 311/4284
Tanggal terima : 25-9-684
Dikl./asli dari : Proyek IDK
Nomor buku : 959.812.031 Sej.
Kopi ke : 2

TIM PELAKSANA/PENYUSUN

Drs. Abdul Mukti Lubis	:	K e t u a
Drs. Sanusi	:	Sekretaris
Drs. Abdul Hadi Lubis	:	Anggota
Drs. Daud Manurung	:	Anggota
Drs. Anas Machmud	:	Anggota
Dra. Yusnaini Betty	:	Anggota
Drs. E.K. Siahaan	:	Konsultan

P R A K A T A

Sikap dan pendirian pemerintah terhadap kebudayaan daerah nampak jelas dalam membina dan memperkembangkan kebudayaan daerah dengan sebaik-baiknya serta memelihara kebudayaan nasional menuju ke Bhinneka Tunggal Ikaan kebudayaan bangsa kita.

Dilihat dari sudut ini, maka terasa betapa pentingnya pelaksanaan inventarisasi dan dokumentasi kebudayaan daerah Sumatera Utara yang dalam tahun 1979/1980 telah menggarap aspek-aspek Sejarah, Adat Istiadat, Geografi Budaya, Cerita Rakyat dan Permainan Rakyat daerah Sumatera Utara.

Hal tersebut diatas didasarkan sesuai dengan tolok ukur dalam DIP inventarisasi dan dokumentasi kebudayaan Daerah tanggal 5 April 1979 No. 49/XXIII/4/79 dan SK. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 082/P/1979 tanggal 21 Mei 1979.

Hasil-hasil pelaksanaan inventarisasi dan dokumentasi kebudayaan daerah Sumatera Utara yang mencakup kelima aspek ini disajikan dalam laporan ini. Hasil-hasil tersebut dapat dicapai berkat kerja sama yang baik dari para anggota team masing-masing aspek, dan bantuan yang diterima dari pelbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat didaerah-daerah.

Apa yang disajikan dalam laporan ini belumlah dapat dikatakan sempurna, mengingat banyaknya hambatan-hambatan dan kesukaran yang dialami oleh para pelaksana, baik sebagai akibat dari keadaan alam daerah Sumatera Utara yang luas itu, maupun akibat terbatasnya fasilitas dan waktu yang tersedia untuk mereka.

Namun demikian telah diusahakan dengan segala kemampuan yang ada dan dengan kesungguhan, sehingga tercapailah hasil seperti yang ada dalam laporan ini.

Untuk itu semua, pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pelbagai pihak yang telah memberikan bantuan dalam pelaksanaannya dalam inventarisasi dan dokumentasi kelima aspek ini, mulai dari pengumpulan data sampai dengan penyusunannya.

Terima kasih ini pertama-tama disampaikan kepada, Saudara :

Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Sumatera Utara.
Sekretaris Kantor Wilayah Departemen P dan K Prop. Sumatera Utara.

Kepala Bidang Permuseuman, Sejarah dan Kepurbakalaan Propinsi Sumatera Utara.

Bupati / Walikota Kepala Daerah Tingkat II Sumatera Utara.

Camat / Kepala Desa setempat.

Kepala Kantor Departemen P dan K Tingkat II dan III.

Para Informan.

Konsultan

Ketua dan Anggota-anggota Tim

Dengan selesainya pelaksanaan Inventarisasi dan Dokumentasi ini, maka kita telah maju selangkah lagi dalam usaha pembinaan dan pengembangan kebudayaan daerah dan sekali gus kebudayaan nasional kita.-

M e d a n, Januari 1980

Pemimpin Proyek,

dto

Dra. Zuraida Tanjung

Nip. 130251331

P E N G A N T A R

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah menghasilkan beberapa macam naskah kebudayaan Daerah diantaranya ialah naskah : Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945–1949) Daerah Sumatera Utara.

Kami menyadari bahwa naskah ini belumlah merupakan suatu hasil penelitian yang mendalam, tetapi baru pada tahap pencatatan, yang diharapkan dapat disempurnakan pada waktu-waktu selanjutnya.

Berhasilnya usaha ini berkat kerjasama yang baik antara Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional dengan Pimpinan dan staf Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Pemerintah Daerah, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Perguruan Tinggi, Leknas/LIPI dan tenaga ahli penerangan di daerah.

Oleh karena itu dengan selesainya naskah ini, maka kepada semua pihak yang tersebut diatas kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih.

Demikian pula kepada tim penulis naskah ini di daerah yang terdiri dari : Drs. Abdul Mukti Lubis, Drs. Sanusi, Drs. Abdul Hadi Lubis, Drs. Daud Manurung, Drs. Anas Machmud, Dra. Yusraini Betty, Drs. E. K. Siahaan dan tim penyempurnaan naskah di pusat yang terdiri dari : Sutrisno Kutoyo.

Harapan kami terbitan buku ini ada manfaatnya.

Jakarta, Januari 1984

Pimpinan Proyek

dto

Drs. H. Bambang Suwondo
NIP. 130117589

SAMBUTAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI SUMATERA UTARA

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Sumatera Utara Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara tahun anggaran 1983/1984 menerbitkan beberapa buku lagi sebagai hasil penyusunan Naskah dari beberapa Aspek Kebudayaan Daerah Sumatera Utara. Saya merasa bersyukur dan menyambut dengan gembira hasil penerbitan buku ini.

Buku ini dapat diselesaikan berkat adanya kerja sama yang baik antara para penulis dari Perguruan Tinggi, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara, Pemerintah Daerah, serta instansi—instansi lain yang ada hubungannya.

Tidak terlepas dari segala kekurangan—kekurangan yang kelak dapat disempurnakan pada penerbitan—penerbitan berikutnya, usaha meningkatkan buku ini perlu mengingat buku ini sangat besar manfaatnya bagi generasi muda kita, yang wajib mengetahui, menghargai, menyelamatkan, memelihara, menggali dan mengembangkan serta membina tradisi dan peninggalan—peninggalan sejarah yang mempunyai nilai perjuangan bangsa serta mengembangkan warisan budaya bangsa yang disusun dalam buku ini.

Semoga harapan—harapan yang terkandung dengan penerbitan buku ini akan merupakan sarana penelitian dan kepustakaan yang diperlukan untuk pembangunan bangsa dan negara, khususnya pembangunan kebudayaan.

Akhirnya penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan ini.—

Medan, 26 Januari 1984
Pj. KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI SUMATERA UTARA

dto

S O E P E N O
NIK. 130203/D

DAFTAR ISI

PRAKATA	i
PENGANTAR.....	iii
SAMBUTAN.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. TUJUAN PENELITIAN	2
B. MASALAH	3
C. RUANG LINGKUP.....	4
D. PERTANGGUNG JAWABAN ILMIAH PROSEDUR PENELITIAN.....	5
BAB II : KEADAAN DI SUMATERA UTARA PADA MASA PENDUDUKAN JEPANG	7
A. BIDANG PEMERINTAH	7
B. BIDANG KEHIDUPAN EKONOMI	9
C. BIDANG SOSIAL BUDAYA.....	13
D. INTERAKSI DI DAERAH DENGAN KEJADIAN BERSEJARAH TINGKAT REGIONAL.....	18
1. Bompa dan bapen	18
2. Cuo Sangi Kai dan Cuo sangi In.	19
3. Sendenbu dan Bunkaka.....	20
4. Seinendan, Keibodan dan Fujinkai ..	21
5. Sumatera Hokokai.....	23
6. Gyu Gun dan Heiho	23
BAB III : KEADAAN DI DAERAH SESUDAH PROKLAMASI KEMERDEKAAN	28
A. SUMATERA UTARA PADA PERMU- LAAN PROKLAMASI	28
1. Berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di Sumatera Utara.....	28
2. Pelaksanaan Proklamasi di Sumatera Utara.....	33
a. Peranan Pemuda dalam mereali- sasi proklamasi	33
b. Rapat di Jalan Istana 17, Fuku Dori 6 dan di Jalan Ampelas	34
c. Realisasi proklamasi di Tapanuli .	37

3. Pengibaran Bendera Sang Saka Merah Putih	40
4. Pembentukan Komite Nasional Indonesia—Daerah	40
B. PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA DI SUMATERA UTARA	
1. Lahirnya Propinsi Sumatera	41
2. Sikap Pasukan Jepang	42
3. Hambatan—hambatan terhadap pembentukan Pemerintah Republik Indonesia di Sumatera Utara	44
a. Peristiwa Jalan Bali tanggal 13 Oktober 1945	46
b. Peristiwa Siantar Hotel	48
c. Peristiwa Matahari Hotel di Brastagi	49
4. Partisipasi masyarakat	50
C. PEMBENTUKAN ORGANISASI KEMELITERAN DI DAERAH SUMATERA UTARA	
1. Perebutan Kekuasaan dari Jepang di Sumatera Utara	51
a. Pertempuran di Tiga Panah	52
b. Pertempuran di Tebing Tinggi	53
2. Pembentukan organisasi Kemeliteran dan badan perjuangan Sumatera Utara	55
a. Pembentukan TKR di Sumatera Utara	55
b. Pembentukan Barisan Kelasykaran di Sumatera Utara	58
3. Partisipasi Masyarakat dalam Masa Proklamasi di Sumatera Utara	60
a. Palang Merah	61
b. Dapur Umum	61
D. KEDATANGAN TENTERA SEKUTU DAN TENTERA NICA DI MEDAN	
	62

	1. Sikap masyarakat terhadap kedatangan tentera Sekutu	62
	2. Beberapa Pertempuran Menghadapi tentera Sekutu di Medan	63
	Pertempuran di Jalan Kapten (Jalan, Pandu)	64
BAB IV	: PERJUANGAN DI DAERAH SUMATERA UTARA	66
	A. MASA SEBELUM AKSI MILITER BELANDA I	66
	a. Pengungsian Penduduk Kota Medan .	67
	b. Situasi Kota Medan Sebelum Agresi Belanda I	67
	c. Pemindahan Pusat Pemerintahan dan TKR Keluar Kota Medan	68
	d. Situasi Medan Area	70
	e. Sumatera Utara setelah Perjanjian Linggarjati	73
	f. Gerakan Rakyat Menentang Kekuasaan Raja-raja di Sumatera Timur. .	74
	B. MASA AKSI MILITER BELANDA I (PERANG KEMERDEKAAN I)	77
	C. MASA AKSI MILITER BELANDA II DAN PERIODE PERANG GERILYA	88
	D. INTERAKSI DI DAERAH DENGAN BERBAGAI KAJADIAN BERSEJARAH TINGKAT NASIONAL	93
	E. PERJUANGAN MASYARAKAT PADA BERBAGAI BIDANG KEGIATAN DAN KEHIDUPAN	97
	a. Tata Pemerintahan	97
	2. Keadaan Sosial Ekonomi	104
	3. Keadaan Sosial Budaya	106
	4. Pendidikan, Agama, dan Kepercayaan	106
BAB V	: SUMATERA MENJELANG AKHIR REVOLUSI KEMERDEKAAN	109

A.	MASA MENJELANG PERSETUJUAN KMB	109
1.	Keadaan Sumatera Utara setelah agresi Belanda II	109
2.	Keadaan Penduduk di Daerah yang dikuasai Belanda	111
3.	Politik Sapatisme Belanda	112
4.	Perang Gerilya Menjelang Persetujuan KMB	116
B.	SIKAP MASYARAKAT DI SUMATERA UTARA TERHADAP KONPERENSI INTER INDONESIA	117
C.	SIKAP MASYARAKAT TERHADAP CITA-CITA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DI SUMATERA UTARA	121
1.	Persetujuan KMB di Sumatera Utara	121
2.	Pengambilan Alih tugas Keamanan di Sumatera Utara	122
3.	Sikap Rakyat di Sumatera Utara mengenai Negara Kesatuan	123
D.	KEGIATAN MASYARAKAT DI SUMATERA UTARA	129
E.	PELAKSANAAN HASIL KMB DI SUMATERA UTARA	132
BAB VI :	P E N U T U P	135
	DAFTAR ISTILAH	139
	DAFTAR BACAAN	143
	DAFTAR INFORMAN	147

BAB I

PENDAHULUAN

Yang dimaksud dengan Sumatera Utara dewasa ini adalah terdiri dari Kabupaten—kabupaten : Langkat, Deli Serdang, Tanah Karo, Simalungun, Asahan, Labuhan Batu, Tapanuli Selatan, Nias, Tapanuli Utara dan Dairi.

Sumatera Utara ini dahulu pada masa penjajahan Belanda merupakan dua daerah Keresidenan yaitu : Tapanuli dan Sumatera Timur. Ibu kota Tapanuli Adalah Sibolga dan ibu kota Sumatera Timur ialah : Medan. Setelah kemerdekaan kedua keresidenan ini digabungkan menjadi satu daerah propinsi yang disebut daerah propinsi Sumatera Utara dengan ibu kotanya Medan sesuai dengan putusan Undang—undang Nomor 10 tanggal 15 April 1948.

Di masa pemerintahan Republik Indonesia banyak sekali perubahan yang terjadi terutama dalam tata susunan wilayah dan struktur pemerintahan di daerah ini. Sebagai contoh dahulu kita jumpai beberapa pemerintahan yang diselenggarakan oleh Sultan—sultan dan raja—raja terutama di Sumatera Timur yang kita kenal dengan pemerintahan Zelf Bestuur. Bentuk pemerintahan ini kemudian dihapuskan setelah berdirinya pemerintahan Republik Indonesia.

Penduduk yang mendiami daerah ini juga terdiri dari tiga suku bangsa dan juga banyak dijumpai orang—orang asing. Suku bangsa yang banyak terdapat adalah suku bangsa Batak yang terdiri dari Batak Toba, Mandailing/Angkola, Dairi/Pakpak, Simalungun, Karo. Selain itu di daerah pesisir kita jumpai suku bangsa Melayu. Di pulau Nias berdiam suku bangsa Nias. Bangsa Asing yang banyak adalah orang Cina dan kemudian dalam bilangan yang kecil orang Arab, India dan Pakistan.

Suku bangsa Batak sebahagian besar mendiami daerah dataran tinggi yang subur di kaki Bukit Barisan. Karena penambahan penduduk yang cepat mereka banyak yang pindah ke daerah pesisir. Suku—suku yang lain seperti Minangkabau, Jawa dan Aceh mendiami daerah ini setelah pembukaan perkebunan dan peningkatan kemakmuran di daerah ini.

Pada umumnya kehidupan perekonomian di daerah ini bersendi pada pertanian dan di sepanjang pantai mereka melakukan penangkapan ikan. Di daerah yang dekat dengan hutan mereka mencari ha-

sil hutan, umpamanya rotan, damar dan lain-lain. Pembukaan perkebunan di Sumatera Timur mengakibatkan perubahan bagi kehidupan sosial penduduk terutama di daerah tempat adanya perkebunan. Ketika perdagangan meningkat para imigran Cina mulai memasuki daerah ini. Pada mulanya mereka itu bekerja sebagai buruh, karena mereka rajin dan tekun ada yang meningkat menjadi pedagang kecil. Tetapi dewasa ini mereka itu telah menduduki posisi yang baik dalam dunia perdagangan dan menjadi **entrepreneur** pula.

Penduduk pribumi dibandingkan dengan kemajuan orang Cina, masih jauh sekali ketinggalan dan mereka itu hanyalah menjadi pedagang kecil dan petani serta ada pula yang menjadi buruh di perkebunan dan perusahaan. Dengan perkataan lain perdagangan, industri dan kegiatan perekonomian lainnya dikuasai oleh para pedagang Cina.

Dari penjelasan tersebut bolehlah dikatakan penduduk di Sumatera Utara itu tidaklah bersifat homogen yang terdiri dari satu suku saja tetapi merupakan suatu kumpulan dari berbagai-bagai suku. Situasi seperti ini mempunyai arti yang penting sekali dalam penguraian pokok permasalahan, karena Sumatera Utara nantinya menjadi pelopor bagi perjuangan dalam Kemerdekaan Indonesia di Sumatera. Ini jelas diketahui baik dalam masa pergerakan Kebangsaan maupun dalam masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Keanekaragaman suku-suku yang mendiami daerah Sumatera Utara tersebut merupakan suatu embrio benih dalam persatuan bangsa di daerah ini.

Sumatera Utara yang berbatasan dengan daerah Propinsi Aceh di sebelah utara dan Propinsi Sumatera Barat dan Riau di sebelah selatan sangat mempengaruhi perkembangan daerah itu baik langsung maupun tidak langsung. Pengaruh yang sangat terasa dalam bidang perekonomian, ialah hasil bumi yang terdapat di daerah ini diekspor melalui pelabuhan Belawan.

Pelabuhan itu adalah tempat dari dan keluar masuknya barang dari dan untuk kedua daerah itu. Kedua daerah itu tidak mempunyai fasilitas yang baik seperti Belawan. Dengan sendirinya ketergantungan propinsi-propinsi tersebut sangat bergantung kepada Sumatera Utara, sehingga Sumatera Utara itu seakan-akan jantung dari propinsi yang berbatasan dengannya.

A. TUJUAN PENELITIAN

1. Maksud Penelitian yang diadakan adalah untuk melaksanakan

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, dengan jalan mengadakan penggalian, pengumpulan, pencatatan dan penelitian bahan-bahan yang diperoleh. Penelitian ini sangat penting karena dengan adanya pelaksanaan proyek ini maka sejarah daerah akan lebih lengkap dan dengan sendirinya sejarah Nasional akan benar-benar mencerminkan perkembangan Sejarah Indonesia secara keseluruhan dan tidak hanya meliputi beberapa daerah saja.

Sebagaimana kita ketahui bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia ini bukan hanya terjadi di satu daerah saja tetapi adalah perjuangan dari seluruh bangsa Indonesia. Dalam hal ini telah dibuktikan oleh jalannya sejarah sejak masa penjajahan Belanda sampai pembentukan negara kesatuan tanggal 15 Agustus 1950. Karena mungkin pencatatan untuk itu belum sempurna diadakan, maka perlu diadakan penelitian untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

2. Sumatera Utara dalam perkembangan sejarahnya tentu tidaklah sama dengan daerah lain walaupun periode yang terjadi memang berada dalam waktu yang bersamaan. Memang pada hakekatnya sejarah itu berkembang dalam bentuk yang sama tetapi perkembangan di Sumatera Utara akan menunjukkan ciri-ciri khas daerah itu sendiri dalam mencapai tujuan perjuangan bangsa.

Penduduk yang heterogen dan terdiri dari suku-suku itu seperti tersebut di atas dengan sendirinya membentuk sifat dan corak yang khas, jika dibandingkan dengan daerah lain. Ini semuanya karena kesatuan adat yang berbeda-beda dan struktur budaya yang berlainan. Dari keterangan ini jelaslah tidak selamanya apa yang terjadi di pusat akan diikuti oleh Sumatera Utara karena harus dilihat pula bagaimana kondisi daerah ini. Sejarah Sumatera Utara itu dalam penguraiannya akan banyak memberikan data-data yang pada garis besarnya akan melahirkan sejarah daerah yang dapat memberikan sumbangan terhadap perkembangan sejarah nasional.

B. M A S A L A H.

Dalam sejarah bangsa Indonesia terdapat bahagian yang menguraikan perjuangan secara fisik melawan penjajahan Belanda. Sumatera Utara yang merupakan bahagian dari wilayah Indonesia juga turut mempunyai andil dalam perjuangan itu. Perjuangan mempertahankan Proklamasi Republik Indonesia itu di Sumatera Utara mempunyai ciri yang khusus pula karena problema yang dihadapi kadang-kadang berlainan dengan daerah yang lainnya.

Kelainan-kelainan dalam perjuangan itu mungkin disebabkan oleh

keadaan sosial budaya yang berlainan. Tentu dengan sendirinya kelainan dan perbedaan bentuk-bentuk perjuangan untuk mencapai dan mempertahankan kemerdekaan di daerah perlu mendapat perhatian khusus. Penelitian untuk daerah Sumatera Utara dalam masa perjuangan fisik atau revolusi kemerdekaan ini dapat mengungkapkan keadaan yang lebih jelas dalam usaha mengumpulkan data-data guna penyusunan sejarah nasional. Yang lebih penting pula ialah suatu penulisan sejarah bangsa Indonesia dalam masa revolusi fisik itu akan dapat pula menjadi pedoman bagi generasi penerus kemudian hari dalam pedoman hidupnya.

Nilai-nilai 45 yang merupakan warisan dari jiwa patriot bangsa Indonesia itu akan dapat berlangsung terus dari generasi demi generasi sehingga bangsa Indonesia akan mempunyai identitas sendiri dalam kehidupan masyarakat manusia. Di samping itu pengenalan terhadap perjuangan setiap daerah dalam masa perang kemerdekaan itu akan melahirkan suatu perasaan persatuan yang lebih kokoh dalam mengisi kemerdekaan itu terlebih dalam masa pembangunan sekarang.

C. RUANG LINGKUP.

Sesuai dengan judul dan bahan penelitian maka penulisan Sejarah Revolusi Kemerdekaan di Sumatera Utara meliputi daerah yang sekarang disebut Propinsi Sumatera Utara. Walaupun ia meliputi Sumatera Utara tidak jarang pula penguraianya kadang-kadang mencakup juga daerah lain karena daerah lainnya itu ada hubungannya dengan daerah yang dibicarakan, pada masa revolusi fisik.

Walaupun demikian titik tolak dari penulisan Sejarah Perjuangan Kemerdekaan atau revolusi fisik tetap berdasarkan ruang lingkup daerah Sumatera Utara. Dalam membicarakan pokok persoalan tersebut maka sistematika yang diuraikan tidak berupa penonjolan dari satu elemen saja tetapi meliputi hal-hal yang tersebut di bawah ini yang sangat erat hubungannya satu dengan yang lain :

1. Keadaan pemerintahan dan strukturnya yang terdapat di Sumatera Utara dewasa itu,
2. Tata kehidupan masyarakat seperti keadaan sosial, ekonomi, budaya dan seni,
3. Organisasi ketenteraan yang timbul seperti BKR, TKR, TRI, TNI dan lasykar-lasykar yang merupakan tulang punggung dalam perjuangan mempertahankan proklamasi kemerdekaan di daerah.

Pembahasan dalam sejarah daerah ini dibagi atas periode sebagai berikut :

1. Pendudukan militer Jepang 1942–1945 sebagai suatu latar belakang dari proses pematangan dalam masa-masa revolusi fisik di Sumatera Utara,
2. Saat-saat Proklamasi,
3. Pembentukan pemerintahan Republik Indonesia di Sumatera Utara,
4. Aksi Militer Belanda I dan II sampai pengakuan kedaulatan Republik Indonesia tahun 1949.

Untuk melaksanakan penelitian ini agar dapat mencapai kesempurnaannya maka objek penelitian itu dilakukan pada seluruh daerah-daerah kabupaten yang terdapat di Sumatera Utara. Ada yang dilakukan secara langsung ada pula secara tidak langsung. Yang dimaksud dengan secara langsung ialah dengan mengadakan observasi dan mewawancarai tokoh-tokoh yang masih hidup yang secara tidak langsung ialah dengan membaca tulisan-tulisan yang mengenai masalah tersebut.

Walaupun demikian tidak pula terbatas hanya dengan daerah-daerah itu saja sebagaimana telah dikemukakan juga kalau perlu ke daerah-daerah lain untuk dapat membuktikan kebenaran data-data yang diperoleh. Hal ini dinyatakan demikian karena pada waktu mulainya revolusi kemerdekaan, Sumatera Utara yang sekarang masih bagian dari propinsi Sumatera.

D. PERTANGGUNG JAWABAN ILMIAH PROSEDUR PENELITIAN

Dalam penelitian ini lebih dahulu dilakukan pengumpulan berbagai sumber-sumber data seperti dokumen-dokumen benda-benda dari masa periode 1942–1949, peninggalan-peninggalan tertulis dan juga hasil bacaan dari kepustakaan.

Seluruh bahan-bahan ini diperoleh baik melalui suatu penelitian lapangan, maupun melalui wawancara dengan orang-orang dan tokoh-tokoh yang terlibat langsung dengan kehidupan pada masa periode tersebut. Dengan diperolehnya data-data tersebut maka dapatlah diadakan penilaian atas data itu setelah diadakan suatu seleksi. Penilaian itu akhirnya sampai kepada penafsiran yang berupa kesimpulan-kesimpulan. Tentu dalam menyimpulkan masalah itu pertimbangan secara rasional tidak ditinggalkan.

Dalam penelitian ini sebahagian besar memakai methode historis sebagaimana uraian di atas, bahan-bahan dalam penyusunan ini diper-

oleh dari hasil wawancara, dokumen-dokumen dan buku-buku yang menyangkut perjuangan daerah Sumatera Utara. Ini merupakan bahan primer sedang sebagai bahan sekunder digunakan segala sesuatu yang menyangkut perjuangan bangsa Indonesia pada tahun 1945-1949.

Dengan kedua bahan ini maka kesempurnaan dalam penyusunan dapat diharapkan. Walaupun metode historis menjadi pedoman, metode penelitian yang lain juga dipergunakan bila diperlukan untuk menghindari kelemahan yang terdapat pada setiap metode. Akhirnya penulisan ini dilakukan dengan pedoman secara kronologis agar objektivitas dapat tercapai sebagai tujuan akhirnya.

Karena daerah Sumatera Utara agak luas dan terdiri dari 11 Kabupaten, maka tim dalam mengusahakan pengumpulan data dari tokoh-tokoh yang masih hidup setiap anggota berusaha untuk mendapatkan data-data sebanyak mungkin, data tersebut diusahakan untuk memperolehnya dengan mengadakan wawancara-wawancara kepada tokoh-tokoh yang sedapat mungkin terlibat ataupun yang berperan dalam peristiwa tersebut. Untuk memperoleh data-data tersebut para anggota tim pergi mengunjungi daerah-daerah yang tersangkut dalam perang kemerdekaan. Dengan terkumpulnya data-data yang diperlukan, maka dilakukanlah perumusan-perumusan, guna dijadikan pedoman penyusunan naskah ini.

BAB II

KEADAAN DI SUMATERA UTARA PADA MASA PENDUDUKAN JEPANG

Pasukan-pasukan Jepang yang menyerbu ke daerah Sumatera Utara adalah bahagian dari pasukan ke-25. Pasukan itu berada di bawah komando Jenderal Tomoyuki Yamashita atau terkenal dengan julukan *Malay no Tora* (harimau Malaya), karena ia yang berhasil menaklukkan Semenanjung Malaya. Inggris sebenarnya membanggakan pertahanan dan benteng yang terkuat di Singapura untuk melawan Jepang. Tetapi kenyataan kemudian tentara Inggris di bawah pimpinan Percypal mengakui kekuatan Jepang dan menyerah. Setelah Singapura jatuh maka terbukalah pintu masuk ke Sumatera yang jaraknya tidak berapa jauh dari Singapura.

Di bawah pimpinan Jenderal Nishimura dilakukanlah penyerbuan ke Sumatera dari berbagai jurusan. Pendaratan tentera Jepang di Sumatera Utara dipusatkan di Tanjung Tiram pada tanggal 13 Maret 1942. Pasukan itu memecah kekuatannya atas dua bahagian. Satu menuju Medan dan yang lain bergerak arah ke Pematang Siantar untuk mengejar pasukan Belanda yang mundur ke Tapanuli. Tentera Belanda yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Overakker memusatkan pertahanannya di sekitar tanah Alas yang terkenal dengan nama daerah Gunung Setan dan mencoba dari daerah ini untuk melancarkan perang gerilya.

Tetapi rencana Belanda ini gagal karena ia sama sekali tidak mendapat dukungan dari rakyat, dan gerakan tentera Jepang yang begitu cepat mengepung dari segala arah baik yang datang dari Takengon maupun dari arah Tanah Karo dan Sidikalang akhirnya tidak berdaya. Pada tanggal 28-3-1942 menyerahlah pasukan Belanda itu yang dipimpin oleh Overakker, dengan anak buahnya sebanyak 3000 orang. Peristiwa ini berarti kekuasaan Jepang mulai menggantikan Belanda di Sumatera Utara. Untuk selanjutnya marilah kita uraikan masa pendudukan Jepang itu di Sumatera Utara.

A. BIDANG PEMERINTAHAN

Setelah Jepang menguasai Sumatera maka segera mereka itu menyusun pemerintahannya. Sumatera merupakan bahagian dari kekuasaan daerah militer Barat yang berpusat di Singapura yang telah berganti nama dengan *Shonanto*. Pemerintahannya juga mengikuti pembahagian struktur militernya. Untuk melaksanakan kehidupan masyarakat maka segera pemerintahan sipil dikembangkan pula oleh Je-

pang. Pemerintahan itu juga disebutkan dengan pertabiran militer Jepang yang pengertiannya ialah kekuasaan pemerintahan sipil itu dijalankan oleh militer. Segala jabatan sipil dipegang oleh militer baik dalam pemerintahan maupun pimpinan-pimpinan perusahaan dan perkebunan.

Pemerintahan pertabiran militer itu juga disebut Gunseikanbu dan pembahagian wilayah tetap mereka pertahankan sebagaimana keadaan masa pemerintahan Hindia Belanda. Jadi pulau Sumatera tetap berada dalam satu propinsi tetapi tidak berpusat di Medan melainkan di Bukittinggi. Dipindahkan pusat pemerintahan propinsi itu ke Bukittinggi sesuai dengan strategi Militer dimana pusat markas militer Jepang di Sumatera ialah Bukittinggi.

Panglima militer di Bukit Tinggi itu juga merangkap sebagai gubernur militer atau penguasa Gunseikanbu. Sebagai penguasa atau gubernur jenderal ia menjabat pangkat Cokang Kakka yang membawahi para resident yang disebut Cokang. Jadi Sumatera Utara terdiri dari keresidenan yaitu Sumatera Timur dan Tapanuli. Pangkat penguasa keresidenan itu ialah Cokang dan membawahi wilayah yang dahulunya disebut afdeling.

Tiap-tiap afdeling sebagai penguasa ialah Bunsyuco sedang pada daerah onder afdeling diangkat pula seorang Fuku Bunsyuco. Jadi di Sumatera Utara terdapat dua orang cokang untuk Tapanuli dan Sumatera Timur dan beberapa Bunsyuco dan Fuku bunsyuco. Para Pejabat-pejabat ini semuanya menggantikan kedudukan bangsa Belanda yang telah lowong akibat perang itu dan mereka tertawan. Demikian pula penguasa kota dipimpin oleh wali kota yang disebut Sico. Sebagai penguasa di Sumatera Timur terkenal Gubernur Nakashima dan wali kota Medan ialah Hayasaki.

Selain kekuasaan Jepang secara langsung, kekuasaan sultan dan raja-raja di Sumatera Timur masih terus berlangsung seperti pada kesultanan Langkat, Deli Serdang, dan kerajaan-kerajaan di Simalungun. Seluruh kekuasaan raja-raja itu berada di bawah pengawasan Jepang. Hal ini masih diizinkan oleh Jepang untuk meneruskan pemerintahan Zelfbestuur adalah karena pertimbangan bahwa pengaruh raja-raja itu tidak demikian mudah untuk disingkirkan dan Jepang sangat memerlukan kedudukan Kharisma raja itu untuk kepentingannya seperti tenaga kerja dan romusha yang diperlukan mereka itu kemudian.

Pemerintahan yang begitu singkatnya sebenarnya tidak banyak yang mengubah struktur pemerintahan di Sumatera Utara, karena kegiatan pemerintahan semua ditujukan kepada peperangan. Di antara

yang penting dalam masa pemerintahan Bala tentara Jepang di Sumatera Utara ialah penggunaan Bahasa Indonesia dalam administrasi pemerintahan.

Bahasa Belanda tidak boleh dipergunakan, mengakibatkan perlu dibuat istilah-istilah dalam Bahasa Indonesia. Pada waktu itulah dibentuk di Medan "Panitia istilah" yang kemudian berhasil membentuk kamus istilah-istilah. Yang duduk dalam panitia itu adalah para cerdik pandai yang berada di kota Medan seperti Adinegoro, Dr. Mansur dan Madong Lubis.

Hal inilah yang kemudian memberikan arti yang penting bagi perkembangan Bahasa Indonesia sebagai bahasa dalam administrasi. Sebagaimana diketahui bahwa tujuan Jepang yang utama ialah memenangkan perang, sehingga pemerintahan sipilnya juga menjalankan politik ke arah itu. Untuk melaksanakan pertahanan yang didukung oleh penduduk setempat maka pada tingkat desa diadakan pembahagian-pembahagian pula.

Tiap-tiap desa dibagi pula atas rukun tetangga yang dikepalai oleh **Kumico**. Kumico itu bertugas membina desa agar dapat membantu tentara Jepang dalam berbagai keperluan terutama mengawasi penduduk yang keluar masuk desa. Hal ini sangat penting guna keamanan bagi tentara Jepang karena setiap penduduk yang datang harus melapor dan menunjukkan surat jalan dari desa yang lain.

Di zaman Jepang perjalanan dari satu daerah ke daerah yang lain sangat diawasi sekali. Juga kegunaan rukun kampung itu penting bagi keselamatan kampung itu bila ada serangan musuh.

B. BIDANG KEHIDUPAN EKONOMI

Membicarakan keadaan masyarakat atau keadaan sosial di zaman Jepang dengan sendirinya mengupas keadaan masyarakat dalam masa perang. Keadaan pada awal pendudukan Jepang di Indonesia penduduk merasa gembira karena menurut perhitungan barang-barang Jepang yang terkenal murah harganya akan membanjiri pasaran di Indonesia. Karena itu penduduk menyambut pasukan Jepang di mana-mana dengan ucapan **Banzai** yang berarti selamat datang.

Penduduk karena gembiranya merampas gedung-gedung pemerintahan dan gedung-gedung perusahaan Belanda seperti Borsumy, Geo-Wehry dan sebagainya. Seluruh barang-barang serta kantor dan perusahaan-perusahaan itu berserakan sepanjang jalan. Melihat keadaan itu Jepang mulai melakukan tindakan kekerasan dengan lahirnya maklu-

mat militer tentera pendudukan Jepang yang memberikan hukuman-hukuman mati bagi orang-orang yang kedapatan mengambil harta benda Belanda itu.

Pada beberapa kota-kota Jepang menunjukkan gigihnya dengan menangkapi beberapa orang-orang yang dicurigai terlibat dalam pembongkaran gedung-gedung itu dijatuh hukuman pancung dan tembak mati. Banyak di antaranya yang tidak bersalah tetapi Jepang bertujuan untuk menakuti masyarakat agar patuh kepadanya.

Sejak tindakan Jepang yang kejam melakukan hukuman tanpa proses peradilan rakyat mulai ketakutan dan curiga kepada Jepang. Keadaan ekonomi yang pada mulanya diharapkan rakyat akan mencapai kecerahan tetapi malahan kemudian sebaliknya lahir kesuraman. Barang-barang yang dahulu diimpor sekarang telah kosong. Perdagangan mulai lesu dan kedai-kedai mulai menutup pintunya karena tidak ada barang yang diperjual-belikan.

Keadaan ini terasa bagi pedagang-pedagang Cina yang menguasai dunia dagang kelontong dan pedagang kecil. Demikian pula barang-barang kebutuhan sehari-hari sangat berkurang atau tidak ada seperti gula, beras, sabun, ikan dan lain-lain. Ini terutama disebabkan karena Jepang tidak pernah mendatangkan barang-barang ke daerah ini malahan kebutuhan tentaranya sendiri diambilnya dari daerah setempat. Untuk kebutuhan sabun dibuat sabun dengan memakai soda dari abu dapur. Minyak sawit yang kuning dijadikan bahan penggoreng.

Berdasarkan pemikiran seperti inilah maka Jepang mulai melarang perdagangan beras dan beras harus dijual kepada Jepang dengan harga yang telah ditentukan dalam jumlah yang tertentu pula. Dengan demikian petani tidak mempunyai persediaan beras untuk dimakan sampai masa panen yang berikutnya.

Para petani terpaksa makan ubi, jagung, pisang atau apa saja yang dapat mengganjal perutnya. Ada kalanya dicampur memasaknya dengan beras, hal itu disebut 'dirandi'. Keadaan ini lebih parah lagi di kota-kota dimana penduduk tidak mempunyai tanah seperti di kota Medan yang sebahagian besar penduduknya terdiri dari pedagang dan pegawai. Memang di kota-kota Jepang mengadakan pembahagian catu atau distribusi kepada penduduk berupa kacang kuning, jagung tetapi kebutuhan ini jauh dari mencukupi.

Demikian pula kebutuhan akan sandang tidak dapat terpenuhi. Penduduk terpaksa memakai goni, kulit kayu atau karet karena tidak adanya bahan tekstil di pasaran.

Keadaan ekonomi yang buruk dan lapangan kerja yang tidak ada menyebabkan sebahagian penduduk ada yang bekerja sebagai penyelundup yang membawa beras dalam jumlah yang kecil melalui kereta api dari desa ke kota-kota. Mobil atau bus pada waktu itu tidak ada satu-satunya pengangkutan yang ada hanya lah kereta api. Ada juga yang membawa barang-barang itu dengan sepeda tetapi karena ban yang tidak ada juga kemudian berkurang.

Mereka itu dikenal oleh penduduk sebagai pedagang smokkel. Yang sangat lucu beras itu dililitkan di sepanjang badan untuk tidak diketahui oleh para petugas Jepang yang kejam. Di kota-kota Medan, Pematangsiantar, Tanjungbalai, Kisaran, Tebing Tinggi juga di Tapanuli banyak pula pedagang barang-barang bekas yang terkenal dengan nama penjual **langsam** (penjual kain, celana bekas).

Mereka itu juga menjual barang-barang yang tidak ada di pasaran bebas, yang disebut perdagangan gelap terkenal dengan istilah **smokkel**. Menjualnya pun secara bisik-bisik karena takut akan petugas-petugas Jepang dan karenanya disebut **langsam**. Sampai sekarang istilah **langsam** ini dikenal di Medan sebagai pedagang pakaian bekas. **Langsam** berasal dari perkataan **Langzaam** yang berarti lambat-lambat dalam bahasa Belanda. Kehidupan sosial yang sangat parah adalah di daerah perkebunan-perkebunan dimana buruh dengan gaji yang kecil dan bahan kebutuhan sehari-hari yang lenyap sehingga kemelaratan terasa sekali.

Buruh-buruh kebun makan ubi, jagung dan pakaiannya goni atau kulit kayu. Pada masa inilah banyak buruh-buruh dari perkebunan pergi ke Tapanuli untuk bekerja di ladang dan di sawah. Mereka sekedar diberi makan saja. Rumah-rumah sakit tidak lagi berfungsi sebagai tempat pengobatan karena dokter tidak ada dan obat-obat sangat kurang.

Di rumah sakit Laras sebuah rumah sakit perkebunan lembaran karet (sheet) dijadikan perban, demikian pula untuk obat kudis dipergunakan belerang dan vaselin dipakai sebagai salep. Banyak lagi obat-obatan lainnya, yang digunakan sebenarnya tidak berarti bagi penyembuhan si sakit. Kehidupan para nelayan tidak kurang sulitnya dari golongan yang lain. Mereka itu tidak dibenarkan untuk menangkap ikan agak ke tengah laut karena perhitungan keamanan bagi militer Jepang dan takut kalau-kalau tersentuh ranjau laut. Dengan sendirinya hasil yang diperoleh juga tidak memuaskan.

Dari hasil yang tidak memuaskan itu Jepang menguasai lebih da-

hulu ikan-ikan itu sehingga nelayan tidak mendapat kebebasan menjualnya. Para pegawai di kota-kota terpaksa turun menggarap tanah-tanah yang ada di sekitar kota untuk mengerjakan tanah-tanah kosong guna menutupi kebutuhan akan bahan pangan yang sangat kurang.

Dari penguraian di atas jelaslah betapa buruknya kondisi sosial ekonomi penduduk pada waktu itu. Di mana-mana kelihatan penduduk dijangkiti oleh *Hongerodeem* atau penyakit busung lapar dan kudis yang sering disebut *eser-eser*. Tentu saja angka kematian meningkat di kalangan penduduk tetapi karena angka statistik tidak ada sehingga tidak diketahui. Penindasan terhadap rakyat tidak kepalang tanggung dan boleh dikatakan puncak dari segala penderitaan. Keadaan ini jelas diuraikan :

“Usaha-usaha perang Jepang itu meliputi segala bidang, mulai memproduksi dan mengumpulkan bahan makanan terutama padi ternak, mengumpulkan tenaga pekerja yang dikenal dengan nama “romusha” untuk berbagai-bagai pembangunan proyek-proyek untuk perang seperti membuat jalan-jalan raya, jalan-jalan kereta api, lapangan terbang dan sebagainya” 1

Dalam suasana penderitaan akibat kelaparan inilah seluruh penduduk dieksploitasi Jepang untuk kepentingan peperangannya. Di Blangkejeren beribu-ribu penduduk dipekerjakan sebagai tenaga kerja paksa untuk membuka jalan. Merekalah yang disebut *romusha*. Demikian pula banyak yang dikirim ke Pekanbaru untuk membuat jalan kereta api tembus ke Rantau Prapat. Banyak lagi tempat yang dikerjakan untuk memperoleh tenaga *romusha-romusha* itu tidak segan-segan mereka menangkap penduduk di dalam keramaian seperti pulang menonton bila penduduk itu tidak dapat menunjukkan kartu penduduknya.

Mereka inilah yang kemudian dikirim sebagai *romusha*. Bukan hanya di Sumatera Utara saja malahan ada juga dikirim keluar Indonesia seperti ke Burma, Thailand dan sebagainya. Karena itu penduduk tidak ingin untuk keluar rumah. Selain dari pada itu di kota-kota dan desa setiap waktu tertentu diadakan pula *Kinro Hoshi* yang disebut kerja sukarela. Sering pula hal disebut di beberapa tempat gotong royong untuk membuat benteng-benteng dan lain-lainnya secara paksa.

Keadaan sosial ekonomi penduduk yang demikian ini memang merupakan suatu batu ujian yang menyebabkan penduduk di daerah ini kemudian dapat menderita walaupun terjadinya berbagai cobaan lainnya. Semangat rakyat menjadi membaja dan inilah yang menjadikan modal mutlak bagi perjuangan penduduk Sumatera Utara dalam mempertahankan kemerdekaannya nanti. Penderitaan ini juga menye-

babkan kebencian terhadap Jepang semakin mendalam malahan terjadi pemberontakan di Pancur Batu terhadap Jepang yang disebut pemberontakan Aron.

C. BIDANG SOSIAL BUDAYA

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Jepang dalam masa pemerintahannya itu melakukan segala kegiatan yang semuanya ditujukannya untuk kepentingan peperangannya. Demikian pula dalam kehidupan Sosial Budaya perkembangannya juga ditujukan untuk kepentingan-kepentingan peperangan Jepang.

Setelah Jepang menduduki Sumatera Utara, praktis selama setengah tahun sekolah-sekolah tidak belajar dan baru pada permulaan Agustus 1942 kembali sekolah dibuka. Sekolah-sekolah yang memakai bahasa Belanda dengan sendirinya dihapuskan.

Sekolah sambungan atau *Vervolgschool*, *Skakelschool*, *Hollandsche Inlands School* dan lain sejenisnya disamakan menjadi 6 tahun yang disebut *Irinzo Koto Seja gakko* (ZKS). Ini kita sebut saja Sekolah Rendah Umum. Lanjutan Sekolah Rendah adalah tingkat Menengah Pertama yaitu *Tsu Gakko* yang lamanya tiga tahun.

Sekolah itu masing-masing di bekas-bekas **MULO** dahulu. Setaraf dengan itu ada sekolah Menengah untuk wanita yaitu **MELATI KOTOJO GAKKO** yang hanya berada di Medan. Sekolah Guru terdapat di Binjai dan Sipoholon yang dikenal dengan **Sihan Gakko**. Sekolah Menengah Pertanian disebut **Nogio Gakko** di Medan.

Selain dari pada itu ada pula sekolah latihan tani di Talapeta dan di Nagahuta. Di Medan dibuka pula sekolah Pegawai oleh Jepang yang disebut **Seinen Renseisyo**. Sekolah-sekolah itu berada di bawah penilikan pemerintahan pendudukan Jepang. Mengenai politik pendidikan sebagaimana telah diterangkan di atas maka pendidikan yang diutamakan ialah mendidik sifat keprajuritan Jepang dan pengabdian kepada **Teno Heika** atau Kaisar Jepang.

Tidak mengherankan kalau kurikulum pendidikan Jepang itu paling diutamakan ialah pendidikan Semi militer. Setiap hari ada latihan militer seperti baris berbaris yang terkenal dengan nama **Kioren**. Pembukaan sekolah dimulai dengan penghormatan kepada Kaisar Jepang yaitu **Saikerei** dengan muka menghadap ke Tokyo. Kemudian di iring dengan **Taiso** atau gerak badan.

Boleh dikatakan 70 % pendidikan ditujukan kepada pendidikan kemiliteran. Para pelajar yang pria diharuskan mencukur rambutnya

seperti tentera dan memakai topi ala militer.

Dari sistem pendidikan itu jelaslah Jepang ingin melakukan japanisasi di kalangan generasi muda bangsa Indonesia. Hal ini jelas sekali kelihatan. Di mana-mana mereka itu mengajarkan bahasa Jepang sejak dari tingkatan Sekolah Dasar sampai ke seluruh sekolah-sekolah yang lebih tinggi dari tingkatan tersebut.

Di samping pelajar-pelajar melakukan latihan yang bersifat ketenteraan tidak jarang pula melakukan kerja bakti dengan istilah pada waktu itu disebut *Kinro hosi*. Jadi boleh dikatakan masalah mengenai ilmu pengetahuan agak diabaikan oleh Jepang. Karena pendidikan yang demikian itu maka boleh dikatakan anak-anak sekolah telah hampir-hampir berfikir cara Jepang.

Selain kegiatan pendidikan marilah pula kita melihat bagaimana tindakan Jepang dalam seni budaya dan kebudayaan pada umumnya. Jawatan Kebudayaan yang dipimpin Jepang pada masa itu memang sengaja untuk melaksanakan politik mereka disesuaikan dengan yang digariskan oleh pemerintahan militernya.

Bunkaka sebagai alat dari penerangan Jepang dengan menggunakan pemuka-pemuka bangsa Indonesia mencoba mengindoktrinasi bangsa Indonesia dengan tujuan politik mereka itu. Di mana-mana mereka mempropogandakan kemakmuran Asia Timur Raya dengan Dai Nippon sebagai pelindung Asia. Tidak saja melalui alat penerangan mereka itu juga melalui sarana kesenian sandiwara dan lain-lainnya mereka berusaha meyakinkan penduduk akan perang yang mereka adakan.

Di Medan mereka mengadakan sandiwara *Kinsei Gekidan* yang dihimpunnya artis-artis Medan dan ini juga alat propogandanya. Salah satu sandiwara yang terkenal di zaman Jepang dan mengadakan pertunjukan ke kota-kota di Sumatera Timur antara lain ialah *Asmara Dhana* pimpinan Ahmad CB. Sandiwara ini juga sampai-sampai melakukan perlawatan ke Malaya.

Pada waktu itu kontak kebudayaan lebih dekat ke Malaya dari pada di Jawa dan ini mungkin karena wilayah antara keduanya itu berada dalam suatu pusat kekuasaan yang terletak di Singapura. Keadaan situasi ini menyebabkan hubungan kebudayaan antara Sumatera dengan Semenanjung Malaya lebih erat dibandingkan dengan pulau Jawa. Sebagai bukti kemudian banyak para artis dari Sumatera ini yang menetap di Malaya setelah perang dunia ke II seperti Kasmah Booty dan lain-lainnya. Namun demikian di daerah Tapanuli subur tumbuhnya opera. Banyak yang menyingkapkan ceritera-ceritera lama tetapi ada

kalanya bertendens pada pengabdian kepada Jepang.

Mengenai sarana lalu lintas di Sumatera Utara dibandingkan dengan masa sebelum pendudukan Jepang itu sangatlah berkurang. Satu-satunya alat lalu lintas rakyat yang vital ialah kereta api. Bus-bus sangat kurang sekali karena kesulitan akan bahan bakar dan **spare part** motor yang boleh dikatakan tidak ada. Segala kebutuhan lalu lintas di Sumatera Timur diatasi dengan kereta api sedang di Tapanuli dengan bus-bus dan sado (bendi) dan kuda beban dan pedati.

Karena kurangnya sarana lalu lintas itu maka hubungan antara satu desa dan daerah yang lain sangat sulit sedang lalu lintas barang dan kebutuhan rakyat dengan sendirinya juga kurang terpenuhi. Arus perjalanan antara desa-desa dengan kota sangat terbatas. Selain karena pengangkutan yang kurang juga penduduk takut kalau-kalau ada razia yang dilakukan Jepang di mana mereka mungkin saja ditangkap dan akan dijadikan pekerja paksa atau *romusha*.

Sebagaimana telah diuraikan bahwa kedatangan Jepang ke Sumatera Utara dianggap oleh penduduk sebagai suatu peristiwa penting karena yang datang adalah bangsa Asia dan dengan semboyan untuk membebaskan bangsa Asia dari belenggu penjajahan bangsa Eropa. Sering dipopulerkan bahwa Jepang itu adalah saudara tua. Di mana-mana penduduk memberikan sambutan dengan mengucapkan *Banzai, Banzai* yang artinya selamat.

Apalagi tentara Jepang yang datang itu kadang-kadang juga bekas tetangganya dahulu seperti tukang gambar, tukang obat dan sebagainya. Walaupun sekarang ia menjadi tentera keakraban itu masih kelihatan. Keadaan itu kemudian lekas sekali berubah karena Jepang setelah menduduki Indonesia mempunyai niat untuk menguasai Indonesia dan memasukkan Indonesia dalam rangka cita-citanya Asia Timur Raya di bawah lindungan Jepang. Cita-citanya ini jelas kelihatan dalam politik yang dijalankan oleh pemerintahan militer Jepang di Sumatera Utara. Sewaktu Jepang baru menduduki Sumatera Utara untuk menarik perhatian partai-partai politik dan rakyat maka bendera Indonesia dibolehkan dikibarkan di samping bendera Jepang.

Tetapi kemudian secara berangsur-angsur keadaan itu berubah. Politik yang dijalankan Jepang pada waktu itu adalah suatu politik yang disusun oleh pasukan ke-25 yang berkedudukan di Bukit Tinggi. Sebagaimana telah diketahui bahwa pemerintahan Sumatera dan Jawa terpisah satu dengan lainnya dalam pemerintahan karena pemerintahan itu dibagi menurut pembahagian pasukan-pasukannya.

Hal ini juga menyebabkan segala yang dijalankan di Jawa oleh pemerintah Jepang tidak selamanya sama dengan di Sumatera. Di Sumatera politik Jepang disesuaikan dengan kepentingan pertahanannya di mana Tentara ke-25 agak lebih keras tindakannya terhadap para pimpinan politik dari bangsa Indonesia. Kalau pada mulanya Jepang membiarkan adanya partai politik berlangsung untuk menarik simpati rakyat tetapi kemudian Jepang membubarkan partai-partai itu dan melarang penduduk untuk mengibarkan Sang Saka Merah Putih.

Pelarangan itu dilakukan Jepang dengan mengumpulkan segala tokoh partai di lapangan di dekat Deli Maatchapiij dan di situ dinyatakan pelarangan tersebut. Dengan berbagai kata yang menarik Jepang mengatakan bahwa kini bangsa Indonesia tidak usah mengibarkan bendera Merah Putih lagi. Cukup saja pengibaran bendera Jepang yaitu **Hinomaru** karena Jepang adalah saudara tuanya dan tidaklah selayaknya bangsa Indonesia sebagai saudara yang lebih muda mengibarkan benderanya pula.

Dengan tindakan Jepang yang demikian maka mulailah timbul perasaan curiga dari kalangan kaum pergerakan Indonesia kepada Jepang. Politik Jepang yang demikian mulai mengekang kaum pergerakan bangsa Indonesia sikap baru di Sumatera Utara menghadapi Jepang.

Politik kekerasan yang dijalankan Jepang dan mencurigakan bagi bangsa Indonesia terutama pemimpin-pemimpinnya menyebabkan tokoh-tokoh politik bangsa Indonesia mulai menjalankan suatu sikap hati-hati terhadap Jepang. Pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia di Sumatera Utara mulai mengalami kesulitan akan misinya untuk membangkitkan semangat kebangsaan. Walaupun begitu terpaksa mereka merobah siasat dengan berbagai cara.

“Para pemimpin di Sumatera, sebagaimana juga pemimpin di Jawa, segera setelah menerima tugas yang dibebankan Jepang itu, tetapi dengan membawa rencana dan tujuannya sendiri pula yang diametral bertentangan dengan yang dimaksud Jepang. Pendeknya, untuk menetralkan taktik baru dalam perjuangan menghadapi Jepang” 2

Dengan taktik inilah para tokoh pemimpin bangsa Indonesia di Sumatera Utara itu ada yang bekerja sama dengan Jepang seperti Mr. Mohd. Yusuf, Xarim MS dan lain-lain. Walaupun ada yang tidak bekerja sama dengan Jepang tetapi pada ujudnya mereka bersatu untuk Indonesia Merdeka. Sedang yang bekerja sama dengan Jepang itu dalam setiap kesempatan terus menggembelng rakyat untuk sadar akan artinya kemerdekaan dan kesatuan bangsa.

Rakyat diajar dengan berbagai macam ilmu yang pada masa penjajahan Belanda sukar sekali untuk memperolehnya, terutama dalam bidang kemiliteran. Walaupun Jepang dapat memperlakukakan kaum politisi bangsa Indonesia tetapi mereka itupun tetap masih merasa curiga terhadap bangsa Indonesia.

Dalam jawatan-jawatan yang vital mereka memilih para pegawai-pegawai yang menurut mereka dapat dipercayai. Hal ini dapat kita lihat bagaimana mereka itu melakukan tindakan terhadap pegawai-pegawai bekas NIROM (Nederland Indische Radio Omroep).

"Sementara itu politik Jepang terhadap penyiar radio Medan yang disebut mereka Medan Hosokawa juga berlainan dengan politiknya terhadap pegawai-pegawai jawatan pemerintahan lainnya. Kalau pada jawatan lain Jepang masih terus mempergunakan pegawai-pegawai yang lama, maka tidak demikian halnya dengan Medan Hosokawa (Penyiaran Radio Medan). 3

Keadaan yang demikian ini juga berlaku pada jawatan yang lainnya, menyangkut kepada bagian yang penting. Pengawasan Jepang yang demikian kerasnya mempunyai tujuan agar bangsa Indonesia itu menjadi setia pada Jepang. Di dalam politik Jepang untuk menguasai penduduk mereka melaksanakan segala disiplin militer dalam segala bidang. Murid-murid sekolah diharuskan memakai topi militer dan gundul terutama yang berada di sekolah menengah atau Tsu gakko. Bahasa Jepang dipaksakan harus dipakai sehingga di bioskop ditulis slogan-slogan Manabe Niponggo yang berarti pelajari bahasa Jepang.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya Jepang melakukan kegiatan sesuai dengan politik peperangannya terhadap negara-negara sekutu. Maka dalam menjalankan pemerintahannya di Sumatera Utara ini ia juga meletakkan garis besar politik mereka itu terhadap rakyat. Agar rakyat dapat diperalatnya untuk membantu militer maka setiap kampung dibagi atas kumi dan dikepalai oleh seorang Kumiko.

Jadi para Kumiko bertanggung jawab atas penduduk yang ada di dalamnya. Begitu pula kampung atau Tsokai bertanggungjawab atas kumi-kumi yang ada di dalam wilayahnya. Setiap kumi dan tsokai merupakan badan pertahanan teritorial yang bertanggung jawab di daerahnya. Pada setiap saat harus siap sedia menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Dengan demikian tidak mungkin penduduk dari satu daerah pindah ke daerah lainnya.

Musuh-musuh Jepang tidak akan mudah melakukan infiltrasi ke tempat itu. Setiap kumi dan tsokai mengadakan pula latihan-latihan

kemiliteran seperti baris-berbaris, mencegah kebakaran dan lain-lainnya yang dapat membantu militer Jepang. Dengan demikian melalui kepala-kepala kumi dan tsokai itu Jepang melakukan kegiatan-kegiatan kerja bakti untuk membuat parit-parit dan lubang-lubang pertahanan, menyediakan padi dan bahan makanan lainnya untuk Jepang. Ini jugalah disebut di daerah Tapanuli dengan istilah Jigedan dan Bogodan.

D. INTERAKSI DI DAERAH DENGAN KEJADIAN BERSEJARAH TINGKAT NASIONAL

Kegiatan seperti Gerakan Tiga A, Gerakan Putera dan Jawa Hokokai tidak ada di Sumatera Utara, karena berbeda pasukan yang berkuasa di Jawa dengan di Sumatera yang ada adalah :

1. Bompa dan Bapen

Pulau Jawa dikuasai oleh Tentara ke 16 di mana kegiatan-kegiatan politik telah mencapai kemajuan-kemajuan, tetapi Sumatera dikuasai oleh Tentara ke 25 Jepang yang tidak membenarkan membicarakan persoalan politik. Di Sumatera Utara kemudian malahan dilarang dan dibubarkan partai-partai politik itu sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Karena politik Jepang di Sumatera seperti itu maka tokoh-tokoh partai politik pada waktu itu telah mengambil suatu kesimpulan agar kegiatan mereka dipusatkan saja ke Pulau Jawa di mana kebebasan politik agak lebih lunak.

Hal ini diputuskan oleh tokoh-tokoh seperti Dr. AK Gani pimpinan Gerindo dan Dr. M. Isa dari tokoh Parindra yang berjumpa dengan Bung Karno, mereka berangkat ke Jawa dari pengasingannya di Bengkulu.

Para tokoh politik bangsa Indonesia yang berada di Sumatera tidak tinggal diam saja tetapi melalui cara apa saja kegiatan politik bangsa Indonesia terus dijalankan, sesuai dengan kesepakatan yang telah diikrarkan. Kegiatan partai politik atau para pemimpinnya boleh dikatakan sejak tahun 1942 sampai permulaan tahun 1943 agak terhenti.

Tetapi setelah situasi keadaan Perang Pasifik yang dilancarkan Jepang semakin memburuk di mana tentara Jepang telah mengalami pukulan dari segala front mulai mereka melakukan tindakan yang agak lunak. Perubahan ini terjadi setelah pemerintahan kerajaan Jepang mengadakan suatu Konferensi kemaharajaan yang dilakukan pada bulan Mei 1943 atau tahun 2603 tahun Jepang.

Konperensi itu membahas keadaan yang memburuk terhadap Jepang. Keputusan yang penting yang menyangkut sedikit banyaknya mengenai politik Jepang di daerah yang diduduki mereka. Mereka memutuskan untuk memberikan suatu konsesi terhadap penduduk dalam daerah yang didudukinya untuk turut serta dalam memberikan partisipasinya pada masalah politik dan pemerintahan.

Dalam bidang pertahanan yang penting dilakukan oleh Jepang ialah mengikut sertakan penduduk pribumi dalam kegiatan perlawanan teritorial. Untuk melaksanakan keputusan konperensi itulah, maka di Sumatera Timur dibentuk suatu organisasi oleh Jepang yang disebut **BOMPA**, yaitu kepanjangannya Badan Oentoek Membantoe Pertahanan Asia. Di daerah Tapanuli dibentuk pula **BAPEN**, yaitu Badan Pertahanan Negeri.

BOMPA di Sumatera Timur mula-mula dipimpin oleh Mr. Mohd. Yusuf seorang advokaad yang terkenal di Medan dan kemudian diganti oleh Abdul Xarim MS. **BAPEN** di Tapanuli dipimpin oleh Dr. F.L. To-bing.

Para pemimpin bangsa Indonesia di Sumatera Utara menerima tugas yang diberikan oleh Jepang itu tetapi dengan suatu taktik yang telah digarispawahi lebih dahulu, yaitu kepentingan kemerdekaan bangsa Indonesia. Maka melalui organisasi itu pula disusun kekuatan untuk menghadapi Jepang bilamana kekuatan itu diperlukan kelak di kemudian hari.

Melalui badan-badan itu Jepang menugaskan pemimpin-pemimpin di daerah ini untuk berpropaganda di hadapan rakyat agar membantu Jepang dalam Perang Pasifik ini. Tetapi pada hakekatnya sebahagian besar apa yang diucapkan tiada lain hanyalah suatu usaha untuk membangkitkan kesadaran bangsa di kalangan rakyat jelata untuk persiapan dalam perjuangan mencapai kemerdekaan Indonesia.

2. Cuo Sangi Kai dan Cuo Sangi In

Kelongsaran bagi kegiatan politik di Sumatera baru direalisasi oleh Jepang, yaitu Tentara ke 25 pada bulan Nopember 1943. Pada 1 Nopember itu tentara ke 25 yang berkedudukan di Bukit Tinggi memutuskan agar tiap daerah keresidenan dibentuk dewan **Cuo Sangi Kai** dan di Bukit Tinggi **Cuo Sangi In**. Tindakan Jepang ini tiada lain adalah untuk membujuk bangsa Indonesia agar mau membantu Jepang karena Jepang telah terdesak oleh Sekutu.

Pembentukan Dewan **Cuo Sangi In** di Sumatera itu tiada serentak

seperti di Jawa, di Sumatera baru setelah 7 bulan setelah janji kemerdekaan yang diumumkan oleh Perdana Menteri Kuniaki Koiso dan menjelang perang akan usai pada tanggal 24 Maret 1945 diresmikanlah berdirinya badan itu di Bukit Tinggi. Dewan-dewan itu hanyalah sebagai dewan penasehat bagi pemerintahan Militer Jepang.

Kalau di tingkat Keresidenan disebut **Cuo Sangi Kai** dan taraf Pusat **Cuo Sangi In**. Pada tingkat Keresidenan Sumatera Timur yang menjadi anggota waktu itu adalah Adinegoro, Mr. Teuku Mohd. Hassan, Hamka dan banyak lagi pemuka masyarakat pada waktu itu.

Di daerah Tapanuli ialah Dr. Ferdinand Lumbantobing, Sutan Soripada Mulia dan lain-lainnya. Kalau pada Dewan Sumatera yaitu **Cuo Sangi In** yang menjadi ketua ialah Mohd. Syaefi seorang tokoh pendidik dari INS Kayu Tanam di Sumatera Barat, wakilnya A. Abbas dan Teuku Nyak Arif. Sebagai paniteranya adalah Adinegoro. Kemudian juga dalam bidang pemerintahan mulai pula posisi dalam jabatan-jabatan yang penting ditempatkan pula bangsa Indonesia.

Di tiap-tiap daerah **Gunseibu** yaitu pemerintahan sipil mulai ada beberapa orang bangsa Indonesia diangkat sebagai wakil-wakil pembesar Jepang. Di Tapanuli Dr. F.L. Tobing diangkat sebagai wakil **Choken** atau wakil gubernur Tapanuli.

Di Sumatera Timur karena banyaknya kerajaan-kerajaan maka tiap daerah diangkat sebagai wakil **Bunsyuco** atau bupati beberapa orang yang berasal dari daerah tersebut. Untuk Simalungun Maja Purba, Langkat Amir Hamzah, untuk Karo Ngerajai Meliala yang masing-masing menjadi **Fuku Bunsyuco**.

Dengan pengangkatan jabatan-jabatan ini Jepang mengharapkan adanya partisipasi penduduk setempat untuk membantu Jepang bagi pertahanan mereka di daerah Sumatera Timur. Hal ini diperlukan sekali karena kedudukan Jepang telah pula mulai mengalami gempuran-gempuran dari sekutu yang berpangkalan di Srilangka atau Kolombo.

Beberapa kali lapangan Polonia diserang oleh kapal terbang sekutu, demikian pula pulau-pulau di pantai Barat seperti di Nias kapal-kapal sekutu telah pula mundur mandir. Kesemua kondisi ini mendapat pertimbangan dari Jepang sehingga konsesi mereka terhadap penduduk di daerah Sumatera Utara semakin luas.

3. Sendenbu dan Bunkaka

Untuk melaksanakan kepentingan Jepang juga mempunyai badan penerangan yang disebut **Sendenbu**. Pimpinan **senenbu** itu berada di

tangan Jepang. Para juru penerangan itu semuanya orang-orang Indonesia yang bertugas untuk mempropagandakan tujuan Jepang menguasai Indonesia dengan berbagai macam cara. Yang penting banyak mereka melakukan pertunjukan Kami Sibai semacam slide tetapi di sini adalah gambar-gambar yang merupakan suatu ceritera tentang keprajuritan Jepang dan kebaktian terhadap Jepang baik dari segi pertaniannya maupun segi militernya.

Untuk mempengaruhi massa juga diterbitkan surat kabar yang berbahasa Indonesia bernama Sumatera Sinbun dan berkedudukan di Medan. Surat kabar itu dipimpin oleh Adinegoro. Juga pada waktu itu dibentuk badan untuk menterjemahkan bahasa Jepang yang dipimpin oleh Dr. Pirngadi, Adinegoro dan Abubakar. Melalui badan-badan inilah Jepang ingin menanamkan pengaruhnya kepada bangsa Indonesia.

Pelajaran Bahasa Jepang pada masa itu sengaja disebarkan kepada rakyat agar mudah Jepang melakukan japanisasi. Di tiap kota ada kursus Bahasa Jepang yang dipimpin oleh bangsa Jepang dan dibantu oleh beberapa orang Indonesia. Sebagai contoh pada waktu itu telah ada buku pelajaran Bahasa Jepang yang disebut Tadashi Niponggo dan dikarang oleh Basir Nasution.

Usaha Sendenbu ini memang dapat membuat penduduk membenci Sekutu tetapi dalam pada itu semangat kebangsaan semakin meluap karena sebahagian besar dari para juru propaganda bangsa Indonesia itu adalah orang-orang yang berasal dari pergerakan. Karena itulah maka sesudah Jepang menyerah kepada sekutu penduduk di Sumatera Utara sudah siap untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan itu.

4. Seinendan, Keibodan dan Fujinkai

Karena keadaan situasi Jepang pada waktu itu telah mengalami perobahan dari sikap yang aktif dan agressip maka setelah pertempuran yang terjadi di pulau-pulau Karang, mereka mulai berusaha melakukan politik yang defensif itu maka mereka melaksanakan suatu sikap yang lunak terhadap penduduk dari daerah yang diperintahinya. Penduduk diusahakannya untuk dapat membantu mereka dalam segi politik pertahanannya. Di Sumatera perobahan tindakannya mulai dilakukan pada akhir Nopember 1943. Sejak saat itu Jepang mulai melakukan suatu usaha agar pertahanan sipil dapat kiranya dilaksanakan oleh penduduk sendiri.

Untuk inilah mereka membentuk organisasi **Seinendan**, **Keibodan**, yang merupakan suatu kegiatan dalam masyarakat berupa semi militer. Organisasi ini merupakan suatu usaha Jepang untuk membentuk lapisan pertahanan yang kedua, di mana potensi rakyat dapat digunakan semaksimal mungkin. Jadi kalau sekiranya sekutu berhasil melakukan pendaratan ia akan mendapat perlawanan dari seluruh rakyat.

Dalam menyusun pertahanan rakyat itu inti dari kekuatan adalah desa. Pada setiap desa dibentuk **Tonari Gumi** yang merupakan suatu pengawalan dari kampung. Barisan pemuda desa itu diberi nama **Seinendan** dan **Keibodan**. Kedua barisan pemuda desa itu diberi latihan kemiliteran yang berat dan disiplin yang keras.

Tugas kedua pasukan itu adalah untuk turut mengadakan perang gerilya bila sekutu mendarat dan juga membantu kepolisian menjaga keamanan. Untuk ini Jepang membentuk pasukan semi militer seperti **Talapeta** dan **Nagahuta**. Kedua organisasi pemuda itu dilatih ketrampilan untuk bertani dan latihan kemiliteran.

Tentu dengan latihan yang demikian ini tujuan Jepang tidak lain agar **Talapeta** dan **Nagahuta** itu dapat dijadikan para petani nantinya menjadi basis bagi kegiatan gerilya Jepang dalam melawan Sekutu. Mereka inilah merupakan suatu barisan perantara antara petani dengan pasukan Jepang.

Kalau di kalangan petani Jepang membentuk kedua pasukan itu maka di daerah pegunungan dan untuk hutan rimba dibentuk pula pasukan **Moku Tai** dan **Kenko Tai Sin Tai**. **Moku Tai** artinya pasukan harimau yang nantinya akan dipergunakan Jepang di pegunungan. Pada daerah pantai Jepang juga membentuk pertahanan rakyat yang disebut dengan **Keijo Jikedan** yang bertugas sebagai pengawas pantai dengan lautannya.

Seluruh barisan-barisan ini seperti suatu mata rantai dari pertahanan rakyat. Sejak dari desa dengan **Tonari gumi** yang dipimpin oleh para **Kumico** yaitu kepala lorong dan di kota-kota dengan **Seinendan** dan **Keibodan**. Kemudian para wanita harus meleburkan dirinya dalam kegiatan organisasi **Fujinkai** yang dikepalai sendiri oleh isteri dari setiap kepala desa untuk membantu kegiatan pertolongan pertama dan dapur umum.

Seterusnya **Moku Tai** dan **Kenko Tai Sin Tai** merupakan organisasi semi militer untuk membantu tentera Jepang berikut dengan **Talapeta** dan **Nagahuta**. Dengan organisasi ini semua kegiatan masyarakat dapat digunakan Jepang untuk kepentingannya. Boleh dikatakan seluruh

rakyat di Sumatera Utara waktu tahun-tahun 1943 semuanya diarahkan untuk kepentingan persiapan perang Jepang. Tidaklah mengherankan bagi kita kegiatan perekonomian rakyat menjadi terbengkalai. Boleh dikatakan di sinilah puncak kemiskinan dan kemelaratan seperti yang telah diuraikan.

5. Sumatera Hokokai

Sebagaimana di Jawa maka di Sumatera juga dibentuk Jepang **Sumatera Hokokai**. Pembentukan ini agak lama sesudah terbentuknya organisasi ini di Jawa. Kelambatan ini adalah karena politik tentara pendudukan di Jawa dengan di Sumatera berbeda. Tetapi setelah Jepang terdesak dan membutuhkan bantuan rakyat setempat maka buru-buru mereka membentuk organisasi tersebut. Karena itu kegiatannya di Sumatera tidak dapat diketahui dengan jelas, demikian juga mengenai siapa yang menjadi tokoh-tokoh. Menurut Sejarah Perjuangan **KODAM II** diuraikan sebagai berikut :

“Selain **Sangi Kai** (Dewan Penasihat) di Sumatera oleh Jepang dibentuk pula **Sumatera Hokokai** (Kebaktian Rakyat Sumatera) sebagaimana **Jawa Hokokai** di Jawa. **Sumatera Hokokai** ini bertugas untuk mengkoordinir semua kegiatan masyarakat seperti Seinendan, pendidikan dan lain-lain kegiatan yang digerakkan oleh Gunseikan. Di samping itu dalam taraf pelaksanaan janji Koiso, maka **Sumatera Hokokai** bertugas pula mendirikan panitia lokal untuk menunjang janji Koiso ini. Dari Sumatera terpilih 21 orang yang akan turut menyumbangkan pikiran mereka dalam taraf lokal. Di antara wakil-wakil tersebut dari Sumatera Utara antara lain ialah Adinegoro, Dr. Pirngadi, Dr. Ferdinan L. Tobing, Mr. Teuku Mohd. Hassan.”⁴

Jadi jelaslah bahwa **Sumatera Hokokai** itu didirikan Jepang sebagai suatu alat untuk menunjang organisasi-organisasi yang telah dibentuknya agar mendapat dukungan dari kaum intelegensia yang ada di Sumatera Utara. Ini semuanya diciptakan Jepang untuk memperlalat rakyat Sumatera Utara guna kepentingannya. Dari Panitia Lokal inilah nantinya diutus beberapa anggotanya untuk duduk dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ke Jakarta seperti Mr. Teuku Mohd. Hassan dan Dr. Amir.

6. Gyu Gun dan Heiho

Pembentukan pasukan-pasukan militer yang terdiri dari bangsa Indonesia di Sumatera Utara adalah **Heiho**. Pembentukan pasukan ini terjadi setelah Jepang mulai terdesak di Burma atau di daratan Asia. Untuk itulah mereka memanggil para pemuda-pemuda Indonesia un-

tuk turut serta dalam organisasi Kemiliteran. Heiho itu adalah pembantu tentara Jepang. Mereka sebenarnya dijadikan Jepang untuk menjadi pasukan yang berada langsung di bawah kesatuan kesatuan militer Jepang. Tugasnya mengangkat beban pasukan, mengawal dan pekerjaan yang bersifat membantu pasukan militer Jepang.

Karena kesempatan ini tidak pernah terjadi pada zaman penjajahan Belanda maka banyak sekali minat dari pemuda-pemuda Indonesia memasuki Heiho ini. Melalui kepala desa masing-masing pemuda-pemuda Indonesia itu mendaftarkan dirinya dan sesudah itu mereka diperiksa oleh team kesehatan dan tinggi badan tertentu dan setelah lulus dari saringan ini mereka mulai mendapat latihan-latihan kemiliteran.

Pada umumnya Hei Ho itu hanyalah untuk menjadi prajurit atau tamtama saja. Karena itu syaratnya cukup tammat sekolah dasar. Setelah mengalami latihan maka para Hei Ho itu mulai dikirim ke tempat tugas. Ada yang menjadi pembantu pengawal di lapangan udara, instalasi minyak seperti Pangkalan Berandan dan pengawal tempat tawanan Belanda di Pulo Brayon dan tempat-tempat lainnya.

Tidak jarang pula mereka dikirim ke daerah yang langsung berhadapan dengan sekutu di Burma, di Thailand, pulau Morotai. Hal ini dapat kita ketahui dengan adanya pemberitaan kemudian kepada sanak saudaranya kalau yang bersangkutan gugur di dalam pertempuran menghadapi sekutu. Sebagai tanda keluarganya mendapat surat penghargaan dan pada hari-hari besar Jepang kepada keluarganya diberikan hadiah-hadiah. Selain dari Hei Ho juga di daerah pantai Jepang juga mendidik pemuda-pemuda untuk membantu Jepang dalam pertahanan di lautan.

Di Labuhan Bilik Jepang melatih pula pemuda-pemuda untuk membantu pasukannya di lautan. Di sini mereka membentuk Kai In, yaitu pembantu pasukan lautnya. Tugas pasukan ini untuk melakukan perondaan lautan. Dengan menggunakan kapal-kapal kayu yang dibuat Jepang mereka melakukan patroli sampai-sampai ke pulau Andaman dan Nikobaren yang telah dikuasai Jepang. Karena itulah maka Labuhan Bilik kemudian menjadi tempat kegiatan pasukan TKR Laut semasa Republik Indonesia di samping Belawan.

Keadaan tentara Jepang yang semakin terdesak di segala lapangan dan gerakan ofensifnya yang telah berganti dengan defensif maka Jepang mulai pula mengadakan persiapan-persiapan di Sumatera Utara untuk membentuk suatu tentara pembela daerah ini. Pasukan ini ha-

ruslah terdiri dari penduduk setempat dan dapat bahu membahu dengan tentera Jepang. Atas dasar inilah maka di Sumatera tentera ke 25 mulai membentuk pula suatu pasukan baru yang terdiri dari pemuda Indonesia disebut **Gyu Gun**.

Pembentukan **Gyu Gun** ini dimulai pada bulan Nopember 1943. Berbeda dengan **Hei Ho** maka **Gyu Gun** merupakan suatu kesatuan yang pimpinan regunya dipimpin sendiri oleh bangsa Indonesia sedang **Hei Ho** suatu pasukan taktis yang langsung berada di bawah pimpinan Jepang. Setelah adanya penerimaan untuk **Gyu Gun** maka banyak di kalangan pemuda-pemuda, pelajar dan para pegawai mendaftarkan dirinya sebagai **Gyu Gun**.

Dengan adanya **Gyu Gun** ini lahirlah suatu idaman bagi pemuda Indonesia untuk menjadi seorang Perajurit sehingga kesempatan itu tidaklah disia-siakan. Pada kesempatan menjadi **Gyu Gun** ini tidak saja untuk menjadi tamtama tetapi juga diberikan kesempatan kepada pemuda pelajar yang telah mendapat pendidikan menengah untuk menjadi perwira. Pendidikan Perwira **Gyu Gun** di Sumatera Utara diadakan di Siborong-borong Tapanuli Utara. Di sini mereka mendapat latihan secara kemiliteran selama beberapa bulan dan dilatih oleh para instruktur Jepang. Tempat pendidikan untuk para tamtama terdapat pada tempat-tempat lain baik di Sumatera Timur di Medan maupun di Tapanuli di Sibolga. Di antara para perwira yang mendapat pendidikan di Siborong-borong itu antara lain :

“Dari Sumatera Timur ialah Achmad Tahir, Hopman Sitompul, R. Sucipto, Nazaruddin, Wiji Alfisah, Zein Hamid, TPR Sinaga, Wilson Pasaribu, Mahidin, Sihar Hutaauruk, Alwin Nurdin, M. Kasim, Djamin Gintings, Ricardo Siahaan, Nelang Sembiring, Martinus Lubis, Zainuddin Hasibuan, Boyke Nainggolan dan lain-lain yang seluruhnya berjumlah 40 orang. Dan yang dari Tapanuli : Kristian Raja Gukguk, Jansen Siahaan, Lucius Aruan, Hasanuddin Waruwu, Bongsu Pasaribu, Waldemar Siregar, Humahe Rambe, Johan Marpaung, Hamonangan Sihombing, Cornelius Raja Gukguk, Tahi Manik, Elbiker Situmeang, J. Simandjuntak, Tambatua Symbolon, Oloan Sarumpaet, Binsar Simangunsong, Bonaparte Siagian, Paima Sibagariang, Togarmuda Dalimunthe, S.M. Sinurat dan lain-lain”. 5

Walaupun **Gyu Gun** ini organisasi kemiliteran yang dibentuk oleh Jepang tetapi di dalamnya telah menyelip suatu jiwa dan semangat kebangsaan. Memang ini telah dipupuk oleh para tokoh-tokoh pemimpin kebangsaan di Sumatera Utara memang menurut strategi politik sengaja pemuda-pemuda itu diterjunkan ke dalam organisasi kemiliteran ini.

Tujuannya tidak lain ialah suatu persiapan kelak untuk menghadapi Jepang karena Jepang sendiri telah melakukan suatu tindakan-tindakan yang berada di luar peri kemanusiaan. Sebagai buktinya dapat kita lihat menjelang Jepang bertekuk lutut telah terjadi beberapa kali pemberontakan di Sumatera yang dipimpin oleh pasukan Gyu Gun.

“Pemberontakan pertama terjadi di Meredu (Aceh) dalam bulan Nopember 1944, dipimpin oleh Letnan Muda Teuku Abdul Hamid seorang perwira Gyu Gun yang baru berusia 20 tahun. Ia melarikan 2 peleton Gyu Gun ke Gunung tetapi kemudian terpaksa menyerah setelah Jepang menawan semua keluarganya dengan ancaman akan dibunuh semuanya jika ia tidak menyerah”. 6

Dari keterangan ini dapatlah kita melihat bahwa dalam tubuh perajurit Gyu Gun itu bukan bersemi semangat Bushido tetapi semangat cinta tanah air dan bangsanya. Kebencian terhadap Jepang ini dan kecintaan terhadap tanah air semakin membara setelah mereka mengalami latihan-latihan dari Jepang.

Penderitaan yang sangat melahirkan semangat untuk membela bangsanya dan tanah air mereka. Dari tokoh-tokoh mereka inilah lahir pemimpin TKR atau TNI di Sumatera Utara kemudian. Menjelang kekalahan Jepang itu di antara pasukan Gyu Gun telah ada suatu rencana untuk melakukan pemberontakan di Sumatera yang direncanakan di Pematang Siantar untuk Sumatera Timur, tetapi tidak terjadi.

Dengan adanya **Hei Ho**, Gyu Gun dan organisasi pemuda yang bersifat semi militer di Sumatera Timur dan Tapanuli sebagaimana telah diuraikan pada uraian sebelumnya maka jelaslah bahwa suatu dasar bagi pembentukan organisasi yang bersifat kemiliteran telah ada di Sumatera Utara dan terdiri dari bangsa Indonesia.

Mereka inilah yang kemudian menjadi tulang punggung dari lahirnya pasukan-pasukan bersenjata Republik Indonesia dalam mencaangkan Proklamasi Kemerdekaan di Sumatera Utara nantinya.

CATATAN :

1. Biro Sejarah Prima., **Medan Area Mengisi Proklamasi, Jilid—I**
Badan Musyawarah Pejuang Republik Indonesia, Medan, 1976, hal.43.
2. **I b i d**, hal. 31.
3. **Waspada**, 12, 13, September 1979, hal. 4.
4. Team Assistensi Kodam-II/Bukit Barisan, **Sejarah Perjuangan
Kodam—II/Bukit Barisan**, Dinas Sejarah Kodam—II/Bukit Barisan,
Medan, 1977, hal. 33.
5. **I b i d**, hal. 31.
6. **Op cit**, Biro Prima, hal. 64.

— 0 —

BAB III

KEADAAN DI DAERAH SESUDAH PROKLAMASI KEMERDEKAAN

A. SUMATERA UTARA PADA PERMULAAN PROKLAMASI

Peristiwa kekalahan Jepang terhadap Sekutu dalam Perang Dunia-II, tidak diketahui oleh masyarakat umum. Hal ini adalah karena segala komunikasi telah dikuasai Jepang sedemikian rupa, sehingga penduduk buta akan segala hal yang terjadi di sekitarnya. Hanyalah sego-
longan penduduk yang dapat mengetahui bagaimana situasi pada waktu itu setelah melihat gerak-gerik tentera Jepang itu. Kelihatan mereka yang dahulunya bersifat angkuh tetapi kemudian kelihatan lesu saja. Keadaan ini ternyata tidak dapat disembunyikan mereka karena kemudian melalui satu-satunya surat kabar pada waktu itu Soematera Baroe, yaitu lanjutan dari Soematera Simbun menyatakan keadaan telah damai dan perang telah usai. Apa dan bagaimana masalah tidak diketahui dengan jelas bagi rakyat. Rakyat bertanya-tanya dan tidak mengetahui ke mana untuk bertanya.

Sementara itu tentera Jepang memang telah menunjukkan situasi yang tidak dalam kesiap-siagaan. Alat-alat perlengkapan perajuritnya banyak pula yang dijual ke pasaran, seperti baju, mantel dan sebagainya.

Selanjutnya pasukan-pasukannya dikumpulkan pada daerah-daerah perkebunan seperti Kisaran, Dolok Ilir, Tebing Tinggi, Binjai dan lain-lain. Mungkin ini dilakukan sebagai tergesa-gesa yang diminta oleh Sekutu untuk menjaga perusahaan-perusahaan asing yang ada di Sumatera Timur. Di dalam suasana demikian inilah kemudian terdengar desas-desus yang mengatakan bahwa Indonesia telah Merdeka.

1. Berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di Sumatera Utara

Desas-desus mengenai kemerdekaan Indonesia ini sebenarnya mempunyai dasar kebenarannya tetapi karena ketakutan kepada Jepang maka siaran itu hanya menjadi desas-desus. Di Medan para markonis-markonis yang bertugas di kantor PTT, telah menangkap siaran dari Jakarta pada tanggal 19-8-1945 mengenai Proklamasi. Tetapi siaran tersebut tidak diteruskan kepada para pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia di Medan karena mereka masih ketakutan akan peranan **Kempe tai** Jepang. Berita ini hanya menimbulkan desas-desus di kalangan masyarakat bangsa Indonesia. Rakyat pada umumnya

tertanya-tanya pada dirinya sendiri dan tidak mengetahui ke mana mereka dapat menanyakan masalah tersebut.

Di dalam suasana tidak menentu ini atas inisiatif beberapa tokoh yang terkemuka di Medan seperti Marzuki Lubis, Abdul Razak, Sulaiman Effendi, Ismail Gani, Haji Asbiran Yacub, Jusuf Ganto dan lain-lainnya mengadakan pertemuan di rumah Abdul Xarim M.S.-Pertemuan itu diadakan pada tanggal 10 September 1945 untuk membahas situasi politik yang disebut **National Control**. Organisasi ini bertujuan untuk mencegah kembalinya penjajahan Belanda, dan menghimpun seluruh potensi bangsa Indonesia yang ada di Sumatera Timur. Sebagai pimpinan diangkat Xarim M.S. dan Nathar Zainuddin.

Mereka yang berkumpul pada waktu itu belum mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia telah terjadi. Walaupun para petugas PTT di Medan telah dapat menangkap siaran tersebut dari PTT Jakarta tetapi mereka tidak menyebar luaskan dan takut kepada Jepang sebagaimana telah diuraikan di atas.

Sementara itu pihak Belanda yang lebih banyak mengetahui situasi Indonesia melalui pemerintahan pelariannya di Melbourne telah bersiap-siap untuk kembali ke Indonesia. Mereka segera bertindak cepat untuk menguasai keadaan Indonesia. Melalui pesawat-pesawat udara mereka, telah disebarkan surat selebaran bahwa mereka akan kembali ke Indonesia.

Di dalam selebarannya itu mereka menjanjikan kedudukan-kedudukan yang semula kepada bekas-bekas para ambtenar dan raja-raja serta Sultan di Sumatera Timur. Kepada rakyat mereka menjanjikan hendak melaksanakan pidato radio Ratu Wilhelmina mengenai masa depan Indonesia ini dengan otonomi yang luas serta berada dalam lingkungan kerajaan Belanda.

Usaha-usaha Belanda ini kenyataannya termakan bagi segolongan para ambtenaar dan raja-raja yang ingin hidup mewah seperti zaman penjajahan dahulu. Mereka memimpikan zaman keemasan yang jaya. Untuk menjilat tuannya kembali berkuasa maka mereka pada tanggal 25 Agustus 1945 membentuk suatu badan yang disebut **Comite Van Ontvangst**. Badan ini merupakan suatu organisasi untuk menyambut Belanda. Sebagai ketua terpilih Sulthan Langkat dan Dr. Mansyur sebagai wakilnya.

Setelah badan ini terbentuk mulailah mereka mengunjungi kamp-kamp tawanan Belanda untuk menunjukkan tanda turut solider kepada keadaan para tawanan itu, sambil membawa oleh-oleh makanan.

Karena pada waktu itu keadaan para tawanan sangat parah sekali. Tindakan mereka ini tidak menyenangkan bagi sebahagian besar rakyat, karena rakyat mengharapkan suatu kemerdekaan yang penuh dan tidak ingin kembalinya Belanda berkuasa. Inilah sebenarnya sebagai suatu permulaan kecurigaan rakyat kepada golongan raja-raja dan Sulthan di Sumatera Timur.

Di dalam suasana yang demikian ini pula kemudian telah berada di Medan seorang Belanda yang bernama Brondgeest berpangkat Letnan dari hutan-hutan sekitar Besitang. Tugas Brondgeest selain untuk melihat keadaan tawanan perang, juga untuk mengadakan persiapan-persiapan bagi pendaratan tentara Sekutu dan pemulihan kekuasaan Belanda. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 31 Agustus 1945.

Brondgeest memang dari pasukan para Sekutu yang didaratkan jauh sebelum Jepang mendarat di pedalaman Sumatera Timur. Tugas mula-mula adalah sebagai perintis bagi penyerbuan tentara Sekutu di Sumatera dan Malaya.

Setelah Brondgeest tiba di Medan maka mulai terjadi kasak-kusuk antara orang-orang yang ingin kembalinya Belanda ke Medan. Hasil pertemuan antara Brondgeest dengan mereka itu menarik kesimpulan bahwa kekuasaan Belanda harus segera dipulihkan untuk mengatasi keadaan. Demikian pula alat-alat kekuasaan Belanda harus segera ada, agar jangan timbul hal-hal yang tidak diinginkan Belanda.

Berdasarkan pemikiran inilah maka pada tanggal 14 September diterjunkan pasukan kecil Belanda yang dipimpin oleh Westerling, yaitu seorang yang terkenal dalam pembunuhan masal di Sulawesi Selatan. Pasukan ini mulai mempersenjatai para tawanan-tawanan perang untuk dijadikan alat bagi menegakkan kekuasaan mereka. Untuk memulai penguasaan mereka itu terjadilah intimidasi dan perang urat syaraf. Mereka dengan sengaja menyiarkan bahwa mereka yang bekerjasama dengan Jepang akan mendapat ganjaran-ganjaran. Karena intimidasi ini banyak para pemimpin bangsa Indonesia menyingkir dari kota-kota, malahan ada yang menjadi putus asa. Dr. Rooskandar salah seorang pemimpin yang terkemuka dari bangsa Indonesia di Pematangsiantar bunuh diri terhadap ancaman Belanda itu.

Dengan situasi seperti ini maka tidak mengherankan bahwa para utusan yang datang dari Jawa seperti Dr. Amir dan Mr. T.M. Hassan tidak berani menyatakan dan menyampaikan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mereka mula-mula bungkem saja, dan menanti saat-saat yang baik, dan di antara mereka seperti Dr. Amir ragu-ragu bertindak.

Di dalam suasana yang ragu-ragu seperti demikian para pemuda Indonesia di kota Medan telah mendapat kepastian tentang adanya Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Sukarno-Hatta di Jakarta.

Berita-berita ini tentu diperoleh dari daerah lain seperti Sumatera Barat yang lebih dahulu berani bertindak. Dengan adanya kebenaran berita itu maka mulailah para pemuda melakukan tindakan-tindakan untuk melaksanakan isi proklamasi itu.

Seorang tokoh pemuda yang mengetahui kebenaran berita itu, yaitu Abdul Manan, segera mengambil prakarsa untuk membentuk sebuah organisasi pemuda guna melaksanakan proklamasi. Dengan beberapa tokoh pemuda lainnya dibentuklah Badan Kebaktian Pemuda Indonesia pada tanggal 18 September 1945. Sebagai ketua Abdul Manan, Zain Hamid, Syamsudin dan banyak lagi yang lain. Kantornya tepat di Jalan Surabaya Nomor 107 (Jalan Kanton) Medan. Selain tokoh pemuda tersebut, juga Dr. Pirngadi telah menerima telegram pada tanggal 15 September 1945 dari Dr. O.K. Gani di Palembang tentang kepastian Kemerdekaan Indonesia itu. Dr. Pirngadi kemudian menyampaikan pula kepada Abdul Xarim M.S. Melalui Abdul Xarim M.S. maka para pemuda itu telah mendapat kepastian tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia dilahirkan. Seterusnya baiklah kita melihat bagaimana aktivitas kedua utusan dari Jakarta itu. Saat yang diharapkan oleh kedua tokoh yang datang dari Jakarta tiba, karena keadaan sudah matang untuk menyampaikan berita proklamasi kepada tokoh-tokoh masyarakat di Medan. Pada tanggal 3 September Mr. T.M.Hasan dan Dr. M. Amir mengundang tokoh-tokoh yang dianggap pemimpin rakyat untuk merealisasi proklamasi kemerdekaan dan membentuk Komite Nasional Indonesia (KNI) di daerah ini. Di antara tokoh-tokoh yang diharapkan seperti Dr. Mansyoer dan Dr. Raja Saudin dan banyak lagi yang lain. Ternyata yang diundang itu kebanyakan para feodal dan bekas-bekas *ambtenaar* yang telah membentuk *Comite van Ontvangst*. Mereka ini menolak gagasan tersebut, sedang tokoh-tokoh lain banyak yang tidak hadir karena tidak ada di Medan. Kebanyakan tokoh partai politik telah menyingkir keluar kota karena desas-desus yang mengatakan bahwa Belanda akan menangkap mereka. Keadaan tersebut menyebabkan usaha untuk merealisasi Proklamasi menjadi terhenti, dan Dr. Amir kembali ke Tanjung Pura bertugas sebagai dokter di rumah sakit di sana.

Pada waktu-waktu tersebut suasana di Medan tidak menentu sedang wakil-wakil Sekutu dan Belanda telah berada pula di Medan. Wa-

kil Belanda yang dipimpin Brondgeest berhasil untuk mengadakan intimidasi sehingga banyak tokoh terkemuka di Medan yang percaya kepada Belanda. Semangat perjuangan di kota Medan menjadi mereda dan kedua tokoh yang dipercayakan untuk merealisasi kemerdekaan di Sumatera Utara menjadi patah semangat.

Sementara itu Abdul Xarim M.S. yang mengetahui kedatangan kedua utusan Bung Karno datang berkunjung ke tempat kediaman Mr. T. Mohd. Hassan. Kunjungan ini bertujuan menanyakan situasi terakhir mengenai Tanah Air. Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Mr. T. Mohd. Hassan mengajak Xarim M.S. dan Mohd. Said untuk berkunjung ke tempat kediaman Dr. Amir ke Tanjung Pura. Di Tanjung Pura kunjungan tersebut juga tidak membicarakan masalah proklamasi itu, mungkin Dr. Amir telah tidak percaya akan proklamasi itu sendiri, jadi pertemuan yang terjadi juga tidak membahas masalah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Karena keadaan dan tugas yang dibebankan kepada Mr. Mohd. Hassan tidak berhasil, maka sekali lagi diusahakannya untuk mengumpulkan para pemuka-pemuka di Medan.

Pada tanggal 17 September Mr. T. Mohd. Hassan mengundang para tokoh masyarakat di gedung Tsyu Sangikai. Pada pertemuan ini juga mayoritas golongan ambtenaar dan tokoh bangsawan dan hanya sedikit pemuka dari kaum politik. Sekali lagi harapan Mr. T. Mohd. Hassan untuk merealisasi kemerdekaan Indonesia di Medan tidak mendapat sambutan. Hanya segolongan tokoh politik saja yang dapat menyetujuinya. Putusan yang diambil hanya membentuk suatu Panitia Kebangsaan. Berbeda dengan di Sumatera Timur, misi Mr. T. Mohd. Hassan di Tapanuli berhasil baik.

Pada tanggal 23 Agustus 1945 Mr. T. Mohd. Hassan dan Dr. Amir dalam perjalanan pulang ke Medan, dapat menginstruksikan kepada Dr. F.L. Tobing untuk merealisasi proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Tapanuli.

Melalui jalan yang berliku-liku kemudian pada tanggal 29 Agustus 1945 bertepatan dengan Idul Fitri oleh Syaiful Alamsyah dinyatakan bahwa Indonesia telah merdeka. Segera setelah peristiwa itu realisasi proklamasi kemerdekaan berjalan dengan baik di Tapanuli. Kegagalan-kegagalan Mr. Teuku Mohd. Hassan di Sumatera Timur dengan missinya itu menyebabkan keadaan di Sumatera Timur menjadi tidak menentu. Rakyat gelisah karena pada daerah-daerah lain ternyata telah terlaksana realisasi proklamasi tersebut.

Mungkin karena lambannya proklamasi di realisasi di Sumatera Timur, maka Dr. A.K. Gani seperti yang telah dinyatakan mengirim telegram kepada Dr. Pirngadi sebagai salah seorang tokoh Nasional yang terkemuka di Medan. Dengan adanya telegram ini maka berita tentang kemerdekaan Indonesia bukan rahasia bagi sekelompok orang saja tetapi telah menjadi rahasia umum. Karena itulah maka pada tanggal 17 September 1945 oleh Mr. Teuku Mohd. Hassan diadakan pertemuan dengan pemuka masyarakat di Medan yang kembali gagal, karena Belanda telah berhasil melakukan intimidasi kepada segolongan tokoh-tokoh di Medan. Sehingga mereka lebih percaya kepada Belanda. Ini terbukti dengan lahirnya *Comite Van Ontvangst*. Sebagaimana telah diuraikan yang berhasil dibentuk hanya "Panitia Kebangsaan".

Pembentukan panitia ini sebenarnya untuk mematangkan suasana bagi pelaksanaan dari proklamasi 17 Agustus 1945 di Medan.

2. Pelaksanaan Proklamasi di Sumatera Utara

a. Peranan pemuda dalam merealisasi proklamasi

Kegagalan rapat yang diadakan pada tanggal 17 September 1945 itu, menerbitkan keadaan lain di luar sidang kemudian. Para pemuda yang telah mendengar berita Proklamasi itu sekarang seakan-akan tidak sabar lagi untuk bertindak. Para tokoh pemuda itu sebahagian besar berasal dari berbagai kelompok seperti bekas-bekas *Heiho*, *Giu Gun* dan lain-lain yang ingin agar kemerdekaan Indonesia itu segera direalisasi di Sumatera Utara.

Di antara mereka itu ialah Achmad Thahir, Abdul Razak, Sucipto mendatangi Xarim M.S. dan mendesak agar tokoh-tokoh politik segera mengambil tindakan yang positif untuk melaksanakan isi proklamasi di Sumatera Timur.

Hasil dialog yang diadakan itu akhirnya memberikan suatu penjelasan tentang kenyataan-kenyataan sebenarnya tentang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang telah disiarkan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Untuk lebih meyakinkan dan apa yang harus dilakukan maka para pemuda itu mengutus lima orang ke Tanjung Pura menemui Dr. Amir, utusan itu terdiri dari pemuda-pemuda Abdul Razak, Burhanuddin, Karim, Johan dan Ruslan Kesuma. Pertemuan dengan Dr. Amir menimbulkan suatu jaminan bagi para pemuda untuk melanjutkan pelaksanaan isi proklamasi itu di Sumatera Timur. Realisasi proklamasi itu tidak dapat ditahan-tahan lagi. Untuk inilah para pemuda melakukan

suatu tindakan tegas dengan segera. Jadi sebagai pelopor dalam hal ini adalah para pemuda-pemuda.

b. Rapat di Jalan Istana 17, Fuku Dori 6 dan di Jalan Ampelas

Jalan Istana 17 atau Gedung Juang 1945 dan Fuku Dori 6, atau tempat hotel Dirga Surya sekarang mempunyai arti yang penting sekali dalam sejarah perjuangan kemerdekaan di Sumatera Utara. Tempat ini dapat diumpamakan sebagai suatu titik permulaan dari perjuangan kemerdekaan di Sumatera Utara, atas inisiatip pemuda Achmad Thahir, B.H. Hutajulu, Abdul Razak pada tanggal 21 September diadakan rapat di Jalan Istana 17 (Gedung Pemuda).

Pada rapat ini diundang segala kelompok organisasi pemuda dari segala kelompok. Tujuan rapat ini tiada lain untuk merealisasi Proklamasi 17 Agustus 1945 di Sumatera Utara, yang telah menjadi beban bagi setiap pemuda Indonesia untuk melaksanakan hal tersebut. Karena itu gedung pemuda atau sekarang menjadi gedung Juang 1945 itu mempunyai arti historis dalam perjuangan di Sumatera Utara.

Rapat yang berlangsung di Jalan Istana 17 itu ternyata tidak dapat berlangsung karena larangan yang dilakukan Jepang pada waktu itu. Walaupun demikian para pemuda tidak kehilangan akal. Mereka segera memindahkan tempat rapat itu ke Jalan Imam Bonjol atau waktu itu disebut Fuku Dori 6 di mana di bekas bangunan itu telah berdiri sekarang hotel Dirga Surya. Di gedung ini pada waktu itu digunakan sebagai asrama pemuda. Jadi hal tersebut tentu tidak dicurigai Jepang karena memang biasa di tempat ini banyak pemuda yang berkumpul. Untuk pindah ke tempat ini pun harus terpisah-pisah dalam pengertian tidak boleh berbondong-bondong. Rapat pun dimulai tepat pada waktu makan siang. Semuanya ini dilakukan untuk mengetahui Kempetai Jepang yang masih berfungsi pada masa itu.

Pada jam 13.30 tepat makan siang rapat dimulai dengan acara makan langsung di mana setiap orang menghadapi piring kaleng. Sikap yang demikian dilakukan untuk mengelabui kaki tangan Jepang seakan-akan mereka semua akan melakukan makan siang. Di luar gedung diawasi pula oleh beberapa pemuda yang berjaga-jaga di luar. Dengan taktik dan cara ini dapatlah berlangsung rapat itu dengan baik.

Rapat itu dihadiri oleh sebahagian besar wakil-wakil pemuda yang berasal dari berbagai-bagai kelompok, terutama berasal dari bekas-bekas tentara Jepang. Mereka itu hadir sebanyak 53 orang. Di antaranya adalah Amir Bachrum Nasution, Achmad Thahir.

Rapat dibuka oleh Amir Bachrum Nasution sebagai kepala asrama. Kemudian sebagai pembicara I ialah Achmad Thahir (sekarang Letnan Jenderal TNI Achmad Thahir). Ia mengemukakan bagaimana sikap kita dengan kekalahan Jepang pada waktu itu. Mula-mula masalah proklamasi tidak disinggung, tetapi setelah pembicara Abdul Razak mengemukakan hal itu maka masalah proklamasi menjadi pokok utama yang dibicarakan.

Buah pikiran Abdul Razak ini kemudian diterima secara aklamasi oleh hadirin semua. Semua mendukung proklamasi dan pembentukan negara Republik Indonesia. Untuk membela Republik Indonesia itu maka mereka membentuk Barisan Pemuda Indonesia dengan rencana kerja adalah melaksanakan realisasi dari proklamasi 17 Agustus 1945.

Di dalam rapat ini juga kemudian diambil suatu ketentuan-ketentuan setelah diadakan sidang-sidang lanjutan. Hasil sidang-sidang itu kemudian memutuskan Sugondo Kartoprojo sebagai ketua umum dan Achmad Thahir menjadi ketua I dalam Barisan Pemuda Indonesia. Karena sesuatu hal kemudian Sugondo Kartoprojo meminta agar ia dibebaskan dari tugasnya sebagai ketua umum. Hasil yang nyata dari putusan rapat Fuku Dori 6 itu ialah :

1. Melaksanakan dan merealisasi proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Sumatera Timur.
2. Membentuk Barisan Pemuda Indonesia.

Menurut Sejarah Perjuangan Kodam II Bukit Barisan susunan pengurus Barisan Pemuda Indonesia itu adalah sebagai berikut :

Ketua Umum	: Sugondo Kartoprojo, Sesepeh Taman Siswa
Ketua I	: A. Thahir, mewakili Giu Gun/Heiho.
Ketua II	: Malik Munir, mewakili Kepanduan H.W.
Ketua III	: Irawan Pandu.
Sekretaris Umum	: M. K. Djusni
Sekretaris I	: Maji
Sekretaris II	: Bachrum Djamil, unsur agama.
Kuangan	: A. Manan, mewakili Badan Kebaktian Pemuda Indonesia (BAKPI).
Penerangan	: B. H. Hutajulu, pemuda BOMPA.
Propoganda	: Aminuddin Nazir, Pemuda Nelayan.
Para pembantu	: Nip Xarim, Syamsuddin Manan, Abdul Razak, Abdullah Nasution, Rosman Harahap, Anas Tanjung dan Effendi Harahap.

Untuk merealisasi proklamasi itu rapat setuju agar berita proklamasi disiarkan secara terang-terangan dan utusan pemerintah Republik Indonesia yaitu Dr. T. Mohd. Hassan diundang pula. Rencana pengumuman proklamasi itu adalah tanggal 28 September tetapi baru dilakukan pada tanggal 30 September bertempat di gedung Taman Siswa Jalan Ampelas Medan.

Di dalam rapat umum secara terbatas inilah Mr. T. Mohd. Hasan mengumandangkan bahwa bangsa Indonesia sudah merdeka dan negara Republik Indonesia didirikan oleh bangsa Indonesia sendiri. Di dalam rapat ini mula-mula keadaan hening dan sepi sebab sebahagian besar rakyat ketakutan karena intimidasi Belanda yang telah mempunyai perwakilan mereka di Medan, di samping Jepang yang masih berkuasa secara *de facto*.

Di dalam keadaan seperti inilah berpidato kemudian Karim M.S. yang dapat membakar semangat rakyat untuk segera bergerak, mendukung tugas-tugas berat yang lahir setelah bangsa Indonesia merdeka. Pidatonya ini mendapat sambutan dari para hadirin, sehingga Jalan Ampelas ini seakan-akan tempat lahirnya semangat juang bagi seluruh Sumatera Utara.

Rapat ini berakhir dengan mengambil sikap untuk menyusun organisasi-organisasi secara meluas ke seluruh daerah, dan meluncurkan aksi rakyat guna realisasi kemerdekaan Indonesia. Kepada utusan-utusan dari daerah di luar kota Medan yang hadir diberi tugas untuk membentuk Barisan Pemuda Indonesia di daerah mereka.

Berdasarkan garis yang ditetapkan oleh BPI ini maka di Kabanjahe pada tanggal 3 Oktober 1945 terbentuk BPI di bawah pimpinan Matang Sitepu dan Payung Bangun. Barisan bersenjataanya dipimpin oleh Djamin Gintings, seorang bekas Giu Gun yang berpangkat Giu Syoi (Letnan Muda). Di Brastagi terbentuk pula BPI di bawah pimpinan Tama Ginting pada tanggal yang bersamaan.

Di Pematangsiantar pada tanggal 4 Oktober oleh Sumarno Hasi-buan dan G. Hutapea terbentuk pula BPI dan pasukan bersenjataanya dipimpin oleh Ricardo Siahaan, yang juga bekas perwira Giu Gun. Selain BPI juga berkembang ke daerah-daerah Badan Kebaktian Pemuda Indonesia (BKPI).

— Di Pematangsiantar BKPI dipimpin oleh Abdul Aziz dan Burhanuddin yang didirikan pada tanggal 29 September 1945. Jadi sejak peristiwa rapat jalan Ampelas penyiaran dan penyebaran berita prokla-

masi telah meluas ke seluruh penjuru di Sumatera Timur.

c. Realisasi proklamasi di Tapanuli

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa Mr. T. Mohd. Hasan dan Dr. M. Amir kembali dari Jawa melalui jalan darat. Pada tanggal 28 Agustus kedua utusan dari Jakarta itu sampai di Tarutung. Kedua utusan itu menemui Dr. F.L. Tobing dan menginstruksikan agar di daerah Tapanuli segera disiarkan berita Proklamasi dan pembentukan KNI. Kepada Dr. F.L. Tobing diberikan kuasa sepenuhnya untuk pembentukan pemerintahan Republik Indonesia di Tapanuli.

Sementara itu dalam waktu bersamaan Syaiful Alamsyah seorang tokoh politik di Sibolga menerima pula telegram dari Dr. A.K. Gani yang menyatakan bahwa Indonesia telah merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi itu telah diucapkan oleh Sukarno – Hatta atas nama bangsa Indonesia. Kemudian Hadely Hasibuan yang diutus oleh Dr. F.L. Tobing juga menyampaikan berita kemerdekaan Indonesia kepada Syariful Alamsyah di Sibolga.

Untuk merealisasi kemerdekaan Indonesia itu maka Hadely Hasibuan berangkat ke Bukit Tinggi untuk menemui tokoh-tokoh seperti Mohd. Syafei dan Adinegoro. Bukit Tinggi pada waktu itu adalah ibu kota propinsi Sumatera sejak zaman Jepang dan di situ pula bermukim tokoh-tokoh terkemuka dari kalangan bangsa Indonesia.

Berita yang diperoleh oleh Syariful Alamsyah segera disampaikan kepada tokoh-tokoh terkemuka di Sibolga. Hasil pembicaraan dengan tokoh-tokoh itu antara lain ialah akan diumumkan kemerdekaan Indonesia itu esok hari bertepatan dengan Sholat Idul Fitri di lapangan Simare-mare.

Setelah selesai sholat Idul Fitri Syariful Alamsyah segera menyatakan dengan suara yang lantang bahwa Indonesia telah merdeka sejak tanggal 17 Agustus 1945 dan Sukarno–Hatta telah memproklamákannya. Karena itu mulai saat ini diperintahkan agar seluruh rakyat di Sibolga dan juga di Tapanuli umumnya untuk mengibarkan bendera Merah Putih. Berita ini harap diteruskan kepada seluruh penduduk yang belum mengetahuinya.

Dengan berita ini timbul perasaan harga diri dari penduduk Sibolga, dan semangat juang untuk membela kemerdekaan yang telah diproklamasikan itu. Suasana kota Sibolga waktu itu menjadi tegang sehingga Jepang berusaha menangkap Syariful Alamsyah tetapi ia dapat menghindari dari bahaya itu. Segera setelah peristiwa tersebut mulai

terjadi gerakan-gerakan untuk membentuk pemerintahan Republik Indonesia di Tapanuli.

3. Pengibaran Bendera Sang Saka Merah Putih

Peristiwa jalan Istana, Fuku Dori 6 dan Jalan Ampelas telah mulai melahirkan tekad masyarakat di kota Medan untuk meneruskan perjuangan melaksanakan proklamasi kemerdekaan di Medan dan Sumatera Utara umumnya.

Massa masyarakat yang telah sadar ini terus digembleng agar semangat kemerdekaan dapat terus berkobar-kobar. Untuk mencapai tujuan tersebut dan pernyataan sebagai suatu bangsa yang telah merdeka maka diadakanlah rapat umum di Lapangan Fukuraido (sekarang Lapangan Merdeka) pada tanggal 6 Oktober 1945.

Lapangan ini terletak sangat strategis di tengah-tengah kota Medan dan dekat pula dengan stasion kereta api. Jadi memudahkan bagi pengangkutan bagi massa yang datang dari daerah sekitarnya. Tujuan rapat umum itu tiada lain untuk meresmikan berkibarnya sang Saka Merah Putih sebagai lambang negara Republik Indonesia di Sumatera Timur. Pada upacara pengibaran bendera ini jumlah pengunjung belum banyak, tetapi sangat khidmat sekali. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya mengiringi penaikan bendera itu.

Dalam suasana seperti ini banyak yang terharu dan meneteskan air mata karena rasa sedih dan bahagia bercampur di dalam sanubari masing-masing yang hadir. Pengibaran bendera ini menjadi satu pertanda bagi penduduk, bahwa penjajahan telah berakhir dan pemerintahan Republik Indonesia telah berdiri di Medan.

Para hadirin setelah pengibaran itu secara serentak mengucapkan salam yang terkenal dengan pekikan merdeka. Peristiwa pengibaran bendera ini diikuti oleh kota-kota lain di Sumatera Timur dalam waktu yang tidak jauh berbeda.

Sejak peristiwa itu tidak hanya di rumah-rumah berkibar bendera merah putih, tetapi juga setiap orang menggunakan di adanya emblem atau lambang merah putih. Pekikan merdeka merupakan salam nasional bagi setiap orang yang bertemu satu dengan yang lain.

Setelah peristiwa Fukuraido itu maka pada tanggal 9 Oktober 1945 diadakan pula pawai raksasa di kota Medan. Tujuan pawai ini merupakan suatu gambaran kebulatan rakyat untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Selain dari itu untuk menunjukkan kepada dunia luar bahwa bangsa Indonesia telah siap menghadapi segala

kemungkinan, karena di Medan waktu itu telah ada pelopor tentera Sekutu dan wartawan-wartawan asing.

Barisan pawai itu diikuti oleh ratusan ribu rakyat yang berasal dari kota Medan dan kampung-kampung sekitarnya. Pawai dimulai dari ujung jalan Raja (Singamangaraja) yang merupakan batas kota Medan waktu itu, menuju Lapangan Fukuraido dengan barisan yang panjangnya mencapai beberapa kilo meter.

Dalam pawai itu juga dibawa spanduk-spanduk yang isinya menyatakan dukungan atas proklamasi kemerdekaan yang telah diumumkan dan tidak menghendaki setiap penjajahan.

Sesampainya di Lapangan Fukuraido seluruh yang hadir di bawah pimpinan Pak Sugondo semua mengucapkan ikrar atau janji di bawah kibaran sang saka Merah Putih, mereka bersedia untuk memberikan darma baktinya untuk mempertahankan kedaulatan bangsa Indonesia.

Pada waktu itu pula lapangan Fukuraido diganti namanya dengan Lapangan Merdeka, atas keputusan Wali Kota Mr. Luat Siregar. Rapat berakhir pada jam 16.00 dan masing-masing barisan kembali ke tempat asalnya dengan berbaris dan tetap membawa spanduk-spanduk.

Pengibaran bendera sang saka Merah Putih serentak pula berkibar di kota-kota lainnya di Sumatera Timur setelah peristiwa tersebut dan setelah BPI terbentuk.

Di Tapanuli seperti telah diuraikan di atas bahwa pengibaran bendera sang saka Merah Putih lebih dahulu dilakukan dari Sumatera Timur. Pengumuman kemerdekaan Indonesia yang dilakukan oleh Syariful Alamsyah setelah Hari Raya Idul Fitri, secara serentak pula lahir instruksi pengibaran bendera Merah Putih.

Sejak itu seluruh daerah di Tapanuli telah dikibarkan bendera Merah Putih. Karena instruksi itulah maka Jepang mencari-cari Syariful Alamsyah yang dianggap Jepang mengacau ketentraman umum. Sikap Jepang ini terjadi karena mereka takut kepada tugas yang diberikan Sekutu kepada mereka agar mereka jangan mengadakan suatu perubahan-perubahan.

Dengan pengibaran bendera Merah Putih ini pernyataan kemerdekaan Indonesia telah diketahui secara merata oleh penduduk di Sumatera Utara, malahan setiap orang yang telah dewasa pada baju, topi terpampang lambang merah putih. Semuanya ini terjadi secara serentak tanpa diperintah karena rakyat sadar dan mereka telah muak dengan penjajahan.

4. Pembentukan Komite Nasional Indonesia – Daerah

Rapat umum jalan Ampelas yaitu sekolah Taman Siswa mempunyai arti yang penting bagi lahirnya pemerintahan Republik Indonesia di Sumatera Timur. Barisan Pemuda Indonesia sejak itu meningkatkan kegiatan-kegiatannya dengan membuat pamflet-pamflet dan coret-coret di dinding berupa tulisan-tulisan yang menentang penjajahan. Misalnya “We want Freedom, Merdeka atau Mati”. Perjuangan meminta pengorbanan harta atau nyawa. Banyak lagi semboyan-semboyan yang lain. Tulisan-tulisan seperti ini tidak hanya di kota Medan saja, tetapi meluas ke seluruh penjuru di Sumatera Timur.

Demi untuk melaksanakan suatu pemerintahan yang baik dan untuk mengelola kemerdekaan ini maka perlulah suatu pemerintahan yang teratur. Lembaga-lembaga pemerintahan harus disusun, terutama sekali lembaga yang urgent seperti KNI daerah. Komite Nasional Indonesia Daerah harus ada untuk mendampingi pemerintahan daerah. KNI daerah bertugas sebagai DPR daerah sehingga roda pemerintahan dapat berjalan.

Mr. T. Mohd. Hasan yang telah diangkat sebagai Gubernur Propinsi Sumatera mulai menyusun pemerintahan daerah di Sumatera. Dengan surat putusan Nomor IX tanggal 3 Oktober 1945 maka diangkat para residen di Sumatera. Untuk Sumatera Timur diangkat Mr. Mohd. Jusuf, Dr. F.L. Tobing sebagai residen Tapanuli. Demikian pula diangkat pegawai tinggi sebagai pembantu Gubernur yang berkedudukan di Medan. Jadi propinsi Sumatera ibu kotanya kembali di Medan.

Bersamaan dengan terbentuknya susunan pemerintahan Republik Indonesia di Sumatera, maka Komite Nasional Indonesia Daerah dibentuk pula. Untuk Sumatera Timur KNI daerah diketuai oleh Xarim M.S. dan para anggota-anggotanya terdiri dari para pemuka-pemuka dari segala lapisan masyarakat. Tidak saja KNI daerah yang bertingkat keresidenan, juga setiap kabupaten terbentuk pula KNI daerah kabupaten.

Di daerah Tapanuli KNI daerah keresidenan diketuai oleh Sutan Naga dengan anggota-anggotanya Sutan Naga, Sutan Kumala Pontas, Mr. Silitonga, Mr. Fufinus L. Tobing dan sebagainya.

Dengan adanya KNI daerah ini maka roda pemerintahan di daerah dapat berjalan dengan lebih lancar, karena setiap pimpinan daerah dibantu oleh KNI daerah dalam setiap tindakan-tindakannya. Segala peraturan-peraturan KNI dijadikan pedoman dalam pelaksanaan jalannya pemerintahan di daerah-daerah.

B. PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA DI SUMATERA UTARA

1. Lahirnya Propinsi Sumatera

Sesuai dengan telegram tanggal 29 September 1945 yang datang dari Jakarta, maka Mr. Teuku Mohd. Hasan ditetapkan menjadi Gubernur untuk Sumatera. Tempat kedudukan ibu kota propinsi itu adalah Medan. Pengangkatan tersebut dilakukan atas pertimbangan bahwa Mr. Teuku Mohd. Hasan telah lama berkecimpung sebagai pegawai tinggi di kantor Gubernur sejak zaman penjajahan Belanda dan Jepang. Telegram dari Jakarta itu diterima pada tanggal 2 Oktober 1945. Dengan adanya seorang Gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat, maka mulailah tugas roda pemerintahan Republik Indonesia berlangsung pada keesokan harinya.

Kantor Gubernur Republik Indonesia Sumatera ditetapkan di Jalan Istana No. 15 (Jalan Pemuda 15). Mulailah dibentuk petugas-petugas yang memimpin wilayah-wilayah keresidenan dan kota-kota. Dengan keputusan No. 1-X-3 Oktober ditetapkan para residen-residen sebagai berikut :

- | | |
|--------------------|-------------------------------------|
| 1. Aceh | — Teuku Nyak Arief sebagai Residen |
| 2. Sumatera Timur | — Mr. Mohd. Yusuf sebagai Residen |
| 3. Tapanuli | — Dr. F.L. Tobing sebagai Residen |
| 4. Sumatera Barat | — Mohd. Syafei sebagai Residen |
| 5. Bengkulu | — Ir. Indra Tjahaya sebagai Residen |
| 6. Jambi | — Dr. A. Syagaf sebagai Residen |
| 7. Palembang | — Dr. A.K. Gani sebagai Residen |
| 8. Lampung | — Mr. A. Abbas sebagai Residen |
| 9. Bangka Belitung | — Mas Syarief sebagai Residen |

Jadi pulau Sumatera terbagi atas delapan keresidenan dan di samping itu diangkat pula para wali kota untuk kota-kota besar yaitu :

- | | |
|-----------------|-----------------------------|
| 1. Medan | — Walikota Mr. Luat Siregar |
| 2. Bukit Tinggi | — Walikota Darnawi |
| 3. Padang | — Walikota Dr. Hakim |
| 4. Palembang | — Walikota Ir. Ibrahim. |

Bersama dengan pengangkatan para residen dan walikota maka KNI setiap keresidenan juga dibentuk dan mulai aktif. Dengan adanya surat putusan ini maka mulailah terjadi pengambil alihan kekuasaan dari tangan Jepang kepada pemerintahan Republik Indonesia.

Di dalam pelaksanaan pengambil alihan kekuasaan ini telah terja-

di suatu pembahagian pekerjaan antara golongan tua dengan golongan muda. Pembahagian ini mungkin lahir secara tidak sengaja atau berte-patan sekali. Golongan tua diberikan kekuasaan untuk menduduki ja-batan dalam pemerintahan sedang golongan muda dijadikan sebagai alat untuk mendobrak segala kacamatan-kacamatan yang terjadi. Hal ini kelihatan dalam penguraian selanjutnya. Kerja sama ini sangat har-monis sekali sehingga sangat menguntungkan dalam perjuangan di dae-rah ini.

Setelah organ pemerintahan Republik Indonesia ada, maka mulai-lah direncanakan pengambil alihan kekuasaan dari tangan Jepang. Un-tuk ini telah siap diadakan suatu rencana secara menyeluruh.

2. Sikap Pasukan Jepang

Untuk mengetahui secara umum sikap pasukan Jepang di Suma-tera dengan sendirinya harus diketahui sikap Tentara ke-25 Jepang yang berpusat di Bukit Tinggi. Pimpinan Tentara ke-25 Jepang ter-hadap gerakan kemerdekaan bangsa Indonesia pada umumnya bersa-habat. Hal ini dialami sendiri oleh Mr. T. Mohd. Hasan dan Dr. M. Amir ketika kedua utusan dari pusat itu bertemu dengan Sai ko Saki-kan atau panglima tentera Jepang di Sumatera Letnan Jenderal Mori-take Tanab dan gubernur (Gunseikan) Mayor Jenderal Shimura di Bukit Tinggi.

Dalam pertemuan tersebut malah kedua tokoh Jepang itu mem-berikan nasihat-nasihat yang penting guna keberhasilan revolusi bang-sa Indonesia. Dari dialog tersebut tentera Jepang hanya dapat bersikap pasif dalam menghadapi perjuangan bangsa Indonesia. Sebaliknya me-reka oleh Sekutu dibebankan untuk mempertahankan keadaan mere-ka tetap sebagaimana biasa dan menjaga keamanan tanpa merobah situasi.

Memang keadaan tentara Jepang sebenarnya terjepit di antara dua kekuatan yaitu arus revolusi kemerdekaan dan tentara Sekutu yang hendak mengembalikan kekuasaan penjajahan Belanda di Indonesia. Maka dalam suasana seperti ini Jepang pada umumnya bersikap netral demi untuk mencegah pembalasan yang dilakukan Sekutu kelak. Sikap netral seperti ini pada umumnya merupakan sikap resmi dari Tentara ke-25, di Sumatera. Atas dasar inilah maka tentera atau penguasa Je-pang tidak bersedia menyerahkan kekuasaan secara terang-terangan kepada pemerintah Republik Indonesia.

Sikap Jepang ini tidak diketahui oleh masyarakat pada umumnya.

Sebaliknya rakyat telah berkobar-kobar semangatnya dibakar oleh api kemerdekaan tidak dapat menerima keadaan yang demikian itu. Inilah yang menyebabkan timbul beberapa insiden-insiden pada beberapa daerah di Sumatera Utara yang kadangkala melahirkan pertempuran sengit antara pemuda Indonesia dengan Jepang. Proses pengambilan alih kekuasaan dari tangan Jepang ada yang lancar tetapi ada pula terjadi melalui berbagai-bagai cara dan tak tik pula.

Pengambil-alihan kekuasaan itu boleh dikatakan hampir serentak di seluruh Sumatera Timur dan Tapanuli. Di dalam pengambil-alihan itu umumnya dilakukan oleh buruh dan pegawai-pegawai dari jawatan, dan perusahaan masing-masing. Sebelum dilakukan pengambil-alihan itu lebih dahulu instruksi-instruksi diperoleh dari KNI daerah dan pejabat-pejabat daerah. Instruksi-instruksi itu menjadi pedoman pada umumnya di daerah-daerah atau kota-kota lainnya di Sumatera Timur dan Tapanuli.

Setiap pengambil alihan setiap jawatan atau perusahaan petugas-petugas Jepang disuruh pulang dan di kantor-kantor itu dikibarkan bendera sang saka Merah Putih. Dengan cara seperti ini resmi kantor tersebut menjadi milik Republik Indonesia. Setelah jawatan-jawatan vital dikuasai maka segera barisan pemuda Indonesia bertugas mengawal gedung itu. Di dalam pengambil-alihan ini kadang-kadang juga Jepang melakukan kekerasan-kekerasan.

Di Pematangsiantar sewaktu pengambil-alihan atas kekuasaan kepolisian dari tangan Jepang pada tanggal 4 Oktober 1945 hampir terjadi insiden. Teuku Abdul Azis, wakil kepala Polisi di Pematangsiantar dalam suatu upacara menurunkan bendera Jepang dan menggantikannya dengan Sang Saka Merah Putih. Tetapi kemudian Kepala Polisi Jepang menurunkan sang saka itu kembali dan menggantinya dengan bendera Jepang. Teuku Abdul Azis marah-marah dan hampir terjadi insiden, dan Sang Saka Merah Putih kembali dikibarkan. Kepala Polisi Jepang tersebut tidak dapat berbuat apa-apa dan terus pulang ke rumahnya yang diikuti oleh polisi orang Jepang yang lain, sejak itu resmi kepolisian di Pematangsiantar dikuasai Republik Indonesia.

Di Balai Kota Medan walikota Jepang Hayasaki berkeras melarang berkibarnya sang saka Merah Putih di kantornya. Setelah beberapa saat berkibar sang saka tersebut walikota Jepang itu sendiri kemudian menurunkannya kembali. Jelas ini menimbulkan ketegangan-ketegangan sehingga timbul amarah pegawai-pegawai bangsa Indonesia. Melihat keadaan ini Mr. Luat Siregar sebagai Walikota Republik Indonesia me-

lakukan tindakan yang tepat.

Kantor kota segera dipindahkan dari tempat semula ke **Cremerweg** Nomor 6, yang diikuti oleh seluruh staf pegawai bangsa Indonesia. Ini berarti kantor kota yang lama tidak berfungsi lagi, dan roda pemerintahan kota sudah dikuasai oleh Republik Indonesia. Peristiwa yang seperti ini banyak terjadi dalam pengambil alihan kantor-kantor dan jabatan-jabatan, karena petugas-petugas Jepang takut akan tindakan sekutu karena mereka sekarang berada di bawah kekuasaan sekutu.

3. Hambatan-hambatan terhadap pembentukan Pemerintahan Republik Indonesia di Sumatera Utara

Dalam pembentukan pemerintahan Republik Indonesia di Sumatera Utara, tidak semuanya dapat berjalan dengan lancar. Justeru karena hal itulah maka kedua utusan pemerintahan pusat yang dikirim ke Sumatera Timur agak lambat merealisasi proklamasi kemerdekaan itu. Selain hambatan dari pihak Jepang yang ketakutan kepada sekutu, juga karena Belanda lebih cepat mengambil inisiatif dengan wakilnya **Brondgeest** seperti telah diuraikan lebih dahulu. Mungkin hal ini karena Belanda memandang Sumatera Timur sangat potensial karena banyaknya perusahaan mereka di sini.

Di antara hambatan-hambatan itu ialah dari apa yang disebutkan **Comite van Ontsvangst** seperti telah diuraikan sebelumnya. Lahirnya **Comite van Ontsvangst** ini adalah akibat peranan Belanda yang begitu cepat sekali di Medan melalui **Letnan Brondgeest**.

Pada zaman Jepang di Sumatera Timur oleh golongan feodal yang pro Belanda telah ada gerakan yang bernama **Persatuan Sumatera Timur (PST)** dan siap sedia yang disebut mereka kemudian sebagai gerakan di bawah tanah.

Setelah Jepang kalah golongan feodal yang ketakutan kepada Sekutu, karena ada di antaranya turut kerja sama dengan Jepang, ingin mengambil muka terhadap Belanda pada tanggal 25 Agustus mengadakan sidang. Sidang ini dilakukan di rumah Dr. Mansyur di Jalan Raja (sekarang Singamangaraja). Di dalam keputusan sidang inilah kemudian dibentuk **Comite van Ontvangst** yang bertugas menyambut kembalinya Belanda. Sebagai ketua diangkat **Sultan Langkat** dan wakilnya Dr. Mansyur.

Dr. Mansyur sebenarnya juga ketua **Persatuan Sumatera Timur** yang didirikan pada tahun 1938. Dengan adanya **Comite van Ontvangst** maka garis dan pedoman **PST** jelas mengikuti jalan pandangan

politik *Comite van Ontsvangst* itu. Terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia mereka tidak mempercayainya. Hal ini jelas diketahui dari Siaran Badan Penerangan Negara Sumatera Timur sebagai berikut:

" . . Dengan penuh kecewa mereka memperlihatkan bahwa aliran-aliran yang merusak kian mempengaruhi pergolakan yang terjadi. Kekuasaan berada di tangan mereka. Melawan secara terang-terangan tak mungkin . . ." ¹⁾

Jadi jelas PST dan kemudian juga organisasi *Pardist* tidak ingin mendukung Republik Indonesia karena kedudukan mereka ini akan lenyap. Pandangan dan faham mereka inilah yang dieksplotasi oleh Belanda untuk menghancurkan pemerintahan Republik Indonesia di Sumatera Timur. Belanda sengaja memupuk aliran tersebut untuk dapat melakukan politik *divide et impera*, sehingga Negara Sumatera Timur mereka ciptakan setelah agresi militer Belanda I.

Sikap antipati mereka ini jelas diketahui oleh masyarakat Sumatera Timur sehingga sebelum agresi militer Belanda I seluruh kekuasaan raja-raja dan sultan-sultan di Sumatera Timur dihapuskan oleh rakyat secara paksa.

Selain hambatan dari golongan feodal hambatan secara langsung terjadi pula dari pihak Belanda sendiri. *Brondgeest* yang ditugaskan oleh Belanda sebagai perintis telah pula berhasil membentuk kesatuan-kesatuan bersenjata di kota Medan. Ia mengumpulkan bekas-bekas anggota *KNIL* (*Koninklijke Nederlandsch Indische Leger*), para *romusha* dan bekas tawanan Jepang dan mempersenjatai mereka pula.

Pasukan-pasukan bersenjata Belanda ini sejak muncul di kota Medan mulai menunjukkan keangkuhannya. Mereka yang pada mulanya hanya sebahagian kecil dari pasukan *Sekutu*, tetapi makin lama mereka mencoba menguasai situasi di kota Medan. Pada setiap kendaraan dikibarkan bendera Belanda dan di tempat kediamannya terdapat pula bendera Belanda. Tindakan mereka ini seakan-akan tidak menghiraukan situasi yang sudah berubah dan menganggap sinis terhadap barisan-barisan pemuda Indonesia. Hal ini sangat menusuk hati bangsa Indonesia.

Pasukan Belanda yang kecil inilah sebagai pelopor pembentukan *NICA* (*Nederland Indische Civiel Administratie*) di Medan. Perkembangan tentara *NICA* ini semakin meluas setelah induk pasukan *sekutu* mendarat di Belawan. Untuk lebih jelas baiklah kita membicarakan ke-

1) Kem. Pen. Prop. Sumatera Utara, hal. 40

datangan dan pendudukan kota Medan oleh tentara sekutu.

Kontingen tentara Sekutu Brigade ke-4 Divisi India 26 ditugaskan menduduki kota Medan dan sekitarnya. Mereka mendarat di Belawan pada tanggal 9 Oktober 1945. Batalyon itu dipimpin oleh Letnan Kolonel Crosswell. Bersamaan dengan pendaratan kontingen Brigade ke-4 itu juga turut serta komandan mereka, yaitu Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly beserta stafnya.

Pada tanggal 10 Oktober terjadilah serah terima antara pasukan Jepang dengan sekutu di atas kapal Venus yang berlabuh di Belawan. Penanda tangan serah terima itu dari pihak Jepang Mayor Jenderal Sawamura dan dari pihak sekutu Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly. Dengan tibanya Brigade ke-4 ini maka daerah Medan dan sekitarnya mulai diduduki tentara Sekutu.

Di dalam masalah akomodasi bagi tentara Sekutu ini timbullah insiden-insiden, karena mereka mencoba secara paksa penguasaan atas gedung-gedung pemerintahan Republik Indonesia yang berada di kota Medan. Insiden-insiden ini mungkin secara sengaja dilakukan oleh agen-agen NICA pada waktu itu agar Sekutu terlibat dalam pertarungan dengan barisan-barisan pemuda yang ada. Agen-agen NICA ini mulai memancing kekeruhan-kekeruhan agar pemerintah Republik Indonesia di Sumatera Timur atau Sumatera Utara dapat dilikwidasi. Ini jelas kita ketahui dari beberapa insiden-insiden yang terjadi seperti di Jalan Bali, Siantar Hotel dan lain-lain.

a. Peristiwa Jalan Bali tanggal 13 Oktober 1945

Kedatangan tentara Sekutu memberi hati bagi kaki tangan Belanda. Mereka mulai melakukan tindakan-tindakan yang menyinggung perasaan bangsa Indonesia yang telah merdeka, karena merasa sekutu sebagai pelindung mereka.

Pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober pagi jam 09.30 WSU seorang serdadu NICA telah mencabut lencana Merah Putih dari seorang anak kecil dan kemudian diinjak-injaknya. Seperti telah diuraikan bahwa setiap orang Indonesia terpampang di dadanya lencana merah putih sebagai tanda bangsa yang telah merdeka.

Bagi Belanda lencana itu menyilaukan pandangannya dan menghalangi niat mereka untuk kembali ke Indonesia. Perbuatan serdadu Belanda itu menyakitkan hati bagi orang-orang yang melihatnya. Ini berarti suatu penghinaan terhadap bangsa Indonesia yang telah merdeka. Masyarakat yang berada di sekitarnya tidak tinggal diam melihat

penghinaan yang dibuat oleh serdadu NICA itu. Serdadu NICA itu diserang oleh pemuda-pemuda yang berada di sekitarnya dengan menggunakan berbagai-bagai senjata tajam.

Dalam suasana seperti ini tiba-tiba melintas sebuah jeep dengan dua orang serdadu NICA di dalamnya dan memberondong orang-orang yang melakukan serbuan terhadap serdadu yang seorang itu.

Perbuatan kedua serdadu Belanda itu menimbulkan seorang rakyat tewas. Tindakan Belanda ini bukan menimbulkan ketakutan malahan setelah mendengar berita itu makin banyak para pemuda menuju Jalan Bali dengan segala persenjataan yang mereka miliki. Suasana menjadi lebih tegang. Pertempuran singkat segera terjadi dengan penyerbuan ke gedung Belanda di Pension Wilhelmina Jalan Bali. Tempat ini adalah sarang dari gerombolan-gerombolan NICA yang berdiam di Medan.

Inggris sebagai wakil sekutu memerintahkan tentara Jepang untuk memulihkan situasi damai kembali tidak dapat berbuat apa-apa Jepang tidak mampu menghadapi massa yang begitu bersemangat dan tidak dapat dibendung karena datang dari segala penjuru kota Medan. Barulah setelah muncul pimpinan Barisan Pemuda Indonesia yaitu Achmad Thahir suasana damai dapat dikembalikan dengan adanya perundingan.

Tetapi suasana damai itu kembali lagi dikacau serdadu Belanda yang menghuni Pension Wilhelmina pada sore hari jam 15.00 WSU. Mereka menembaki secara membabi buta orang-orang yang berada di sekitar gedung kediamannya itu.

Tindakan mereka sengaja memancing kekacauan dan tidak dapat ditolerir rakyat lagi. Rakyat secara serentak menyerbu ke gedung itu dan perkelahian bersenjata sampai kedalam gedung itu sendiri. Setiap orang yang berkulit putih yang berada dalam gedung itu menjadi sasaran, karena rakyat telah marah.

Dalam penyerbuan ini seorang perwira Belanda, yaitu Groenenberg, tujuh serdadu NICA dan beberapa warga Swis tewas dalam peristiwa ini. Banyak pula yang luka parah dan ringan di kedua belah pihak. Dari pihak Indonesia para korban dibawa ke rumah sakit umum yang waktu itu dipimpin Dr. Pirngadi untuk dirawat.

Sebagai akibat pertempuran singkat itu Pension Wilhelmina menjadi hancur. Dari peristiwa jalan Bali ini Belanda mengadakan lagi beberapa move untuk menghalangi berdirinya Pemerintahan Republik

Indonesia di Sumatera Utara. Kejadian yang lain sekarang bukan di kota Medan tetapi di luar Medan.

b. Peristiwa Siantar Hotel

Siantar hotel adalah milik seorang warga negara Swis. Di zaman Jepang hotel ini tidak dikuasai oleh Jepang karena Swis bersifat netral dalam Perang Dunia II. Setelah perang usai tempat ini juga berfungsi sebagai hotel. Di sini banyak menginap orang-orang Belanda yang datang dari Medan untuk mengurus para tawanan perang serta mencoba menanamkan pengaruhnya. Terdapat juga di antaranya serdadu-serdadu NICA.

Di depan Siantar hotel itu terdapat pula markas BKPI (Badan Kebaktian Pemuda Indonesia) seperti yang telah diuraikan berdiri di segala kota-kota di Sumatera Timur. Di depan Siantar hotel ini mereka kibarkan bendera Belanda seakan-akan mereka tidak peduli kepada keadaan waktu itu. Atau sengaja mereka memancing agar suasana menjadi keruh.

Pada tanggal 15 Oktober Barisan Kebaktian Pemuda Indonesia yang tempatnya berhadapan dengan Siantar hotel mengibarkan pula bendera Sang Saka Merah Putih. Pada waktu penaikan bendera Merah Putih itu dari Siantar hotel terjadi penembakan-penembakan. Atas penembakan-penembakan tersebut maka BKPI mengadakan sidang kilat, sidang kilat mengambil putusan untuk menyerang para penembak yang bersarang di Siantar Hotel.

Beribu-ribu pemuda yang bukan saja berasal dari kota Siantar melainkan dari sekitarnya turut menyerbu dengan membawa segala macam senjata. Siantar hotel yang menjadi sarang NICA menjadi sasaran penyerbuan itu. Siantar hotel dibakar dan serdadu-serdadu NICA yang bertahan di lubang tempat persembunyiannya akhirnya menyerah.

Sebelum terjadi penyerbuan ke Siantar hotel oleh massa rakyat, tentara NICA yang mengetahui bahwa mereka dalam keadaan terkepung mencoba meminta bantuan tentara Jepang. Kolonel Orita bersama 25 truk pasukannya sampai di Siantar hotel beberapa jam kemudian untuk mendamaikan dan menentramkan situasi.

Tentara Jepang itu dengan senjata memblokade Siantar hotel untuk mencegah penyerbuan rakyat terhadap Siantar hotel. Kolonel Orita pergi ke markas BKPI untuk menjelaskan kedatangannya dan merundingkan perdamaian. Pihak BKPI tidak keberatan asal saja seluruh orang Belanda dan tentara NICA bersama senjatanya diserahkan

kepada BKPI dalam waktu yang ditentukan.

Kemudian Kolonel Orita dengan Burhanuddin sebagai pimpinan BKPI pergi ke Siantar hotel untuk memulai perundingan ketika Burhanuddin memasuki Siantar hotel dengan kendaraannya, terdengar suara tembakan. Tembakan itu ditujukan kepada Burhanuddin sendiri tetapi untung dilindungi oleh tentara Jepang yang mengawalinya sehingga ia selamat. Tetapi tembakan itu mengenai seorang pemuda Indonesia sehingga ia gugur dalam peristiwa tersebut. Karena terharu atas peristiwa itu Burhanuddin memerintahkan aba-aba untuk menyerbu ke Siantar hotel. Hotel itu diserbu oleh massa rakyat dan serdadu-serdadu NICA itu ada yang menyerah dan ada yang menjadi korban.

Dengan susah payah kemudian tentara Jepang mengatasi keadaan tersebut, dan membawa orang-orang Belanda dan korban-korban itu ke Medan. Dengan hancurnya Siantar hotel maka usaha Belanda untuk menguasai Simalungun menjadi berantakan. Di dalam peristiwa ini dari pihak Indonesia gugur dua orang yaitu Muda Rajagukguk, dan Ismail Situmorang.

c. Peristiwa Matahari Hotel di Brastagi

Untuk mengembalikan kekuasaan Belanda di Sumatera Utara, maka sekutu mulai menempatkan pasukan-pasukannya pada tempat-tempat yang strategis. Sebagai contoh Pematang Siantar, Binjai dan Tanjung Morawa dan Berastagi.

Di Brastagi Inggris menempatkan sebuah detasemen dipimpin oleh seorang perwira yang berpangkat Letnan Kolonel. Mereka ditempatkan di Planter School suatu gedung di daerah Gundaling.

Tentara Inggris yang berada di Brastagi ini mulai menunjukkan kesombongan dan keangkuhannya. Pada tanggal 18-10-1945 terjadilah peristiwa penurunan bendera Merah Putih di Grand Hotel. Perbuatan ini dilakukan oleh seorang anggota pasukan Inggris. Bendera itu kemudian dibiarkan terletak di tanah. Peristiwa ini dilaporkan oleh seorang pegawai Hotel tersebut kepada Barisan Pemuda Indonesia. Kejadian ini Matahari Hotel itu. Atas laporan itu pimpinan BPI menghubungi pimpinan tentara Inggris itu. Kepada pimpinan tentara Inggris itu diminta perhatiannya agar mereka dapat menghormati bendera Merah Putih itu.

Dengan angkuh pimpinan tentara Inggris itu enggan untuk menerima permintaan pimpinan BPI tersebut. Akibat tindakan pimpinan tentara Sekutu yang tidak baik itu mulai terjadi ketegangan-ketegangan

dari kedua belah pihak. Penghinaan yang dilakukan terhadap bangsa Indonesia ini diketahui oleh seluruh masyarakat Brastagi khususnya, Tanah Karo umumnya. Dari segala pelosok para pemuda membanjiri kota Brastagi dengan segala persenjataan yang ada.

Melihat keadaan ini tentara Sekutu yang berdiam di Brastagi ini tidak merasa aman segera mengadakan pengumuman agar kepada setiap orang yang memiliki senjata menyerahkan senjatanya kepada polisi di Brastagi.

Pengumuman ini tidak diindahkan masyarakat sehingga tentara Inggris itu mulai melakukan pengeledahan-pengeledahan tetapi hasilnya nihil, sedangkan ketegangan memuncak terus.

Pada tanggal 25 Oktober 1945 tentara Inggris mulai mendapat serangan-serangan dari para pemuda-pemuda di Brastagi. Karena Inggris tidak merasa aman mulai mereka berusaha meninggalkan Brastagi. Sewaktu konvoi mereka meninggalkan asrama mereka itu dan melalui kota Brastagi konvoi tersebut diserang sehingga terjadi pertempuran antara para pemuda dan tentara Inggris itu.

Di dalam pertempuran ini seorang perwira Inggris dan beberapa perajuritnya ditawan dan sebuah jeep dirampas, yang lain secara tergesa-gesa meninggalkan Brastagi.

Dari ketiga peristiwa itu jelas bahwa Belanda berusaha untuk menanamkan kekuasaannya kembali di Sumatera Timur dengan menguasai ketiga titik atau kota yang strategis itu. Tetapi mereka gagal secara menyeluruh. Walaupun demikian hal tersebut merupakan suatu penghalang yang cukup berat dalam pembentukan negara Republik Indonesia di Sumatera Utara.

4. Partisipasi masyarakat

Pendudukan tentara Jepang yang merupakan suatu puncak dari penderitaan rakyat di Sumatera Utara menimbulkan batas pula bagi penjajahan. Dengan menyerahnya Jepang kepada Sekutu melahirkan kewaspadaan pula dari rakyat Sumatera Utara umumnya terhadap penjajahan. Rakyat tidak ingin melihat penjajahan itu untuk kembali lagi bercokol di daerahnya.

Walaupun demikian ada segolongan kecil dari kaum feodal yang ingin kembali kemasa penjajahan, karena mengingat masa jaya mereka dari masa lampau. Hal ini telah diuraikan pada pasal sebelumnya di mana mereka membentuk *Comite van Ontsvangst*.

Tetapi sebaliknya sebahagian besar rakyat menolak kembalinya penjajahan itu. Kenyataan ini jelas dilihat dari wajah-wajah penduduk setelah Jepang menyerah. Rakyat senantiasa aktif untuk mendengar situasi-situasi tanah air mereka.

Surat-surat kabar seperti *Pewartu Deli* yang terbit sebelum perang kembali terbit walaupun dengan kertas ubi. Surat kabar itu beredar sampai ke pedesaan. Demikian pula rumah-rumah yang mempunyai radio mencari berita-berita dari luar negeri untuk mengetahui bagaimana keadaan politik pada waktu itu.

Berita Proklamasi yang hanya terdengar dari mulut ke mulut menjadi pembicaraan di kalangan masyarakat karena tidak disiarkan oleh badan resmi. Karena hal itulah maka di kota Medan dibentuk organisasi yang bersifat kebangsaan seperti Nasional Control dan Badan Kesaktian Pemuda Indonesia seperti telah diuraikan. Ini semuanya dilahirkan sebelum berita Proklamasi secara resmi dinyatakan di Sumatera Utara.

Setelah berita Proklamasi disiarkan secara resmi oleh Mr. Teuku Mohd. Hasan, ternyata sambutan masyarakat lebih hebat lagi.

Penduduk Indonesia tanpa diperintah segera memasang bendera sang saka Merah Putih dimana-mana dan setiap orang memasang lenca merah putih di bajunya. Pada waktu itu kain sangat sulit sekali tetapi sebagai pernyataan rasa gembira mereka maka setiap keluarga menyediakan bendera Indonesia sebagai menyambut rasa lega lepas dari penjajahan.

Segala uraian-uraian yang telah dikemukakan pada pasal sebelumnya semua menggambarkan partisipasi masyarakat Sumatera Utara yang sangat besar sekali terhadap pembentukan pemerintahan Republik Indonesia di daerah ini.

Barisan Pemuda Indonesia yang terbentuk pada setiap kota dan desa-desa di Sumatera Utara tumbuh sebagai cendawan, dan para anggotanya tidak mempunyai imbalan jasa terhadap tugas-tugas yang dipikulkan kepada mereka. Tetapi semua ini hanyalah karena kegembiraan atas kemerdekaan yang telah menjadi kenyataan.

C. PEMBENTUKAN ORGANISASI KEMILITERAN DI DAERAH SUMATERA UTARA

1. Perebutan Kekuasaan dari Jepang di Sumatera Utara

Mengenai bagaimana terjadi pemindahan kekuasaan dari tangan

tentara Jepang kepada pemerintah Republik Indonesia di Sumatera Utara telah diuraikan pada lembaran sebelumnya. Pemindahan kekuasaan tersebut tiap daerah ada yang dilakukan dengan secara paksa, tetapi ada pula melalui diplomasi. Walaupun demikian dalam waktu yang singkat di Sumatera Utara telah lahir pemerintahan Republik Indonesia.

Tetapi dalam uraian ini lebih dititik beratkan masalah perebutan senjata dari tangan tentara Jepang, sehingga melahirkan pertempuran-pertempuran di beberapa tempat. Pembentukan pemerintahan Republik Indonesia dengan sendirinya membutuhkan alat-alat keamanan yang dapat menjamin lancarnya pemerintahan tersebut. Sebagai alat keamanan pemerintahan Republik Indonesia pada waktu itu ialah barisan pemuda-pemuda. Mereka itu tidak mempunyai pakaian seragam, maupun persenjataan. Baru kemudian dibentuk Tentara Keamanan Rakyat (TKR) sebagai pelaksanaan realisasi proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.

Semua barisan-barisan bersenjata itu tidak mempunyai perlengkapan yang baik. Untuk memperlengkapi alat-alat perlengkapan ini maka terjadi beberapa insiden-insiden dengan pihak Jepang yang kadang-kadang menjurus kepada pertempuran-pertempuran.

Sebagaimana penjelasan pada Bab yang lampau bahwa sekutu menempatkan tentara Jepang pada beberapa tempat di perkebunan-perkebunan untuk menjaga daerah tersebut sebelum mereka dilucuti. Sementara itu pasukan-pasukan bersenjata Republik Indonesia sudah mulai terbentuk. Pasukan-pasukan ini memerlukan persenjataan untuk mempertahankan Republik Indonesia yang baru lahir. Pada mulanya dengan berbagai-bagai cara diperoleh persenjataan itu dari Jepang. Ada melalui pertukaran barang kebutuhan makanan dengan senjata, ada pula dengan cara diplomasi.

Dengan cara ini tidak banyak senjata yang diperoleh sedang kebutuhan senjata banyak sekali. Hal inilah yang menyebabkan maka pada beberapa tempat terjadi penghadangan-penghadangan terhadap tentara Jepang guna memperoleh senjata tersebut.

a. Pertempuran di Tiga Panah

Untuk pengembalian tentara Jepang ke tanah airnya, mereka dari suatu tempat dipindahkan ke tempat penampungannya. Dari Kabanjahe pasukan Jepang akan dipindahkan ke Pematangsiantar. Berita ini diketahui oleh para pemuda-pemuda di Tanah Karo. Untuk itu maka

para pemuda-pemuda mulai mencari tempat yang strategis menyusun penyerangan konvoi Jepang itu. Tempat yang dipilih sebagai sasaran penyerangan ialah Tiga Panah.

— Pada tanggal 25-12-1945 batalyon Kitano berangkat dari Kabanjahe dengan kendaraan sebanyak 30 motor lengkap dengan alat-alat persenjataannya. Para pemuda yang telah menanti di Tiga Panah dengan segera mencegat rombongan tersebut. Pada mulanya pimpinan batalyon Mayor Kitano turun untuk mengadakan perundingan dengan para pemuda-pemuda tersebut. Djamin Gintings sebagai pimpinan para pemuda berusaha dengan diplomasi untuk memperoleh persenjataan dari tentara Jepang tersebut.

Tetapi sebelum perundingan selesai telah terjadi kesalah-pahaman. Beberapa perwira Jepang hendak dilucuti senjatanya memberi perlakuan sehingga terjadi pertempuran-pertempuran yang memakan waktu beberapa jam dan meminta korban dari kedua belah pihak.

b. Pertempuran di Tebing Tinggi

Bulan-bulan Desember merupakan suatu pusat kesibukan bagi para pemuda-pemuda Indonesia di Sumatera Utara untuk menguasai senjata-senjata Jepang. Di sekitar Tebing Tinggi merupakan pusat pengumpulan tentara Jepang seperti di kebun Bahilang. Karena itu sering terjadi perampasan-perampasan senjata Jepang secara paksa. Sebelum tanggal 13 Desember telah terjadi beberapa kali insiden dengan tentara Jepang untuk menguasai senjata mereka. Salah satu di antaranya adalah suatu peristiwa yang terjadi di Dolok Merawan. Di tempat ini terdapat sejumlah kecil tentara-tentara Jepang. Para pemuda di sekitar daerah ini mula-mula berusaha menguasai persenjataan mereka secara damai tetapi akhirnya pertempuran tidak dapat dielakkan dan beberapa perwira Jepang terbunuh. Tidak hanya di Dolok Merawan saja peristiwa yang sama juga terjadi di Paya Pinang yang juga membawa korban di pihak Jepang. Di stasion Tebing Tinggi pada tanggal 11 Desember berhasil pula para pemuda Indonesia dengan jalan perundingan memperoleh senjata.

Keadaan ini tidak didiamkan saja oleh pihak sekutu dan Belanda (NICA). Segala kegiatan para pemuda-pemuda itu dengan sendirinya merugikan kepentingan mereka. Karena itu mereka berusaha menggunakan tentara Jepang itu untuk menindas para pemuda-pemuda Indonesia itu. Hal ini diuraikan pada harian waspada sebagai berikut :

Patut tidak mengherankan bila hal yang demikian menjadi

perhatian penuh dari pihak Sekutu dan Belanda yang waktu itu sudah berada di Medan, sehingga terjadi serangan pembalasan yang hebat dari pihak tentara Jepang pada pemuda di Tebing Tinggi tanggal 13 Desember 1945, semua ini tentu atas persetujuan/perintah dari sekutu 2

Peristiwa terjadinya pertempuran yang dahsyat di Tebing Tinggi ini dimulai dengan hilangnya empat orang perwira Jepang setelah adanya perundingan antara pihak Indonesia dan Jepang. Penculikan ini tidak diketahui oleh para pemuda dan menurut penyelidikan dilakukan oleh kaki tangan NICA untuk mengeruhkan suasana. Tetapi Jepang meminta pertanggung jawaban dari pihak pemuda Indonesia. Karena para pemuda tidak dapat menerima permintaan Jepang itu maka terjadilah peristiwa berdarah di Tebing Tinggi yang terkenal : Peristiwa Tebing Tinggi 13 Desember 1945. Pada hari itu tentara Jepang mengepung Tebing Tinggi dari segala jurusan dengan persenjataan lengkap. Sebanyak 1200 tentara Jepang dikerahkan untuk pembalasan dendam ini.

Tembakan meriam yang dilakukan ke kota Tebing Tinggi merupakan pertanda serangan Jepang itu. Dalam serangan ini Jepang melakukan pembunuhan setiap orang yang ditemukan terutama para pemuda. Markas Pemuda yang ditemukan digempur dan para pemuda yang tidak dapat menyelamatkan dirinya melakukan perlawanan secara kesatria dan akhirnya gugur.

Teror Jepang dengan segala kebengisan mereka itu sampai berlangsung tanggal 14 Desember 1945. Kota Tebing Tinggi sunyi dan di sana sini yang kelihatan hanya orang-orang Cina saja. Korban di pihak Indonesia karena kebiadaban Jepang ini sebanyak 3000 orang yang gugur dan banyak yang tidak diketahui kuburannya.

Di antara yang gugur terdapat Jaksa Suleman, Harun al Rasyid, Yacub Lubis, Tahir Hasyim, Deplot Sundaro, Arif Hasibuan. Semua yang disebut ini adalah para pimpinan dari Barisan Pemuda Indonesia dari Tebing Tinggi.

Baru pada tanggal 17 Desember 1945 teror itu mereda setelah datangnya utusan pemerintah Republik Indonesia di bawah pimpinan Tengku Hafas. Utusan tersebut segera mengadakan perundingan dengan Jepang untuk mengatasi peristiwa itu. Dari pihak Jepang sendiri 250 orang perajuritnya mati, sehingga Jepang sendiri menyangka ia tidak akan mengalami korban yang demikian besar. Ini semuanya menggambarkan betapa semangat perjuangan pemuda pada waktu itu yang diilhami oleh kemerdekaan.

Menurut penelitian ternyata peristiwa yang menimbulkan korban yang besar ini terjadi karena berhasilnya kaki tangan NICA melancarkan provokasi mereka di dalam wilayah Republik Indonesia.

2. Pembentukan organisasi kemiliteran dan badan perjuangan Sumatera Utara

Sebagaimana telah diuraikan inisiatif para pemuda-pemuda memegang peranan penting dalam pembentukan pemerintahan Republik Indonesia di Sumatera Utara. Organisasi pemuda seperti Barisan Pemuda Indonesia dan Badan kebaktian Pemuda Indonesia adalah sebagai organisasi para pemuda yang bertindak sebagai organisasi yang bersifat militer. Mereka ini yang mengawal gedung-gedung pemerintahan Republik Indonesia seperti kantor gubernur, wali kota dan sebagainya.

Dengan terjadinya peristiwa-peristiwa dengan NICA, sekutu dan Jepang organisasi ini makin meluas. Di Sumatera Utara Badan Keselamatan Rakyat (BKR) tidak dikenal, hal ini terjadi karena barisan-barisan pemuda itu yang lebih dahulu terbentuk baru lahir komite nasional daerah (KNI). Sedang menurut ketentuan BKR adalah bagian dari KNI, dan KNI yang bertugas untuk membentuknya.

Dari organisasi-organisasi pemuda inilah kemudian lahir barisan-barisan perjuangan di Sumatera Utara dan juga Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Pertumbuhannya adalah sebagai berikut :

a. Pembentukan TKR di Sumatera Utara

Pembentukan BKR seharusnya adalah tugas Komite Nasional Daerah sebagaimana di daerah-daerah lain, tetapi karena di Sumatera Utara gerakan perjuangan itu dipelopori oleh para pemuda keadaannya berbeda. Para tokoh-tokoh politik agak terlambat berfikir dalam masalah ini. Barulah kemudian setelah adanya instruksi dari Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia tertanggal 6-10-1945 yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera.

Berdasarkan instruksi itu pada tanggal 7 Oktober 1945 di tiap-tiap keresidenan dibentuklah koordinator-koordinator TKR. Tugasnya menyusun Tentara Keamanan Rakyat di daerahnya, masing-masing. Sebagai koordinator di Sumatera Timur diangkat Xarim M.S. dan di Tapanuli Dr. Ferdinand Lumbantobing.

Xarim M.S. sebagai koordinator segera pula mengangkat Mahroezer sebagai formatur untuk menyusun pimpinan-pimpinan pusat Tentara Keamanan Rakyat di Sumatera Timur. Mahroezer segera me-

nyusun komposisi pimpinan TKR yang kemudian disahkan oleh Xarim M.S. sebagai koordinator pada tanggal 10 Oktober 1945. Di dalam penyusunan TKR ini, unsur-unsur bekas Giyu Gun dijadikan sebagai pimpinan-pimpinan.

Sebagai pimpinan-pimpinan TKR Sumatera Timur adalah sebagai berikut :

1. Achmad Thahir : Ketua,
2. R. Sucipto : Pimpinan Markas Umum,
3. Alwin Nurdin : Kepala organisasi,
4. Mahroezar : Kepala perlengkapan,
5. Nip Xarim : Kepala persenjataan,
6. B. H. Hutajulu : Penerangan,
7. Abd. Razak : Perwira penghubung.

Dengan susunan yang demikian kecil ini maka mulailah terjadi gerakan pembentukan TKR di Sumatera Timur. Dari Medan sebagai pusat TKR terjadilah pembentukan TKR di seluruh Sumatera Timur.

Tindakan yang pertama dilakukan oleh ketua TKR pada tanggal 11 Oktober 1945 diadakan rapat dengan pengurus Barisan Pemuda Indonesia (BPI). Dalam rapat itu terjadilah pemisahan, beberapa tokoh-tokoh BPI dan pemuda-pemuda lainnya masuk ke dalam Tentara Keamanan Rakyat.

Setelah ada pemisahan itu maka pimpinan-pimpinan TKR Sumatera Timur mulai mengadakan rapat-rapat. Hasil rapat yang penting ialah memanggil kembali bekas-bekas anggota Giyu Gun dan Heiho untuk menjadi TKR. Para bekas-bekas tentara Jepang ini merupakan pimpinan pada TKR karena mereka telah terlatih. Karena jumlah mereka belum mencukupi maka diadakan pemanggilan lagi terhadap pemuda-pemuda Indonesia yang bersedia turut mengikuti latihan militer untuk menjadi TKR. Pemanggilan para pemuda-pemuda ini bersamaan sekali dengan terjadinya peristiwa Jalan Bali tanggal 14 Oktober 1945.

Segera setelah pemanggilan ini diadakanlah latihan-latihan militer secara kilat selama dua minggu sejak tanggal 23 Oktober 1945. Latihan kilat ini perlu karena terdesak oleh keadaan di mana tentara NICA telah mulai melakukan teror. Yang diajarkan dalam latihan itu adalah dasar-dasar kemiliteran dan penggunaan senjata.

Di samping persiapan yang diadakan di kota Medan dalam rangka mengimbangi kekuatan Belanda maka di luar kota juga mulai dilatih

para pemuda menjadi TKR. Untuk ini beberapa perwira-perwira dikirim ke Tanjung Balai, dan Binjai untuk pembentukan TKR di daerah kabupaten. Tetapi di Pematangsiantar atas inisiatif Hopman Sitompul seorang bekas Giyu Gun membentuk pula TKR, yang berdiri sendiri dan tidak tunduk ke Medan.

Dengan perkembangan seperti ini maka TKR tumbuh dengan subur dan meluas di Sumatera Timur. Akhirnya TKR Sumatera Timur menjadi divisi IV dan komandannya Kolonel Achmad Thahir. Dalam pembentukan TKR di Sumatera Timur ini patut dicatat adanya sekolah Perwira (Kadet) di Brastagi. Karena kebutuhan akan perwira yang cakap dan perkembangan TKR yang pesat, maka atas inisiatif Kolonel Achmad Thahir pada akhir Desember 1945 dibentuklah Sekolah Kadet di Brastagi. Sebagai direktur sekolah itu ialah Letnan Kolonel Martinus Lubis (gugur dalam pertempuran di Tanjung Morawa).

Sekolah ini mempunyai siswa sebanyak 149 orang dan hanya berlangsung satu periode saja. Karena suasana, kemudian tammatan dari sekolah Kadet itu langsung terjun dalam memimpin anak buahnya di front sekitar Medan. Banyak dari siswa-siswanya kemudian menjadi pimpinan dalam TNI dan ada pula yang gugur dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Di Tapanuli pembentukan Tentara Keamanan Rakyat tidak sama prosesnya seperti di Sumatera Timur. Peranan pemuda dalam tugas-tugas keamanan tidaklah seperti keadaan di Sumatera Timur. Pelaksanaan keamanan di Tapanuli dilakukan oleh polisi sebelum terbentuk TKR. Keadaan ini kemungkinan karena di Tapanuli tidak terjadi pendudukan sekutu dan NICA, sehingga ancaman terhadap kelangsungan pemerintahan Republik Indonesia tidak banyak, dan pembentukan pemerintahan Republik lebih dahulu dari pada di Sumatera Timur sehingga BKR dapat dibentuk.

Dr. Ferdinand Lumbantobing sebagai koordinator pada tanggal 20 Nopember 1945, segera membentuk pengurus-pengurus TKR di tiap-tiap kota penting di Tapanuli dan Nias. Sebagai pengurus terpilih Raja Barita Sinambela, Batuaring Hutagalung, Liano Siregar dan Hasanuddin Waruwu.

Di bawah pimpinan pengurus-pengurus ini segala kesatuan Barisan Keamanan Rakyat diroboh menjadi TKR. Untuk sementara kesatuan-kesatuan TKR ini berdiri sendiri pada tiap-tiap kota.

Demi untuk koordinasi TKR di Sumatera pada tanggal 5 Nopember Dr. A.K. Gani diangkat menjadi wakil menteri Pertahanan Republik Indonesia untuk Sumatera. Berdasarkan wewenang yang diperolehnya maka Mayor Jenderal Suharjo Harjowarjoyo diangkat sebagai panglima Komandeman Sumatera yang berkedudukan di Lahat Suma-

tera Selatan.

Tugas Komandemen Sumatera ialah untuk melakukan penyusunan Komandemen Sumatera dengan pembentukan divisi-divisi. Untuk Tapanuli ditetapkan suatu divisi yaitu Divisi VI.

Pada bulan Maret 1946 oleh panglima Komandemen Sumatera diterapkan Kolonel Muhammad Din sebagai pimpinan atas Divisi VI yang berkedudukan di Sibolga. Pada bulan April segera pula disusun Staf TKR Divisi VI itu. Sebagai Kepala Markas diangkat Pandapotan Sitompul seorang pemuda bekas Letnan I Giyu Gun.

Bersamaan dengan pembentukan Divisi VI ini maka Pemuda Republik Indonesia yang telah menjadi Pesindo di bawah pimpinan Maraden Panggabean menyatukan dirinya menjadi TKR.

Dengan adanya pimpinan Divisi VI ini maka susunan pasukan TKR di Tapanuli disempurnakan. Susunan pasukan-pasukan itu adalah sebagai berikut :

1. **Pasukan Sarumpaet berkedudukan di Sibolga dipimpin oleh Kapten O. Sarumpaet.**
2. **Pasukan Panggabean berkedudukan di Sibolga dipimpin oleh Kapten Maraden Panggabean.**
3. **Pasukan Sinambela berkedudukan di Tarutung dipimpin oleh Kapten Raja Barita Sinambela.**
4. **Pasukan Siregar berkedudukan di Padang Sidempuan di bawah pimpinan Kapten Liano Siregar.**
5. **Pasukan Waruwu berkedudukan di Gunung Sitoli di bawah pimpinan Letnan I Hasanuddin Waruwu.**
6. **Pasukan TKR Laut berkedudukan di Sibolga di bawah pimpinan Muda Oswald Siahaan.**

Dengan terbentuknya Divisi IV dan VI di Sumatera Utara maka juga dibentuk pada tiap-tiap daerah Polisi Tentara yang disingkat dengan PT ialah Letnan II A.H. Siagian, untuk Tapanuli oleh Letnan I Marsangkop Hutagalung untuk Tapanuli Utara, Letnan I Chandra Hasan untuk Tapanuli Selatan dan Letnan II Murti untuk Tapanuli Tengah.

b. Pembentukan Barisan Kelasykaran di Sumatera Utara.

Perkembangan pasukan-pasukan bersenjata di Sumatera Timur sangat pesat sekali. Keadaan ini terjadi karena setelah terjadinya pendudukan Sekutu lahir insiden-insiden yang menjurus kepada pertempuran-pertempuran. Situasi yang demikian ini menyebabkan terjadi peningkatan kewaspadaan rakyat untuk menghadapi NICA dan Sekutu. Walaupun setelah tanggal 11 Oktober terbentuk TKR di Sumatera Timur tetapi sebahagian pemuda yang tidak bergabung

dengan TKR membentuk barisan-barisan sendiri yang dikenal dengan barisan kelasykaran.

Sesuai dengan instruksi menteri Penerangan Republik Indonesia pada tanggal 15 Oktober 1945 agar organisasi - organisasi pemuda yang bercorak ragam itu segera mengadakan fusi dengan nama Pemuda Republik Indonesia. Di Medan Barisan Pemuda Indonesia dan Badan Kebaktian Pemuda Indonesia segera mengadakan fusi pada tanggal 16 Oktober 1945 dengan memberi nama Pemuda Republik Indonesia. Sebagai pengurus terpilih sebagai berikut :

1. Achmad Thahir : Sebagai Ketua Umum yang juga merangkap Ketua TKR.
2. H. Sihite : Ketua.
3. Sabirin Gani : Ketua II
4. Syamsudin Lubis : Setia Usaha.
5. Ishak Janggawirana: Bendahara.
6. Abdul Malik Munir: Kepala Seksi Pertahanan.

Di luar kelompok PRI dan TKR karena suasana yang sangat meningkat lahir pula kelompok-kelompok pemuda yang bersenjata. Mereka merupakan suatu kesatuan-kesatuan yang berada dalam lingkungan desanya sendiri. Pembentukan kelompok pemuda seperti ini terdapat di sekitar Medan.

Di Tembung terdapat pasukan Jacob Lubis, di Jalan Serdang pasukan Zaharsyah Aksyah, di Jalan Sepat pasukan Lahiraja Munthe, di pulo Brayan pasukan Bedjo dan lain-lain. Di sekitar Polonia para bekas Heiho yang bertugas di situ dibawah pimpinan Kasymir membentuk pasukan Udara. Demikian pula di Belawan, Tanjung Balai bekas anggota Kaigun Heiho membentuk pasukan Laut di bawah pimpinan Raden Sulyan seorang wakil kapten kapal di zaman Jepang.

Kemudian PRI (Pemuda Republik Indonesia) itu setelah kongres di Yogyakarta bulan Nopember 1945 berubah menjadi Pemuda Sosialis Indonesia dan lengkap pula dengan susunan kelasykarannya. Sejak penggabungan ini Achmad Thahir melepaskan jabatan sebagai Ketua Umum dan aktif sebagai pimpinan TKR. Pesindo dengan pasukan-pasukan bersenjatanya juga dinamakan Kesatria Pesindo. Pasukan ini dipimpin oleh Malik Munir, dan pada setiap kota-kota di Sumatera Timur juga terbentuk pasukan Pesindo-Pesindo pada waktu itu merupakan suatu pasukan yang banyak di Sumatera Timur.

Dengan lahirnya partai-partai Politik sebagai kelanjutan maklumat pemerintah Republik Indonesia pada bulan Nopember 1945 maka lahir pula lasykar-lasykar setiap partai sebagai *onderbouw* partai tersebut.

PNI kemudian membentuk Nasional Pelopor Indonesia (Napindo) sebagai pasukan bersenjata dan berhasil menggabungkan pasukan Bedjo, Lahiraja Munthe, Yacob Lubis dan pasukan Marzuki Lubis. Partai Komunis Indonesia membentuk pasukan "Barisan Merah" di bawah pimpinan Abdul Razak.

Al Jamiyatull Wasliyah pada tanggal 5 Desember sebagai hasil kongresnya di Pematang Siantar membentuk Hizbullah demikian pula Parmusi. Setelah terbentuk Masyumi sebagai suatu kesatuan partai Islam maka seluruh mereka juga disatukan dengan nama Hizbullah. Pimpinan Hizbullah di Sumatera Timur ialah Bachtiar Yunus. Parkindo di bawah pimpinan Melanthon Siregar membentuk Divisi Panah.

Di Tapanuli perkembangan partai agak berbeda dengan Sumatera Timur. Sebelum adanya maklumat pemerintah bulan Nopember 1945 telah ada partai Nasional Indonesia yang berkedudukan di Sibolga dan berturut-turut terbentuk pula di Tapanuli Selatan dan Utara yang masing-masing dipimpin oleh Syariful Alamsyah, Ayib Sulaiman dan Barita Sinambela. Organisasi Pemuda pada waktu itu ialah Gerakan Pemuda Indonesia yang berkedudukan di Sibolga dibawah pimpinan Maraden Panggabean.

Kemudian setelah bulan Nopember 1946 dengan lahirnya partai-partai politik maka lahir pula lasykar-lasykar rakyat. Barisan Pemuda Indonesia yang dipimpin oleh Maraden Panggabean melebur dirinya menjadi Ksatria Pesindo. Di bawah pimpinan Abdul Salim Situmorang dibentuk Lasykar Hisbullah, Barisan Merah oleh Sari Gunung Pohan dan Divisi Panah yang bergabung dengan induknya di Pematang Siantar. Barisan Banteng sebagai organ PNI di bawah pimpinan Hanif Samosir di Sibolga dan di Padang Sidempuan Angkatan Pemberontak Indonesia di bawah pimpinan Munar Suangkupon.

Di samping lasykar-lasykar yang tersebut di atas masih banyak lagi lasykar-lasykar yang terdiri dari kelompok-kelompok kecil tetapi tidak mempunyai peranan dan akhirnya lenyap sendiri.

3. Partisipasi Masyarakat dalam Masa Proklamasi di Sumatera Utara.

Dari uraian di atas jelas bahwa masyarakat Sumatera pada umum-

nya bersifat solider terhadap proklamasi. Hal ini dapat jelas kita ketahui sejak proklamasi itu diumumkan oleh Mr. Teuku Mohd. Hasan di Jalan Amplas. Maka sejak itu telah mengalir sumbangan-sumbangan berupa uang maupun tenaga untuk membantu pemerintahan Republik Indonesia, yang baru dibentuk itu. Kenyataan yang lain lebih jelas sewaktu pawai rakyat menyambut proklamasi yang berakhir di lapangan Fukuraido, peristiwa-peristiwa di Jalan Bali, Siantar Hotel dan di Tiga Panah. Di sini jelas rakyat tanpa pamrih turut membantu realisasi proklamasi di Sumatera Utara.

Walaupun demikian ada juga golongan yang anti seperti kelompok feodal tetapi bilangannya hanya kecil saja. Mereka ini yang membentuk Komite Van Ontsvangst seperti yang telah diuraikan. Selain dari pada itu orang-orang Cina di Medan membentuk Barisan Poh An Tui karena mereka takut kepentingan mereka terganggu dan mereka menyokong kembalinya pemerintahan kolonial Belanda serta turut melakukan teror terhadap bangsa Indonesia.

a. Palang Merah

Pada waktu masa-masa Proklamasi kegiatan Palang Merah belum begitu terorganisasi dengan baik. Dr. Pirngadi sebagai pemimpin Rumah Sakit Umum bertindak sebagai pimpinan Palang Merah yang bertugas merawat para korban yang terjadi pada setiap insiden. Tetapi setelah sering terjadinya pertempuran - pertempuran dengan pihak Sekutu dan NICA maka mulai terbentuk Palang Merah.

Setiap barisan bersenjata mempunyai tim palang Merah sendiri yang bertugas memberi pertolongan pertama. Anggota-anggota Palang Merah ini tidak saja terdiri dari para pria tetapi juga terdiri para wanita. Para wanita yang bertugas sebagai Palang Merah dalam lasykar-lasykar juga berada pada suatu barisan yang disebut barisan Srikandi.

b. Dapur Umum.

Pertumbuhan organisasi-organisasi massa pemuda dan adanya pertempuran-pertempuran dalam menghadapi NICA dan antek-anteknya di sekitar kota Medan, timbullah suatu kegiatan pembentukan dapur umum.

Sebagaimana diketahui bahwa pasukan - pasukan bersenjata itu tumbuh tanpa ada persiapan - persiapan terlebih dahulu dalam kebutuhan logistiknya. Ini terjadi karena organisasi ini tumbuh secara spontan dari masyarakat yang mempunyai rasa tanggungjawab terha-

dap negara dan bangsa.

Karena hal tersebut maka masalah logistik seperti makanan atau nasi bungkus semuanya disediakan oleh penduduk. Kemanunggalan antara pasukan bersenjata dengan rakyat pada masa ini telah terbina. Setiap kepala desa telah menyediakan makanan untuk para pemuda yang bertugas dengan menyediakan dapur-dapur umum. Selain dari pada itu juga setiap pasukan mempunyai dapur umum sendiri yang diurus oleh para Srikandi yang juga bertugas sebagai Palang Merah. Selain dari pada itu organisasi wanita yang turut menyumbangkan tenaga dan fikiran pada masa ini ialah Persatuan Wanita Republik Indonesia (Perwari). Melalui organisasi ini pula sering setiap cabang mengirim nasi bungkus ke garis depan untuk para pemuda yang bertugas.

Dari uraian - uraian tersebut jelas bahwa seluruh lapisan masyarakat di Sumatera Utara dalam masa permulaan proklamasi turut aktif membantu realisasi proklamasi tersebut. Para petani dengan hasil pertaniannya nelayan dengan hasil ikannya, dan para pedagang menyumbang berupa uang. Sedang yang lain menyumbangkan tenaga tenaganya. Seluruh partisipasi masyarakat inilah sebagai dasar dari keberhasilan proklamasi di Sumatera Utara.

D. KEDATANGAN TENTARA SEKUTU DAN TENTARA NICA DI MEDAN.

1. Sikap masyarakat terhadap kedatangan tentara sekutu.

Sebagaimana telah diuraikan bahwa jauh sebelum pendaratan tentara sekutu yang diwakili Inggris telah sampai di Medan. Letnan I Brondgeest yang berasal dari kesatuan tempur yang induk pasukannya berada di Kolombo, dan ia menyusup di hutan-hutan Langkat. Ia telah mengadakan persiapan-persiapan bagi kedatangan Sekutu dan pengembalian kekuasaan Belanda di Sumatera Utara.

Kegiatan Brondgeest itu berhasil melahirkan impian bagi orang-orang Belanda bekas tawanan dan kaum feodal kembali kemasa kejayaannya. Situasi inilah yang merupakan dasar bagi sikap bangsa Indonesia pada umumnya curiga terhadap kedatangan Sekutu dan NICA ke Medan.

Sebagaimana telah diuraikan bahwa pada tanggal 10 Oktober 1945 pasukan Sekutu telah mendarat di Belawan dan langsung terus menuju ke Medan. Pimpinan pasukan tersebut ialah Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly.

Kedatangan tentara Sekutu ke Indonesia bertugas untuk melucuti tentara Jepang dan membebaskan tawanan (internir Jepang). Terhadap tugas ini sikap masyarakat Sumatera Utara turut membantu mereka. Ini dapat diketahui bahwa dalam setiap gerakan tentara Sekutu ke tempat-tempat tawanan perang tersebut tidak mendapat gangguan masyarakat. Tetapi kemudian sikap masyarakat mulai berubah karena para bekas tawanan dan interniran Jepang itu berubah menjadi anggota KNIL (*Koninklijke Nederlandsche Indische Leger*). Mereka inilah kemudian menjadi tulang punggung Belanda (NICA) untuk memulihkan kekuasaan mereka.

Sikap seperti ini dapat ditafsirkan masyarakat bahwa Sekutu memang menyokong kembalinya kekuasaan Belanda di Sumatera Utara. Sikap Sekutu yang demikian ini senantiasa diawasi oleh masyarakat Indonesia yang telah curiga sebelumnya.

Kecurigaan ini semakin menjadi kenyataan setelah Sekutu menempatkan pasukan-pasukannya di tempat-tempat yang strategis. Binjai, Brastagi dan Tanjung Morawa ditempatkannya kompi-kompi pasukannya. Tujuan penempatan ini tiada lain sebagai perisai atau pelindung bagi pasukan induknya.

Usaha tentara Sekutu untuk mengembalikan kekuasaan Belanda ke Sumatera Utara semakin lebih jelas dengan tindakan-tindakannya kemudian. Dengan dalih untuk menjaga keamanan mereka melarang pemuda-pemuda memakai senjata. Kemudian dilanjutkannya dengan penggeledahan - penggeledahan markas barisan pemuda Indonesia, TKR dan sebagainya. Sang Saka Merah Putih diturunkan dan gedung-gedung pemerintah Republik Indonesia diduduki.

Teror yang mereka lakukan sangat menyakitkan hati masyarakat sehingga rakyat tidak tinggal diam apalagi setelah tentara Inggris itu menembak secara membabi buta setiap hari jatuh korban-korban yang tidak bersalah. Sikap rakyat yang semua diam sekarang mulai mengadakan reaksi. Teror yang dilakukan Inggris dilawan dengan perlawanan pula. Tentara Inggris digempur seperti yang terjadi di Matahari Hotel Brastagi. Perbekalan berupa berupa sayur mayur diblokade dan tidak boleh masuk ke daerah yang dikuasai Sekutu.

2. Beberapa Pertempuran Menghadapi Tentara Sekutu di Medan.

Di kota Medan sejak perbuatan yang keji dari tentara Inggris mulai lahir pertempuran-pertempuran. Di sekitar patroli tentara Inggris ke pinggiran kota disambut dengan tembakan-tembakan oleh para pasukan bersenjata seperti TKR dan barisan-barisan pemuda. Serdadu-

serdadu Inggris mulai tidak aman berjalan dalam jumlah yang kecil.

Pada tanggal 2 Desember 1945 dua orang serdadu Inggris yang terdiri dari perajurit India tewas sewaktu mereka berada di sebuah sungai dekat kota Medan untuk mencuci mobilnya. Sementara itu terjadi lagi pembunuhan-pembunuhan di daerah lain terhadap tentara Inggris berikut seorang perwiranya pada tanggal 4 Desember 1945. Ketegangan-ketegangan dengan pihak Inggris terus terjadi sehingga Inggris terpaksa membentuk suatu daerah kekuasaannya di kota Medan dengan batas-batas yang ditentukannya. Batas daerah yang dikuasanya disebut dengan istilah *The Fixed Boundaries Medan Area*. Di daerah ini dapat dijamin keamanan bagi mereka dan kaki tangan mereka. Bagi rakyat ini disebut kamp NICA, dari istilah *The Fixed Boundaries Medan Area* lahir istilah Medan Area yang terkenal.

Untuk menghempang kegiatan-kegiatan Sekutu itu maka pasukan-pasukan TKR dan Lasykar Rakyat kemudian membentuk Komando Medan Area. Dengan komando ini lebih terorganisasi gerakan perlawanan dalam menghadapi tentara Inggris dan NICA. Bagaimana hebatnya perlawanan rakyat itu dapat dilihat dari beberapa episode yang bersipat kepahlawanan menghadapi Inggris.

Pertempuran di Jalan Kapten (Jalan Pandu).

Insiden yang berupa pertempuran mulai terjadi di Medan pada tanggal 6 Desember 1945. Tentara Inggris pada tanggal tersebut mengepung Oranje Bioskop kepunyaan pemerintah Republik Indonesia dan mensita segala film yang ada. Tindakan Inggris itu dilawan oleh para petugas Republik yang ada, dan segera pemuda-pemuda mengadakan reaksi. Terjadilah tembak-menembak seketika. Tentara Inggris kemudian dengan tergesa-gesa meninggalkan tempat tersebut setelah di antara mereka jatuh korban. Sejak peristiwa itu terjadilah insiden-insiden secara beruntun.

Markas TKR, Pesindo yang terletak di sekolah Derma (Gedung UISU) Jalan Singamangaraja, gedung Ter Meulen Jalan Nusantara sekarang dan di depan bioskop Rex terjadi penggeledahan dari tentara Sekutu yang disambut dengan perlawanan dari pemuda-pemuda yang tergabung dalam TKR, Pesindo dan lain-lain.

Di dalam pertempuran di depan bioskop Rio (Riang sekarang) sebuah kendaraan lapis baja hancur dan dua orang tentara Sekutu terbakar. Pada masa ini telah digunakan granat botol yang berisi bensin dan belerang oleh para pemuda untuk menyerang tentara Inggris.

Sikap tentara Inggris yang tidak bersahabat itu menyebabkan setiap malam TKR dan lasykar-lasykar menyerang asrama-asrama mereka. Keadaan yang tidak aman bagi mereka ini menyebabkan mereka melakukan serangan ke pemusatan tentara TKR di Two Rivers (Trepes) pada tanggal 10 Desember 1945.

Dalam serangan ini tentara Inggris menggunakan berpuluh truk mobil baja dan tank. Mereka mendapat perlawanan dari TKR dan juga rakyat dengan persenjataan yang ada. Serangan ini gagal dan tentara Inggris pada sore hari kembali ke induk pasukannya. Karena keamanan tentara Inggris tidak terjamin maka pimpinan tentara Inggris itu mengeluarkan pengumuman melarang orang-orang Indonesia memakai senjata dan harus menyerahkan senjatanya kepada tentara Sekutu. Siapa yang kedapatan membawa senjata api akan ditembak di tempat.

Maklumat-maklumat mereka ditempatkan di segala penjuru kota Medan. Tetapi hasilnya nihil karena tidak diperdulikan rakyat, malah penduduk membalasnya dengan menyerang tentara Inggris.

Perlawanan rakyat yang tidak diperhitungkan Inggris terjadi pada tanggal 14 Desember 1945 di Jalan Serdang. Inggris berusaha untuk mengadakan razia senjata di daerah ini tetapi disambut rakyat dengan serangan-serangan sehingga terjadi pertempuran-pertempuran. Mesjid Djamik yang ada di Jalan Serdang dihancurkan Inggris sebagai pembalasan terhadap perlawanan rakyat itu. Baru kemudian setelah campur tangan pejabat-pejabat Republik Indonesia keadaan menjadi tenang.

Semua peristiwa ini adalah gambaran yang jelas menunjukkan sikap rakyat terhadap tindakan Sekutu yang merugikan perjuangan bangsa Indonesia yang ingin mempertahankan kemerdekaannya di awal-awal proklamasi.

-0-

CATATAN :

1. **Kempen, Propinsi Sumatera Utara**, hal. 40
2. **Waspada**, 14 Desember 1979, hal. 4

BAB IV

PERJUANGAN DI DAERAH SUMATERA UTARA

A. MASA SEBELUM AKSI MILITER BELANDA I

Mengenai masalah pembentukan pemerintahan Republik Indonesia di Sumatera dan pemerintahan Sumatera Utara telah diuraikan dalam BAB III secara kronologis.

Sejak berdirinya pemerintahan Republik Indonesia itu di Medan sebagai pusat pemerintahan propinsi Sumatera telah terjadi beberapa pertempuran-pertempuran baik dengan sekutu maupun dengan tentara NICA. Tentara Sekutu setiap waktu memperkuat wilayah yang dikuasainya dengan mengadakan patroli setiap harinya. Demikian pula mereka itu mengadakan razia-razia di sekitar kota Medan, tidak jarang terjadi penangkapan-penangkapan terhadap orang-orang yang dicurigainya dan kadang-kadang juga menembak mati mereka itu. Bagi penduduk yang berdiam di kota Medan telah terasa tidak ada keamanan lagi. Apalagi para perampok dan penjahat semakin merajalela karena penjara-penjara dikosongkan oleh Belanda (NICA). Tujuan mereka untuk melepaskan para penjahat itu tiada lain untuk mengacaukan perlawanan para pemuda Indonesia yang tergabung dalam TKR ataupun Lasykar rakyat. Dengan demikian akan timbul tanggapan masyarakat bahwa yang melakukan kejahatan itu tiada lain dari barisan-barisan pemuda. Jadi pengertian yang mereka katakan para *ekstremist* sepanjang mengenai orang-orang penjahat atau narapidana yang dilepas itu memang tepat dan benar. Tetapi para Pemuda Indonesia lebih awas lagi tentang hal ini. Para narapidana yang berkeliaran itu segera diberikan bimbingan oleh para pemuda, agar dapat dimanfaatkan untuk membela Republik Indonesia yang baru lahir itu. Kepada yang tidak dapat menerima anjuran ini tidak jarang dilakukan tindakan kekerasan. Di dalam hal inilah seorang penjahat yang terkenal di kota Medan, yaitu Amat Boyan kemudian ditembak mati setelah melalui suatu duel karena ia membangkang tidak akan membantu pemerintahan Republik Indonesia.

Teror yang dilakukan oleh NICA dan Sekutu menyebabkan penduduk menjadi resah. Apalagi penduduk yang mendiami pinggiran kota sering menjadi sasaran peluru. Karena itu maka penduduk bangsa Indonesia terpaksa mencari keselamatan bagi dirinya. Untuk itulah maka mulai terjadi pengosongan kota Medan secara berangsur-angsur.

a. Pengungsian Penduduk Kota Medan.

Sebelum agresi militer Belanda I di kota Medan telah tidak terdapat keamanan lagi, karena teror yang dilakukan NICA, Poh An Tui terhadap bangsa Indonesia. Karena itu maka penduduk mulai berangsur-angsur meninggalkan kota Medan pindah keluar kota. Di Medan sendiri pemerintah Republik masih terus bertahan demi kelangsungan Negara Republik Indonesia. Arus perpindahan penduduk itu ada yang menuju Aceh, Simalungun, ke Tebing Tinggi dan sebagainya. Kedatangan pengungsi ke daerah-daerah tersebut tentu menimbulkan problem sosial. Walaupun demikian, pemerintah daerah selalu berusaha mengadakan penampungan-penampungan dan penduduk juga memberikan bantuan-bantuan baik moril maupun materiel bagi saudara-saudara pengungsi itu. Dari daerah-daerah penghasil bahan makanan mengalir beras, sayur untuk bantuan pada pengungsi itu. Pada umumnya kedatangan mereka itu tidak melahirkan suatu kesulitan karena jumlah mereka tidak begitu banyak. Jadi sebelum mereka itu memperoleh perumahan mereka ditampung di tempat-tempat sementara dan didirikan pula dapur-dapur umum. Tetapi kebanyakan mereka itu menumpang di tempat keluarga mereka yang terdekat.

Sejak adanya pengungsian dari kota Medan ke kota-kota di Sumatera Timur itu sebuah rumah menjadi tempat kediaman beberapa keluarga, demikian pula gerbong-gerbong kereta api juga ada penghuninya. Apa saja yang dapat dijadikan untuk tempat berteduh telah dihuni oleh para pengungsi. Mereka melakukan dan menerima hal itu demi untuk kemerdekaan bangsa dan tanah airnya. Rumah dan hartanya mereka tinggalkan di Medan begitu saja. Banyak di antara mereka itu setelah selesai Perang Kemerdekaan kembali ke tempatnya semula menemukan hanya puing-puing saja lagi, atau rumah mereka telah dihuni oleh orang-orang Cina. Karena itu bangsa Indonesia kemudian hanya mendiami pinggiran kota saja lagi.

Terjadinya pengungsian penduduk keluar kota Medan memang diinginkan oleh NICA, dengan tujuan agar mereka dapat aman. Oleh karena itulah mereka mengadakan terus menerus teror terhadap bangsa Indonesia yang tinggal di Medan.

b. Situasi Kota Medan Sebelum Agresi Belanda I.

Sebelum terjadinya agresi Belanda, penduduk kota Medan sebahagian besar adalah bangsa Indonesia. Setelah agresi I boleh dikatakan tidak seberapa lagi, karena sebahagian besar sudah mengungsi. Di dekat-dekat pinggiran kota masih ada orang-orang Cina, dan mere-

ka itu berdiam dekat-dekat Kamp yang dapat diawasi oleh tentara Sekutu, NICA dan Foh An Tui.

Tentara Sekutu dan NICA itu pada malam hari tidak aman karena serangan-serangan dari pasukan-pasukan Indonesia yang terdiri dari lasykar rakyat dan TKR. Malam hari kota Medan seakan-akan malam hari raya karena suara peluru karben, mortir dan mitraliur yang terus-menerus. Keadaan ini bagi tentara Sekutu sungguh sangat menjemukan sekali, karena mereka tidak dapat beristirahat. Kejemuan ini terasa sekali bagi batalyon-batalyon Gurkha (India) itu, karena mereka sendiri tidak mengetahui tujuan kedatangan mereka dan untuk apa hal tersebut dilakukan. Karena itu banyak mereka yang menyeberang kepada pasukan-pasukan Indonesia dengan membawa senjatanya pula. Malahan dalam pasukan yang dipimpin oleh Nip Xarim ada sepasukan yang terdiri dari bekas-bekas tentara India yang dipimpin oleh Yong Satar seorang pemuda India.

Kegiatan perdagangan di kota Medan boleh dikatakan terhenti sama sekali terutama dengan daerah luar kota. Sayur-mayur dan beras dilarang untuk dimasukkan ke Medan. Belanda dan Sekutu terpaksa mendatangkan bahan makanan dari luar negeri dan penduduk yang berada dibawah pengawasannya diberikan distribusi. Kehidupan penduduk yang berdiam di kota Medan boleh dikatakan terkurung dan satu-satunya jalan keluar hanyalah melalui Belawan saja. Itupun tidak aman dari gangguan pasukan-pasukan Indonesia. Seluruh pasukan Indonesia telah mengepung kota Medan dari segala jurusan. Karena kepatuhan dari pasukan-pasukan Indonesia kepada pemerintah Republik Indonesialah maka serangan terhadap kota Medan tidak dilakukan walaupun berkali-kali Belanda melanggar perjanjian-perjanjian tembak-menembak setelah perjanjian Linggajati ditanda tangani.

c. Pemindahan Pusat Pemerintahan dan TKR Keluar Kota Medan

Peningkatan teror yang diadakan oleh NICA dan antek-anteknya di kota Medan tidak saja mengganggu keamanan rakyat tetapi juga pemerintahan Republik yang baru berdiri. Karena itu maka pada pertengahan tahun 1946 diputuskan demi untuk kestabilan roda pemerintahan yaitu April 1946 Markas TKR dan tempat kedudukan Gubernur Sumatera dipindahkan ke Pematang Siantar. Dengan demikian seluruh jawatan-jawatan yang berada secara hirarhi di bawah naungannya pindah pula ke Pematang Siantar. Kota Medan hanya didiami oleh Walikota yaitu Mr. Mohd. Yusuf, yang sekaligus juga menjadi kepala perwakilan Republik Indonesia. Sebagai perwira penghubung

ditempatkan Kapten Asmatuddin. Dengan perpindahan itu seluruh gedung yang dahulunya bekas tempat atau kantor pemerintahan Republik Indonesia di Medan dengan cepat dikuasai oleh NICA dan Inggris.

Kota Siantar yang dahulunya hanya merupakan suatu kota kabupaten (*afdeling Simalungun en de Karo landen*) dan setelah kemerdekaan menjadi dua Kabupaten sangat sibuk karena dari sanalah seluruh Sumatera diatur. Kota itu menjadi padat karena tidak saja jawatan yang pindah tetapi juga seluruh pegawainya.

Untuk melanjutkan penerangan kepada rakyat Radio Republik Indonesia juga pindah ke Pematang Siantar. Pemancar dan Studionya dipindahkan di Pantoan yaitu suatu daerah di pinggiran kota Pematang Siantar. Dewasa itu Siantar menjadi motor dari perjuangan untuk Sumatera, sebagaimana Jogjakarta untuk Indonesia pada waktu itu. Sekolah-sekolah juga pada waktu itu dipindahkan ke Pematang Siantar. Sekolah Menengah Tinggi yang dipimpin oleh Ismail Daulay dari Medan pindah ke Pematang Siantar dan demikian pula Sekolah Guru Puteri dari Binjai pindah pula ke Pematang Siantar. Dengan perpindahan ini kegiatan pemerintahan sipil di Sumatera Utara berjalan baik dan dapat lancar. Dari Pematang Siantar ini jugalah kemudian dikeluarkan Oeang Republik Indonesia Propinsi Sumatera sebagai alat pembayaran yang sah. Ini dilakukan karena alat pembayaran yaitu uang Jepang telah sangat berkurang dan juga untuk membiayai anggaran belanja daerah.

Dari keadaan ini jelaslah bahwa pemindahan ibu kota itu mempunyai suatu manfaat yang sangat besar sekali demi kelanjutan pemerintahan Republik Indonesia di Sumatera.

Walaupun kota Medan boleh dikatakan telah dikuasai oleh NICA perhubungan dengan kabupaten Langkat dan Aceh dapat juga berlangsung dengan baik, melalui jalan dari Lubuk Pakam, Pancur Batu terus ke Binjai melewati jalan-jalan perkebunan. Namun dengan sarana perhubungan yang kurang baik ini kordinasi pemerintahan dapat berjalan lancar baik pemerintah yang berasal dari tingkat propinsi maupun dari keresidenan. Pusat pemerintahan keresidenan waktu itu dan dinas, misalnya Dinas P dan K diungsikan juga dari Medan ke kota Tebing Tinggi. Jadi peranan kota Tebing Tinggi dan Pematang Siantar menjelang agresi Belanda itu sangat penting sekali.

d. Situasi Medan Area.

Sejak pengosongan kota Medan, Belanda mulai melakukan kegiatan-kegiatannya di Medan. Pemerintahannya mulai dilaksanakannya. Demi untuk stabilisasi pemerintahannya itu, maka mulailah Belanda melakukan peningkatan operasi militernya sekitar Medan. Pasukan-pasukan Belanda setiap hari melakukan serangan-serangannya ke setiap daerah pertahanan pasukan Indonesia sekitar Medan. Dengan bantuan-bantuan kapal-kapal terbang capungnya mereka membombi tempat-tempat pemusatan pasukan TKR atau Lasykar Rakyat. Tidak jarang pula perkampungan-perkampungan penduduk turut menjadi sasarannya. Peningkatan serangannya ini mempunyai tujuan untuk mencegah gempuran-gempuran yang sering dilakukan oleh pasukan Indonesia di malam hari.

Keadaan peningkatan yang dilakukan Belanda dalam pertempuran ini disambut oleh pasukan Indonesia di sekitar Medan dengan kewaspadaan dan hati-hati sekali. Untuk itulah maka diadakan suatu konsolidasi dan reorganisasi dari pasukan-pasukan yang berada di sekitar Medan. Hal ini perlu sekali dilakukan karena selama ini pertempuran yang dilakukan boleh dikatakan tanpa suatu kordinasi yang teratur. Tiap kelompok atau kesatuan mengatur pasukannya sendiri. Karena itulah sering dalam setiap pertempuran yang dilancarkan, keadaan selalu ditentukan oleh tentara NICA.

Sadar atas keadaan ini maka oleh beberapa tokoh diadakan suatu usaha, agar diantara lasykar-lasykar itu ada suatu kordinasi yang terarah. Pada tanggal 10 Agustus 1946 oleh Marzuki Lubis, Xarim M.S., Nathar Zainuddin diputuskan untuk membentuk suatu Resimen Lasykar Rakyat Medan Area (RLMA), merupakan suatu pimpinan tunggal dari lasykar rakyat yang beroperasi di Medan dan sekitarnya. Dengan adanya pembentukan badan ini boleh dikatakan bahwa hampir seluruh kelasykaran bergabung di dalam organisasi ini. Kedudukan komando ini berada di **Two Rivers** atau biasa disebut oleh penduduk **Terepes**, yaitu suatu tempat dekat Deli Tua kira-kira 15 km dari kota Medan. Resimen ini mempunyai staf yang lengkap dan dipimpin oleh Nip Xarim. Pasukan dari Resimen Lasykar Rakyat itu terdiri dari empat batalyon dan masing-masing menempati sektor-sektor tertentu dari kota Medan. Di samping empat batalyon dari pasukan Lasykar rakyat disini terdapat pula Batalyon B dari TKR yang dipimpin oleh Kapten Nip Xarim sebagaimana tersebut di atas. Pimpinan dari Resimen ini sebahagian besar adalah berasal dari TKR.

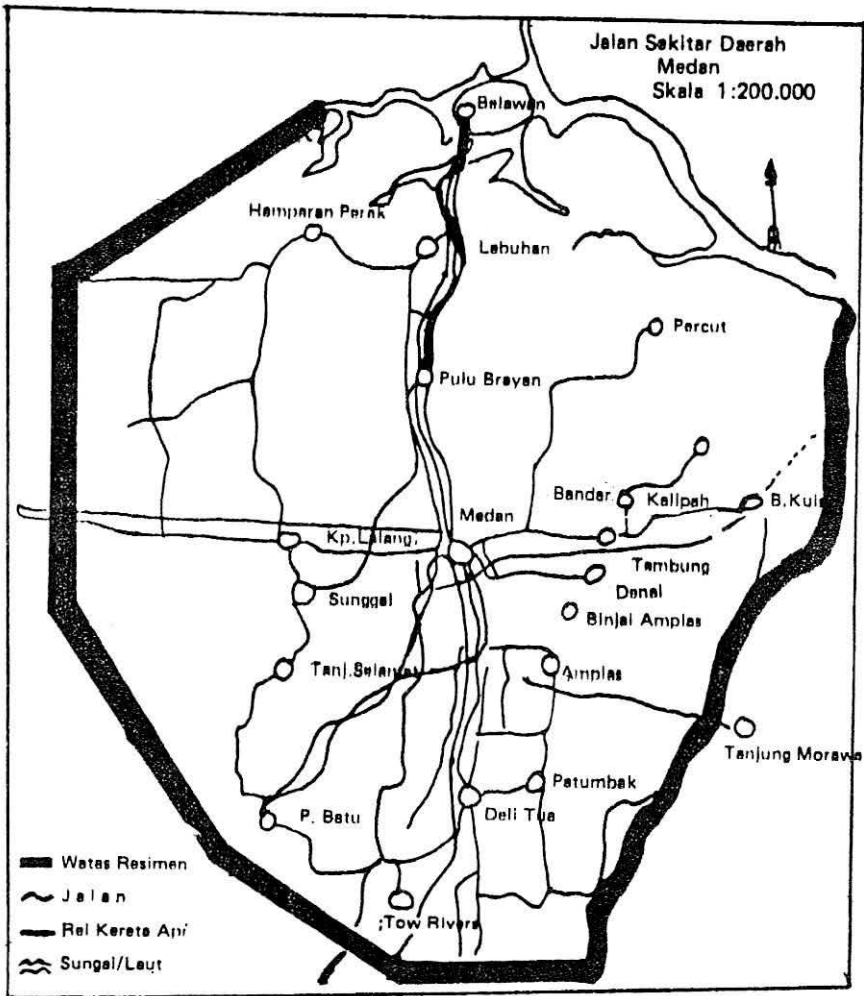
Sementara dari pihak Indonesia terjadi konsolidasi, Belanda juga tidak tinggal diam. Mereka mendatangkan pula bala bantuan dari negeri Belanda, sebahagian dari Divisi 7 Desember telah sampai pula di Belawan, yang terdiri dari para milisi mereka. Karena Inggris yang diperalat Belanda tidak mampu untuk mengembalikan penjajahan Belanda, maka mulailah diadakan kegiatan-kegiatan perundingan antara Belanda dengan Indonesia yang terkenal dengan perjanjian Linggajati. Akibat dari perjanjian Linggajati itu maka di Medan juga terjadi kelanjutan dari perundingan atau pelaksanaan dari perjanjian itu. Perjanjian berlangsung tetapi Belanda terus memperkuat pasukannya. Sebelum Inggris meninggalkan Indonesia ia mengharapkan agar kedudukan Belanda di Indonesia dapat stabil. Oleh karena itu Sekutu berusaha mengadakan pendekatan dengan pihak Indonesia. Sebelum tercapainya persekutuan Linggajati Belanda melalui penengah Inggris telah berkali-kali mengadakan pertemuan dengan pihak Indonesia untuk mengatasi perselisihan-perselisihan yang terjadi. Perundingan-perundingan yang diadakan di Medan adalah sebagai kelanjutan dari perundingan-perundingan yang diadakan pihak Indonesia Belanda dan Sekutu.

Pada tanggal 20 September 1946 di Jakarta diadakan pertemuan antara delegasi Indonesia dengan Sekutu untuk mengatasi perselisihan-perselisihan di berbagai kota-kota di Indonesia yang diduduki oleh Inggris. Utusan Indonesia diwakili oleh Mayor Jendral Sudibjo dan dari pihak Inggris Mayor Jendral E.G. Mansergh. Dalam perundingan itu terdapat suatu usul dari pihak Republik Indonesia untuk menyelesaikan persoalan yang isinya :

1. Gencatan senjata (tracc) diadakan di seluruh Indonesia, di darat, laut dan udara.
2. Dalam waktu berlakunya gencatan senjata, mestilah dihentikan segala pemasukan tentara Belanda atau Sekutu ke seluruh Indonesia.
3. Tentara Sekutu haruslah menjamin bahwa tentara Sekutu tidak akan menyerahkan senjata kepada tentara Belanda, baik langsung maupun tidak langsung.
4. Oleh pihak Sekutu haruslah dijamin adanya kebebasan lalu-lintas baik di daratan, lautan maupun di udara.
5. Tentara Sekutu haruslah dengan selekas-lekasnya menyelesaikan penyingkiran orang-orang Jepang baik militer maupun sipil 1

Usul ini memang baik dan sangat tepat untuk mengatasi perselisihan itu tetapi pihak Sekutu tidak dapat menerimanya. Sekutu memang

Peta watas Daerah RLRMA Medan Area



KOMANDO MEDAN AREA

sengaja melakukan perundingan itu untuk mengulur-ulur waktu agar Belanda dapat menyusun kekuatannya kembali. Jadi dalam setiap perundingan pihak Indonesia mendapat tekanan-tekanan dari pihak Sekutu. Pada tanggal 14 Oktober di Jakarta tercapailah suatu persetujuan mengenai Gencatan senjata antara pihak Sekutu, Belanda dan Indonesia. Isi persetujuan itu sangat merugikan kepentingan Republik Indonesia tetapi ini dilakukan Indonesia demi untuk menunjukkan kepada dunia luar bahwa Republik Indonesia mencintai perdamaian.

Tujuan Sekutu yang tidak mempunyai iktikad baik menyebabkan mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran dari isi gencatan senjata. Di Medan kelanjutan persetujuan gencatan senjata itu juga dilakukan setelah melakukan perundingan-perundingan yang disebut Local Joint Committee. Tetapi boleh dikatakan gencatan senjata yang diusahakan di daerah Medan Area itu tidak pernah berjalan dengan baik karena Belanda terus menerus melakukan pelanggaran-pelanggaran, sehingga pertempuran terus-menerus berlangsung. Setelah Belanda merasa kedudukannya kuat maka Inggris mulai menyerahkan beberapa kedudukan pasukannya di Medan. Pada tanggal 18 November Sekutu mulai meninggalkan kota Medan dan menyerahkan seluruhnya kepada Belanda. Dari apa yang dilakukan Sekutu itu jelaslah mereka sengaja mengulur-ulur waktu untuk memperoleh waktu yang tepat bagi pengembalian kekuasaan Belanda di Indonesia sedang perundingan itu hanya dalih sebagai iktikad baiknya saja.

Dengan peningkatan serangan-serangan Sekutu seperti telah diuraikan di atas demi untuk kepentingan perjuangan di Medan Area perlu adanya suatu kesatuan dalam Komando. Hal ini telah dipikirkan oleh pimpinan dari Divisi Gajah II yaitu penggantian divisi IV, yang berkedudukan di Pematang Siantar. Untuk melaksanakan apa yang dipikirkan oleh para pimpinan itu kemudian pada tanggal 7-9 Januari 1947 di Bireun diadakan suatu pertemuan antara pimpinan divisi Gajah I, Gajah II, Resimen Lasykar Rakyat Medan Area dan utusan dari Komandemen Sumatera. Keputusan yang diambil adalah untuk memperkuat front Medan Area. Untuk ini Resimen Lasykar Rakyat Medan Area dibubarkan dan dibentuk Komando Medan Area (KMA). Dengan pembentukan ini maka dalam kesatuan tempur Medan Area telah turut juga pasukan dari divisi Gajah I yaitu Aceh. Sebagai komandan dari KMA ini adalah Let. Kol. Soecipto dan Mayor T. Nurdin sebagai wakilnya. Dengan adanya komando Medan Area ini, diharapkan dapatlah suatu Kordinasi berjalan dengan baik, dalam menghadapi musuh. Kegunaan badan ini besar artinya sewaktu terjadi agresi Be-

landa I. Walaupun front Medan Area dapat diterobos Belanda tetapi pasukan-pasukan kita dapat mundur dengan teratur tanpa kerugian yang berarti.

e. Sumatera Utara setelah perjanjian Linggajati.

Pada tanggal 25 Maret 1947 terjadi persetujuan antara Belanda dengan Indonesia yang dikenal dengan perjanjian Linggajati. Persetujuan ini untuk sebahagian besar bangsa Indonesia dihadapi dengan perasaan waspada dan hati-hati, demikian pula suasana di Sumatera Utara. Harian Suluh Merdeka, yang terbit di Pematang Siantar sebagai salah satu harian Republik yang terbit di Sumatera Utara mengutip isi persetujuan itu sehingga rakyat mengetahuinya.

Kewaspadaan rakyat di Sumatera Utara itu beralasan karena sebelum perjanjian itu Belanda sengaja melakukan teror terhadap pertahanan Republik Indonesia agar wilayah kekuasaannya semakin meluas. Jadi Perjanjian ini dirasa rakyat sebagai suatu taktik Belanda untuk memulai suatu perluasan wilayah atau serangan yang lebih jauh serta dapat melikwidasi Republik Indonesia. Karena itu maka di Front Medan Area kedua pasukan yang bertentangan itu masing-masing memperkuat kedudukannya. Di wilayah yang dikuasai Republik Indonesia terus ditingkatkan kewaspadaan. Karena itu sesuai dengan instruksi Kementerian Pertahanan maka di Sumatera Timur dibentuk Biro Perjuangan Daerah dan badan ini juga disusun sampai ke Tingkat kecamatan. Tugas biro ini ialah menghimpun suatu kekuatan untuk melawan Belanda. Sebagai pimpinan dalam dewan kelasykarannya ialah Nathar Zainuddin dan Wahab Siregar. Selain mengenai kelasykaran juga Biro ini mengurus masalah mengenai hal-hal yang bersifat sosial dan ekonomi. Sebagai contoh memikirkan pengadaan beras dan lain-lainnya. Untuk meningkatkan perjuangan menghadapi Belanda di Sumatera Utara sesuai dengan Penetapan Pemerintahan pada tanggal 3 Mei 1947 maka di Sumatera Utara antara TKR dan Kelasykaran dijadikan tentara resmi yang disebut Tentara Republik Indonesia (TRI).

Walaupun telah ada penghentian tembak-menembak sesuai dengan Perjanjian Linggajati tetapi Belanda terus menerus melakukan pelanggaran-pelanggaran. Pelanggaran-pelanggaran ini dilakukannya di daerah perairan wilayah Republik Indonesia. Seluruh pantai yang dikuasai oleh Republik Indonesia sengaja diblokade mereka. Tujuan mereka adalah untuk melumpuhkan perekonomian Republik Indonesia dalam hal ini adalah pemerintahan Republik Indonesia di Sumatera Utara. Karena sikap Belanda yang demikian inilah terjadi beberapa pertem-

puran laut antara pasukan Republik Indonesia dengan kapal-kapal patroli Belanda. Diantara insiden yang merupakan pelanggaran Belanda atas daerah Territorial Republik Indonesia adalah peristiwa Teluk Sibolga. Peristiwa itu berlangsung karena kapal Belanda yang berada di teluk Sibolga menyeret kapal-kapal dagang yang keluar masuk teluk Sibolga. Kapal Belanda itu yang memakai nomor JT-1 telah berkali-kali diminta meninggalkan daerah perairan kita melalui perundingan yang dilakukan ALRI dengan wakil dari Kaptennya, tetapi tidak mengindahkan permintaan pihak Republik.

Sikap Belanda itu melahirkan ketegangan-ketegangan sehingga akhirnya menimbulkan pertempuran antara kapal Belanda itu dengan pihak Indonesia. Pertempuran dimulai karena Belanda melakukan penembakan terhadap pihak Indonesia sehingga menimbulkan korban dua orang perajurit yaitu Kopral Laut Galung Silitonga dan perajurit laut Lambok Hutasoit. Dari pantai terjadi pula tembakan-tembakan ke laut kearah kapal Belanda itu sebagai pembalasan terhadap tindakan Belanda itu. Pertempuran ini berlangsung dari tanggal 12 Mei sampai kepada tanggal 14 Mei 1947. Pertempuran ini berakhir setelah kapal JT-I Belanda itu menghilang dari teluk Sibolga. Menurut para nelayan yang melihat keadaan pada waktu itu dari kapal perang Belanda itu nampak korban-korban dari pihak mereka sehingga untuk perawatan akhirnya mereka meninggalkan daerah itu. Di pihak Republik juga terjadi kerusakan-kerusakan terutama rumah-rumah penduduk yang menghuni daerah pantai. Sedangkan, korban manusia delapan orang gugur dan 10 orang luka-luka berat.

Dari peristiwa ini jelaslah kelihatan bahwa iktikad yang tidak baik terdapat pada sikap Belanda sengaja untuk membuyarkan isi perjanjian Linggajati itu. Peristiwa yang sama juga sering terjadi di perairan lain di Selat Malaka seperti di Teluk Haru dan sekitar Tanjung Balai. Walaupun blokade Belanda itu demikian ketatnya namun keadaan perekonomian Republik Indonesia di daerah ini tidaklah hancur.

f. Gerakan Rakyat Menentang Kekuasaan Raja-raja di Sumatera Timur.

Dengan adanya pemerintahan Republik Indonesia di Sumatera Utara maka dengan sendirinya segala kekuasaan para *Zelfbestuur* mengakui pada pemerintahan Republik Indonesia. Sultan Siak yang telah mengetahui keadaan itu segera menyatakan setia kepada Republik Indonesia dan menyerahkan kerajaannya kepada Republik Indonesia. Dengan demikian maka persoalan mengenai Siak Sri Indrapura ti-

dak menjadi persoalan. Untuk mengatasi persoalan kedudukan dan status para raja dan Sultan itu maka oleh Komite Nasional Indonesia daerah Sumatera Timur pada tanggal 3 Pebruari 1946 diadakan pertemuan dengan para Sultan dan raja-raja untuk memberikan penjelasan kepada mereka mengenai status mereka. Dari pemerintah Republik Indonesia antara lain hadir :

Gubernur Sumatera	: Mr. Teuku Mohd. Hassan
Wakil Gubernur	: Mr. Mohd. Yusuf
Wali kota Medan	: Mr. Luat Siregar
Ketua KNI Sum. Timur	: A. Xarim M. S.

Dari pihak raja-raja hadir antara lain :

Sultan Langkat,
Sultan Deli,
Sultan Asahan,
Sultan Serdang,
Raja-raja Simalungun dan Sibayak dari Tanah Karo.

Dalam pidato pengarahannya, Gubernur Hassan menyatakan bahwa keadaan sudah berubah dan kedudukan raja-raja dan sultan di dalam Negara Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ini mempunyai kedudukan istimewa. Terhadap pidato pengarahan ini melalui Sulthan Langkat dinyatakan bahwa para Sultan dan raja di Sumatera Timur menyatakan kesetiaannya kepada Republik Indonesia.

Namun segala ucapan para raja dan sultan itu tidak sesuai dengan perbuatannya. Secara diam-diam mereka telah mengadakan hubungan dengan pihak NICA. Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya mereka itu telah mengadakan suatu badan yang disebut Committee van Ontvangst, atau Panitia Penyambutan jauh sebelum pertemuan tersebut di atas. Di antara mereka malah ada yang mendirikan PADI, yaitu suatu organisasi yang secara diam-diam anti terhadap Republik Indonesia. PADI itu adalah Partai Anak Deli Islam. Walaupun organisasi itu tidak secara terang-terangan tetapi dapat juga dicium oleh rakyat. Rakyat yang semangatnya telah bergelora untuk mempertahankan Republik Indonesia yang dicintainya tidak dapat menerima keadaan ini. Apalagi dalam kenyataannya para sultan dan raja itu tidak dapat bekerja sama dengan pemerintah Republik. Mula-mulanya tidak kelihatan gerakan rakyat tetapi pada tanggal 3 menjelang 4 Maret meletuslah suatu gerakan rakyat terhadap raja-raja dan sultan tanpa sepengetahuan pemerintahan Republik Indonesia. Banyak dari ka-

um feodal yang disingkirkan dan menjadi korban kemarahan rakyat yang cinta kemerdekaan dan tidak ingin ada yang menodai cita-cita mereka itu. Kejadian ini merupakan suatu peristiwa penghapusan kekuasaan-kekuasaan feodal di Sumatera Timur, atau disebut juga dengan Revolusi Sosial. Dengan timbulnya persoalan ini, maka Pemerintah Republik Indonesia mengambil suatu langkah agar dapat dicapai suatu stabilisasi dalam daerah Sumatera Timur, mengeluarkan suatu pernyataan yang bertanggal 5 Maret 1946. Pernyataan itu ditandatangani oleh wakil Gubernur Republik Indonesia ialah Dr. Mohd. Amir. Isi pernyataan itu antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa Revolusi Sosial itu meledak dengan tiba-tiba untuk menegakkan keadilan dan membantras kezaliman.
2. Tindakan rakyat supaya dilandasi perhitungan rugi laba serta peri kemanusiaan guna membatasi jatuh korban.
3. Orang yang berdomisili di Sumatera Timur supaya jangan ikut campur tangan.
4. Struktur Pemerintahan disesuaikan dengan keinginan rakyat yaitu sistem demokrasi.
5. Mereka yang tidak bersalah, tidak perlu khawatir dan supaya bekerja sebagai biasa.
6. Untuk sementara waktu sambil menunggu perkembangan selanjutnya maka Pemerintah dan keamanan diserahkan kepada Pemerintah Republik.
7. Gerakan Ekonomi Istimewa (ERRI, Gerak Tani dan lain-lain) supaya memberikan bantuan. 2

Pernyataan pemerintah ini tidak lain agar jangan terjadi anarhi dan untuk mengatasi keadaan yang kacau sehingga dapat digunakan musuh-musuh Republik Indonesia menghancurkan Republik Indonesia. Bukan tidak mungkin waktu itu kaki tangan NICA telah menyusup ke daerah Republik untuk mengacau keadaan.

Oleh karena itu sejak peristiwa itu maka kekuasaan diambil alih oleh tentara Republik Indonesia. Pemerintahan militer dipegang oleh Mahruzar dan berada di bawah pengawasan Komandan Divisi VI, yaitu Achmad Thahir. Walaupun telah ada kekuasaan Militer pada beberapa daerah kesultanan terjadi pula peristiwa penghapusan kerajaan seperti di Langkat dan Asahan, yang didahului dengan tindakan-tindakan oleh rakyat. Untuk mengatasi keadaan yang tidak diharapkan, maka pemerintahan Sipil di Sumatera Timur dipegang oleh suatu Dewan Pemerintahan yang terdiri dari Dr. Gindo Siregar, Abdul Muthalib Moro, M. Yunus Nasution, Haji Abdul Rahman Syihab dan Saleh Umar. Pembentukan pemerintahan ini dilakukan mulai tanggal 13 Maret 1946. Sejak berlakunya ketentuan pemerintahan Sipil yang baru

itu maka Sumatera Timur disusun dalam bentuk kabupaten-kabupaten dan daerah Swapraja dengan sendirinya dihapuskan.

B. MASA AKSI MILITER BELANDA I (PERANG KEMERDEKAAN I).

Karena penafsiran Republik berbeda dengan penafsiran Belanda tentang isi Perjanjian Linggajati, maka terjadilah kegagalan-kegagalan perundingan selanjutnya antara Belanda dengan Republik Indonesia. Kemudian hal itu menjurus pada adu senjata, karena Belanda mengira bahwa dengan kekuatannya di bidang persenjataan dapat mematahkan semangat tentara dan rakyat Indonesia. Sangkaan Belanda jauh dari yang diharapkannya. Hal itu juga karena politik internasional tidak menghendaki ada keributan di kawasan Asia Tenggara, hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa campur tangan melalui Dewan Keamanan.

Pada tanggal 21 Juli 1947 Belanda melancarkan serangan-serangan melanggar garis demarkasi. Demikian juga halnya di Sumatera Utara. Medan sebagai pusat kekuasaan Belanda di Sumatera Utara telah diperkuat dengan jumlah tentara dan peralatan oleh Belanda. Dari garis depan ada laporan pada pagi hari yang sampai kepada Letnan Kolonel Djamin Gintings bahwa Belanda melancarkan serangan di seluruh sektor pertempuran, sektor-sektor itu ialah di Medan Selatan berhadapan dengan Tanjung Morawa, di Medan Barat, Medan Timur dan Utara.

Kearah Medan Timur serangan infanteri didahului oleh pesawat terbang jenis bomber dan jenis pemburu Mustang, Kapal terbang jenis capung juga turut ambil bagian. Daerah Tembung, Bandar Kalipah, Batang Kuis dan Araskabu ditembaki dari udara. Infanterinya buat sementara tak dapat maju melainkan sebaliknya terdesak. Pasukan Republik maju. Tetapi pada tanggal 24 Juli 1947 dengan tembakan metraliur dari udara Komandan Pertempuran Medan Timur bernama Jacob Lubis gugur dan digantikan oleh Kapten A. Manap Lubis. Buat sementara mereka masih berjuang dengan gigih.

Pada sektor Medan Selatan tidak kurang perlawanan dari pasukan kita. Walaupun meriam, senapan mesin, granat dan bom-bom ukuran kecil menyertai pasukan Belanda, namun pasukan kita yang bertahan di seberang jembatan sungai Ampelas dapat mendesak maju ke Simpang Limun. Disinilah pada tanggal 25 Juli 1947 gugur pahlawan Sakti Lubis. Pasukan kita yang di Delitua masih bertahan karena tentara Belanda tidak dapat maju dari Titi Kuning.

Di Medan Barat, yaitu Sunggal, pasukan kita tidak merasa gentar

dan dapat bertahan menghadang musuh yang datang dari Medan. Tetapi tidak diduga, bahwa musuh telah menguasai Binjai pada tanggal 21 Juli 1947 dengan melalui Hamparan Perak, Tandem Hilir hingga memukul dari belakang. Pasukan kita yang ada di front Medan Barat dijepit oleh Pasukan Belanda yang datang dari Binjai dan Medan. Mereka tidak mengira ada Belanda datang dari Binjai. Pasukan kita terpaksa mundur teratur.

Selagi pasukan-pasukan kita sibuk untuk membendung Belanda arah Medan—Lubuk Pakam di luar dugaan Belanda mempergunakan kapal untuk membawa pasukan-pasukan. Pada tanggal 27 Juli kapal yang membawa pasukan Belanda berlabuh setelah mendatangkan bantuan dari Palembang. Dengan mempergunakan sekoci-sekoci dan boat mereka mendarat di Pantai Cermin. Lokasi pendaratan lebih dulu dihujani peluru dari pesawat terbang dan tembakan-tembakan meriam dari laut.

Di Perbaungan ketika itu bermarkas : TRI Resimen I Batalyon V bersama Komando Marsuse dan Lasykar-lasykar rakyat lainnya. Setelah mereka tahu Belanda mendarat di Pantai Cermin, maka sebelum Belanda sampai di Perbaungan diadakan taktik bumi hangus. Serentak dengan pendaratan di Pantai Cermin itu Belanda mengerahkan kekuatan di sektor Selatan. Pasukan kita yang di Simpang Limun, Ampebas mundur ke Tanjung Morawa apalagi setelah pertahanan di Deli Tua tembus. Tetapi pasukan yang di Simpang Limun, Mariendal tidak sempat lagi ke Tanjung Morawa maka terkepung. Jalan satu-satunya untuk menyingkir ialah ke bagian Timur yang dimanfaatkan oleh Mayor Ricardo Siahaan. Tak dapat dielakkan keadaan pemunduran itu berada dalam suasana kucar-kacir. Sebagian pasukan ada yang mundur menuju arah Barat Daya melalui jalan perkebunan Deli Tua menuju ke Tanah Karo.

Di lain front yaitu di Two Rivers dilancarkan serangan oleh Belanda pada tanggal 23 Juli. Disana ketika itu ada kekuatan dua kompi dari Batalyon V setelah TRI Batalyon B pimpinan Nip Xarim pindah ke Tanjung Pura sejak bulan Pebruari 1947. Belanda mengira bahwa di Two Rivers berkumpul TRI Batalyon B dan Resimen Lasykar Rakyat Medan Area.

Dengan mempergunakan dua buah pesawat pemburu jenis Mustang yang didahului oleh pemboman pada Markas Komando Kompi, penembakan-penembakan dengan matraliur menyusul tembakan-tembakan meriam dan pasukan-pasukan Tank dan infanteri dari dua ju-

rusan yaitu dari Padang Bulan dan Bekala. Pertempuran mulai jam-10.00 sampai jam 15.00. Kerugian di pihak kita ada tetapi tidak sebanding dengan kerugian Belanda. Pada ketika itulah kopral Muanan dan prajurit Tumin gugur bersama dengan Sersan Siran yang mendapat luka-luka kena peluru. Semangat prajurit-prajurit kita dapat dipuji.

Serangan dengan kekuatan besar dilakukan kembali di daerah sekitar jalan Medan Tebing Tinggi untuk membantu pasukan yang sudah ada di Tanjung Morawa. Masih sempat gedung Komando Medan Area dibumi hanguskan. Tetapi sewaktu menghancurkan jembatan Tanjung Morawa, Komandan Batalyon V TRI Resimen I Divisi X Mayor Zein Hamid tertangkap. Terjadilah penggabungan pasukan Belanda di Perbaungan dan kemudian melancarkan serangan ke Lidah Tanah, Sei Rampah, Rambutan dan terus ke Tebing Tinggi dan selanjutnya ke Pematang Siantar menjelang jam 18.00. Selanjutnya sebagian tentara Belanda itu memencar merebut Lubuk Pakam yang dari Tanjung Morawa dan yang di Tebing Tinggi sebagian terus ke Pematang Siantar sedang yang lain ke Asahan menduduki Pangkalan Dodek.

Dengan bergabungnya tentara Belanda dari Pantai Cermin di Perbaungan dan jatuhnya Lubuk Pakam, maka pasukan Republik di Medan Timur, sisa-sisa pasukan Selatan dan yang mundur dari Medan Utara terkurung. Pasukan-pasukan itu di bawah pimpinan A. Manap Lubis dan Bejo. Jalan Lubuk Pakam – Perbaungan dironda terus oleh Belanda. Antara Perbaungan – Pantai Cermin dikuasai oleh Belanda. Pasukan kita yang terkepung itu dipaksa memilih angkat tangan atau berjuang sampai darah penghabisan menerobos Sungai Ular untuk dapat menyingkir arah ke pegunungan. Semangat tentara kita patut dipuji pantang menyerah lebih baik mati asal terus melawan.

Pasukan Medan Timur yang dipimpin oleh A. Manap Lubis pada tanggal 29 Juli waktu malam hari menyerbu pertahanan Belanda di Lubuk Pakam. Terjadilah pertempuran seru. Tujuan A. Manap Lubis ialah untuk dapat lolos dari kepungan Belanda. Hal itu dapat berhasil dan mereka menuju Galang dan terus ke Dolok Masihul. Ada sebagian pasukan kita meloloskan diri ke Bangun Purba dengan mengambil jalan antara Araskabu dengan Lubuk Pakam.

Pasukan Medan Utara beserta sisa-sisa pasukan yang sudah cerai berai dari induk pasukannya ditambah dengan pengungsi yang tidak mau tinggal di daerah yang sudah dikuasai Belanda melakukan penyerberangan untuk menuju daerah arah ke selatan dan akan bermaksud terus ke Tapanuli atau Simalungun ke kampung halamannya. Penyerberangan begitu sulit karena kebetulan Sungai Ular banjir dan jem-

batan jalan raya dan kereta api dikawal ketat oleh Belanda yang diperkuat oleh pesawat Mustang. Untuk penyeberangan ada yang mempergunakan batang pisang, getek dan ada dengan cara berenang. Banyak yang mati hanyut dan kena peluru yang disebar oleh pesawat Belanda.

Sisa-sisa yang sudah lolos dari Sungai Ular, baik pengungsi ataupun pasukan, harus lagi berhadapan dengan sungai Bahilang dekat Tebing Tinggi. Sungai itu juga sedang banjir. Penyeberangan disinipun di bawah tembakan peluru kapal terbang Belanda, tetapi tidak begitu banyak korban.

Belanda tidak membiarkan mereka meneruskan perjalanannya, maka telah siap menunggu di Pangkalan Dodek. Rombongan yang lolos dari sungai Ular itu bergabung dengan pasukan yang mundur ke Dolok Masihul yang dipimpin oleh A. Manap Lubis. Tebing Tinggi diserang pada malam hari sedemikian rupa hingga hampir dapat diduduki kembali oleh pasukan kita. Belanda dan Poh An Tui yang pada siang hari dipencar menguasai Tebing Tinggi dan sekitarnya terpaksa dipusatkan. Keadaan seperti Pangkalan Dodek terus ke Asahan di sekitar Perdagangan, Serbelawan. Tempat-tempat ini kemudian menjadi "daerah kantong" yang tak pernah dapat direbut Belanda dalam pertempuran.

Tanggal 25 Juli 1947 Pancur Batu yang telah diduduki Belanda dapat direbut kembali pada malam hari oleh tentara kita di bawah pimpinan Letnan I Selamat Ginting. Karena bantuan tak datang maka terpaksa kota itu ditinggalkan pada pagi hari dan bertahan di sekitarnya. Hal itu dilakukan mengingat bantuan Belanda yang dengan mudah dapat didatangkan dan karena pesawat terbangnya dapat leluasa mengudara pada siang hari. Bagi pasukan kita dirasakan sekali tidak adanya komunikasi yang baik. Alat-alat kita pun tak ada, hingga komando-komando dalam pertempuran-pertempuran disampaikan dengan berteriak saja, *gorei sosa ala Japan*.

Pada pertempuran di Pancur Batu Belanda banyak mempergunakan mortir yang oleh pihak Indonesia disebut dengan istilah *tomong*. Karena di Medan Area dulu senjata itu dipakai juga oleh Belanda maka telah biasa pasukan kita menghadapinya dan telah tahu bagaimana keadaannya. Justeru dengan adanya tembakan *tomong* itu para perajurit kita bergerak maju mendekati pertahanan musuh.

Dalam suasana seperti diutarakan di atas Wakil Presiden Drs. Mohd. Hatta yang berada di Sumatera Utara tiba di Brastagi dari Pematang Siantar. Beliau menginap di Grand Hotel. Para pengungsi dari

Medan Area Selatan, Barat dan dari front Binjai beserta pasukan yang terpisah dari induk pasukannya mundur. Dalam perjalanannya mereka tidak luput dari tembakan-tembakan pesawat terbang. Komandan Resimen I Letnan Kolonel Djamin Gintings menghadapi kesibukan-kesibukan.

Kesibukan bertambah lagi dengan sampainya Komandan TRI Divisi X Kolonel Husin Jusuf bersama stafnya yang memberi tahu menerangkan bagaimana Belanda mendarat di Pantai Cermin langsung ke Perbaungan dan Tebing Tinggi kemudian ke Pematang Siantar melalui jalan-jalan perkebunan. Dari keterangan itu Djamin Gintings menduga hal yang serupa akan terjadi pula di Brastagi. Untuk itu beliau menginstruksikan menghadang musuh di daerah Seribu Dolok dan memperkuat pertahanan di Sibolangit. Hal ini perlu untuk memperlambat gerakan musuh supaya dapat melaksanakan pengungsian ke Kutacane, karena Wakil Presiden masih berada di Brastagi.

Pada tanggal 30 Juli Letnan Kolonel Djamin Gintings dengan ajudannya Iwan Matsum, Bupati Rakutta Sembiring, Mayor Selamat Ginting, Tama Sebayang, Mulai Sebayang dan R.O. Sembiring, berunding dengan Wakil Presiden mereka memohon kepada Wakil Presiden agar beliau bersedia tinggal di Tanah Karo untuk bersama-sama rakyat melancarkan perang gerilya untuk menghancurkan Belanda. Tetapi itu tidak dapat diterima oleh Wakil Presiden dan beliau akan meninggalkan Tanah Karo pulang ke Jawa melalui Kutacane terus ke Kutaraja (Banda Aceh) atau ke Bukittinggi melalui Merek dan Sidikalang.

Dalam keadaan yang genting dan harus dalam tempo yang singkat maka Wakil Presiden memilih lewat Bukittinggi berarti melalui Merek yang sewaktu-waktu dapat direbut Belanda jika Seribu Dolok jatuh. Pasukan yang dari Binjai dikirim memperkuat Seribu Dolok supaya Wakil Presiden dapat aman lewat Merek. Segala persiapan pengamanan dilaksanakan, maka setelah makan sahur dan sembahyang subuh berangkatlah Wakil Presiden yang didampingi Sekretaris pribadinya Wangsawijaya, Ruslan Batangtaris, Willem Hutabarat sebagai ajudan dan Gubernur Sumatera Mr. T. M. Mohd. Hassan. Rombongan telah dapat mendengar tembakan-tembakan senapan mesin, meriam, to-mong dari arah Seribu Dolok yang ditujukan pada pertahanan kita sekitar Gunung Sipiso-piso.

Seribu Dolok telah diduduki Belanda. Perpisahan yang mengharukan terjadi di Merek Wakil Presiden menuju Sidikalang terus ke Ta-

rutung, Sibolga, Padang Sidempuan terus ke Bukit Tinggi.

Pada tanggal 1 Agustus 1947 Djamin Gintings menginstruksikan agar Markas Resimen I tetap di Brastagi. Seluruh staf dan seluruh bintara harus tetap di Brastagi. Apabila Belanda dapat merebut Brastagi, tiap-tiap komandan mengambil inisiatif mengadakan pemunduran dan berkumpul di kaki gunung Sibayak di kampung Jarah Muda. Seluruh keluarga boleh pulang ke kampung masing-masing walaupun dengan rasa tidak senang.

Setelah Belanda menguasai Tebing Tinggi pasukan Belanda ada yang terus ke Pematang Siantar dan sebagian lagi menuju kabupaten Asahan. Bantuan lasykar dan tentara yang dikirim ke Medan Area telah kembali untuk memperkuat pasukan-pasukan di Asahan.

Pada tanggal 30 Juli 1947 kendaraan konvooi yang mengangkut tentara Belanda diiringi oleh pesawat Mustang yang menjatuhkan pamphlet. Pamphlet-pamphlet itu berisi ancaman dan kabar-kabar bohong untuk melemahkan semangat rakyat dan pasukan Republik Indonesia. Tetapi nyatanya rakyat tidak peduli akan itu dan mempertebal semangat juang bersama tentara kita.

Komando perjuangan dipimpin oleh Abdullah Eteng dan wakilnya Saidi Muli. Setelah melihat daerah Asahan sebagian besar diduduki musuh maka timbul pemikiran untuk meningkatkan perlawanan untuk itu diangkatlah Laurencius Tampubolon mengkoordinasi perlawanan di Daerah Asahan Utara berpusat di Pulo Mandi. Daerah Asahan Selatan dipertahankan oleh Abdullah Eteng bersama H. A. Dahlan.

Waktu pasukan kita melihat bahwa musuh sulit dibendung untuk meneruskan perjalanan ke Labuhan Batu, maka atas perintah Abdullah Eteng, Mahadi Nasution mengungsikan perlengkapan-perengkapan yang seyogianya dikirim ke Medan Area. Barang-barang itu dibawa ke Rantau Prapat walaupun banyak kesulitan yang dihadapi di setasion Kisaran. Di tengah jalan disiram dengan peluru oleh pesawat Mustang di Aek Loba dalam perjalanan ke Rantau Prapat.

Komando Sektor Asahan Utara menginstruksikan kepada kesatuan-kesatuan agar jangan mundur terus, melainkan harus menunjukkan kepada Belanda bahwa kita tetap ada. Kerja sama dengan rakyat harus dipupuk dan sabotase dijalankan sebanyak mungkin.

Di Tanjung Tiram pasukan Angkatan Laut Pangkalan III dipimpin oleh Mayor Laut Dahrif Nasution, Letnan A. W. Abdi, Letnan A. Wahid Pingo dan Letnan Zainuddin Dahlan. Perjalanan tentara Belanda

dihalangi rakyat dengan menumbangkan pohon-pohon ke jalan. Walaupun demikian tentara Belanda mudah saja bergerak ke Tanjung Balai setelah menguasai Kisaran. Kisaran telah lebih dulu mengadakan taktik bumi hangus di bawah pimpinan Komando Resimen II TRI yang dikepalai oleh Letnan Kolonel M. Kasim Nasution.

Pasukan Kompi IV Batalyon I dari Resimen II yang dipimpin oleh Letnan Supardi tidak menyangka bertemu dengan Belanda di kampung Hessa dan terjadilah pertempuran. Kerugian kita ada 12 orang, karena tidak diduga sebelumnya maka pasukan kita sambil bertahan-mundur teratur ke Henglo terus ke Pulau Raja. Kendaraan-kendaraan Resimen II di Kisaran dan yang tinggal setelah pertempuran disita Belanda. Dengan menyamar mempergunakan kendaraan rampasan serta pakai bendera Merah Putih pasukan Belanda menuju Tanjung Balai. Sesudah sampai di pusat kota langsung menuju Markas Pesindo dekat pajak ikan dan mengadakan tembakan-tembakan. Banyak rakyat dan lasykar yang korban. Demikian juga tembakan-tembakan membabi buta sekitar Sei Silam yang mengakibatkan banyak mayat bergelimpangan.

Dari Tanjung Balai Belanda meneruskan ke Teluk Nibung. Di jembatan Sei Kapias ada perlawanan yang mengakibatkan banyak korban di pihak kita. Pasukan Republik Indonesia beserta lasykar-lasykar Hizbullah dan Pesindo menyingkir ke daerah Selat Lancang mengadakan konsolidasi disana bersama rakyat untuk pada saat-saat tertentu mengadakan serangan balasan, seperti pada malam pertama Belanda menduduki Tanjung Balai. Walaupun serangan balasan gagal, namun nampak dari itu semangat juang kita tidak patah. Akhirnya pasukan-pasukan kita dari daerah Tanjung Balai mundur ke Pulo Raja.

Angkatan Laut Pangkalan II pimpinan Letnan Laut G. Z. Marpaung telah mundur ke Simpangan Bolon dekat Prapat dan Pangkalan III mundur dari Tanjung Tiram ke Tinjouan. Disana sering terjadi perlawanan terhadap Belanda. Akhirnya dari Tinjouan pindah di bawah pimpinan mayor Dahrief ke Gunung Melayu dan Aek Kuwasan.

Pada umumnya kota-kota di Asahan telah diduduki Belanda, tetapi mereka tidak aman pada malam hari. Walaupun pasukan-pasukan kita telah terpecah-pecah, tetapi kemudian diadakan usaha untuk saling berhubungan supaya dapat memperkuat diri masing-masing.

Panglima Tentara & Territorium Sumatera memberi instruksi supaya direalisasi pelaksanaan likwidasi dan integrasi lasykar-lasykar dan TRI menjadi TNI untuk memperkuat perlawanan terhadap Belanda

di semua garis depan. Terjadilah reorganisasi dan penggabungan komando dan pasukan-pasukan kita di Asahan masuk Brigade—XII pimpinan Letnan Kolonel Ricardo Siahaan. Asahan menjadi Batalyon III dengan komandannya Mayor H.A. Dahlan dengan kepala staf Kapten M. Samin Nasution. Batalyon itu terdiri dari empat kompi yang masing-masing terdiri dari tiga seksi.

Setelah selesai regrouping maka pembagian wilayah front pula diadakan sebagai berikut :

1. Front Buntu Pagar dipimpin W. P. Turangan.
2. Front Sipaku/Henglo/Ari Teluk pindah ke Pulo Maria dipimpin oleh Kapten A. R. Asmadi.
3. Kompi II dari Pulo Raja ke Pulo Maria dipimpin oleh Kapten Nurdin Nasution.
4. Front Padang Mahondang dan Bulu Duri oleh Kompi I dipimpin oleh Kapten Aminuddin Siregar.
5. Front Aek Tarum tetap diduduki Batalyon Istimewa di bawah pimpinan Mayor Kasmuni yang secara organik masuk Brigade B.
6. ALRI Pangkalan III tetap di Gunung Melayu dengan pos depannya Henglo dipimpin Mayor Dahrief Nasution.

Yang paling tangguh ialah Pulo Maria hingga tak pernah diganggu oleh Belanda. Yang diganggu Belanda ialah Front Buntu Pagar pada bulan Nopember 1947. Terjadi pertempuran yang seru. Demikian juga terjadi pertempuran di Front Ari Teluk pada akhir bulan Nopember.

Keadaan sampai menjelang tanggal 19 Januari 1948 ialah bertahan di tempat masing-masing apa lagi dengan adanya perjanjian Renville dan terbentuknya *status quo*. Sesudah Renville maka diadakanlah pengosongan-pengosongan daerah kantong menuju Pulo Raja.

Sesudah Belanda memasuki Asahan, maka pemerintahan sipil buat sementara praktis tak jalan, tetapi kemudian diadakan konsolidasi. Banyak staf dan pegawai-pegawai Bupati tinggal di daerah pendudukan. Bupati Abdullah Eteng yang telah pindah ke Bandar Pulo menyusun personil dengan tidak lengkap. Daerah Asahan praktis tinggal sedikit, tetapi harus diurus. Biaya diperlukan dan alat penukar atau wang harus ada. Diusahakanlah untuk menjual gambir 1 ton ke Rantau Prapat supaya dapat bahan-bahan, kertas dan tinta cetak. Dicitaklah wang di Bandar Pulo. Buruh perkebunan dapat dibiayai, demikian juga pasukan-pasukan kita di Asahan. Sei Kepayang dijadikan pelabuhan daru-

rat untuk mengeksport bahan-bahan ke Malaya dan Singapura.

Pemerintahan dapat berjalan karena bekerja sama dengan pasukan-pasukan kita. Pada kesempatan ini diadakan konsolidasi dalam bidang logistik, sosial politik dan pertahanan. Rakyat diikuti sertakan.

Sesaat sesudah Wakil Presiden meninggalkan Merek, Belanda dapat menerobos Seribu Dolok terus ke Sipiso-piso. Perlawanan yang dilancarkan oleh TRI Resimen I Napindo Halilintar beserta rakyat dapat dipatahkan oleh Belanda. Kemudian Belanda menuju Merek dan terus ke Kabanjahe. Sebelum Belanda sampai di Kabanjahe, pasukan kita telah lebih dulu mengadakan bumi hangus. Banyak orangtua dan pemuda menangis melihat keadaan itu karena tergambar pada pikirannya maut yang menerkam karena kekejaman Belanda. Memang mereka lebih cinta akan kemerdekaan dan diperintah oleh bangsa sendiri. Terjadi pengungsian keluar kota, ke pedalaman yang sukar dijangkau oleh pasukan Belanda. Brastagi juga mengalami nasib yang sama. Dari sana terus ke Bandar Baru, Sibolangit, dan bertemulah dengan pasukan Belanda yang sudah ada di Pancurbatu. Jalan raya Pematang Siantar, Seribu Dolok, Merek, Kabanjahe, Brastagi, Pancurbatu boleh dikatakan telah dikuasai Belanda, tetapi pada malam hari tidak aman. Penguasaan terhadap kampung-kampung tidak mungkin karena untuk hal yang demikian tidak cukup tentara Belanda, apalagi tentara dan rakyat kita tidak terlalu bodoh lagi, maka kapan saja ada kesempatan mengganggu Belanda selalu dimanfaatkan. Banyak gedung di Kabanjahe dan Brastagi yang telah musnah.

Komandan Resimen X menghindari ke pinggiran kota Brastagi pada tanggal 7 Agustus 1947 di daerah mata air. Dari sana mereka secara berkelompok mengadakan serangan ke tempat-tempat yang diduduki musuh. Hal sedemikian dapat dijalankan karena rakyat tetap setia dan di pihak kita.

Gunung Sibayak, Mata air dan Cinta Rakyat menjadi tempat pertahanan kita. Tempat-tempat lain yang perlu dicatat ialah Boras Sitepu, Simpang Payung, Kineppen, Kandibata, Sarinembah.

Komandan Resimen I menuju Kutacane pada tanggal 10 Agustus 1947 dengan didampingi Letnan Kapiten Purba untuk mempersiapkan dan mengerahkan Batalyon IV membantu pasukan-pasukan yang sudah lelah digaris depan.

Pasukan-pasukan Batalyon V yang dulunya di Perbaungan tiba di Barus Jahe. Sesudah mundur dari Perbaungan terus kepinggiran Tebing Tinggi, kepinggiran Pematang Siantar, Pagar Jawa, Tanah Jawa,

Kasinder, Simpang Tiga Prapat dan menyusur pantai Danau Toba ke Sipolha, Tigarunggu, Haranggaol, Cingkes terus ke Barus Jahe. Mereka mencari induk pasukan Resimen I dan memang berjumpa. Pasukan itu dipimpin oleh Raja Syahnan.

Tanggal 12 Agustus 1947 Komandan Resimen dengan stafnya pergi ke Tiga Binanga dengan lebih dulu singgah di Markas Batalyon III di Sarinembah. Di Tiga Binanga mereka bertemu dengan Residen Abu Bakar Jaar selaku Residen Sumatera Timur. Tiga Binanga telah menjadi ibu kota Darurat Sumatera Timur dan ibu kota Darurat Kabupaten Tanah Tinggi Karo.

Di Tiga Binanga inilah dibicarakan soal perbekalan. Dalam menjalankan tugas untuk mengawal mempertahankan rakyat dan tanah air perlu diatasi mengenai perbekalan, terutama beras. Untuk itu Resimen I mengadakan kantor dan gudang perbekalan di Tiga Binanga. Pasukan dikerahkan untuk menghubungkan Kutacane – Tiga Binanga – Sarinembah – Kandibata – Suka. Sepenuhnya jalan tadi masih dikuasai.

Di bidang lain dibina integrasi antara rakyat dan tentara, karena hal itu perlu sekali. Tentara harus tahu ia dari rakyat dan untuk rakyat. Rakyat harus tahu bahwa tentara itu anak-anaknya yang menjaga dia dan mempertahankan kemerdekaan.

Sesudah memperkuat diri masing-masing ditempat yang ditentukan maka Komandan Resimen merundingkan dengan stafnya untuk bergerak serentak ke Kabanjahe pada tanggal 16 Agustus 1947. Juga pada malam 18 Agustus diadakan lagi serbuan ke Kabanjahe. Karena pasukan kita tidak cukup mempunyai peralatan dan alat komunikasi maka sukar bagi kita untuk melumpuhkan musuh.

Markas Resimen I pindah ke kampung Seberaya yang disambut oleh rakyat dengan meriah. Pada waktu itu diketahuilah bahwa pada tanggal 13 Agustus 1947 kota Pangkalan Berendan dan Tambang minyak dibumi hanguskan.

Belanda menambah kekuatan untuk melumpuhkan kekuatan pasukan-pasukan kita di tanah Karo. Setelah pasukan ditambah di tanah Karo maka banyaklah kejadian-kejadian yang mengerikan yang dilakukan Belanda antara lain peristiwa Titi Bambu pada tanggal 21 Agustus 1947. Seberaya diserang secara besar-besaran oleh Belanda, kemudian kampung Suka dan tempat-tempat lain.

Baik di mana saja jika tentara kita mundur dari garis depan masuk

kampung-kampung, selalu diterima rakyat. Bantuan-bantuan selalu mengalir terutama bahan makanan. Rakyat rela memberikan berasnya, sayur-mayur dan lain-lain. Rakyat mau saja makan ubi atau jagung asal tentara yang bertempur mati-matian terjamin. Rakyat ikhlas rumah, lumbung dan seluruh miliknya dibakar Belanda asal ia tidak memberi tahu di mana dan berapa kekuatan pasukan kita. Sebagai mata-mata dan perhubungan suka rela tidak jarang dilakukan oleh rakyat. Memang ada juga dari rakyat kita yang dapat diperalat oleh musuh sebagai kaki tangannya untuk mengetahui informasi tentang kekuatan kita atau memberi kabar bohong untuk menakut-nakuti rakyat, tetapi jumlahnya sangat sedikit.

Sifat rakyat yang dikatakan di atas itu hampir di seluruh wilayah yang didatangi Belanda termasuk di Tanah Karo.

Begitulah berlalu bulan Agustus 1947 dengan sering terjadi sergapan-sergapan terhadap tentara Belanda yang mengadakan patroli menyatakan kita tetap ada. Pada bulan September penuh dengan pertempuran-pertempuran karena Belanda sering mengadakan patroli dan pembersihan menurut istilah mereka. Belanda tidak tahu bahwa dengan bersatunya jiwa rakyat tentara dan lasykar tidak akan dapat mematahkan semangat dalam mempertahankan kemerdekaan. Bulan Oktober berlalu juga dengan penuh pertempuran-pertempuran. Pada bulan Nopember 1947 Belanda lebih menggiatkan patrolinya, menambah kekuatan, lebih aktif dan lebih agresip. Belanda memperluas daerah kekuasaannya dengan menduduki beberapa tempat untuk mendesak tentara kita agar jauh dari benteng pertahanannya, supaya tidak sering terjadi serbuan pada malam hari.

Bidang perang urat syaraf diperhebat melalui surat selebaran-selebaran ataupun pidato-pidato untuk membuat keliru pendapat rakyat. Serangan berbisik oleh kaki tangan-kaki tangannya juga dilancarkan.

Usaha lain yang dijalankan oleh Belanda mengambil hati rakyat ialah memberi garam, gula, beras, mentega dan pakaian, mengangkut rakyat yang-pergi ke pekan atau ke pasar berbelanja dengan cuma-cuma dan cara-cara lain. Para pegawai yang tinggal di kota dan pegawai yang diangkat sebagai pegawai bayangan pemerintah diberi pembagian-pembagian yang baik agar mereka tetap setia kepada Belanda.

Semua ini dapat dikatakan hasilnya bagi Belanda sangat sedikit, karena antinya diusahakan oleh pemerintah dan tentara kita agar rakyat tetap pada pendirian semula "lebih baik mati dari pada dijajah kembali".





Sampai dengan ditanda tangani persetujuan Renville pada tanggal 17 Januari 1948 Belanda tetap melancarkan agresinya, namun sia-sia belaka. Pada siang hari saja Belanda yang agak bebas di tempat-tempat pertahanannya. Dengan adanya persetujuan Renville terpaksa pasukan kita mundur. Di daerah Karo mundur ke perbatasan Sumatera Timur-Aceh. Di daerah Asahan mundur ke seberang sungai Asahan. Di Simalungun mundur ke perbatasan Tapanuli.

C. MASA AKSI MILITER BELANDA II DAN PERIODE PERANG GERILYA.

Perundingan-perundingan antara Republik Indonesia dengan Belanda yang dicampur oleh Komisi Tiga Negara menjelang pertengahan Desember 1948 nampaknya mengalami jalan buntu. Keadaan Republik masih parah terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur akibat pemberontakan PKI di Madiun. Di Sumatera Utara juga ada perselisihan bersenjata antara pasukan Brigade ex. Banteng Negara pimpinan Liberty Malau melawan *Stoottroep* B pimpinan Bejo yang dibantu oleh Manap Lubis. Keadaan Republik semacam itu memang yang dikehendaki Belanda agar ia mudah memaksakan kehendaknya.

Ultimatum yang dikirim oleh Belanda dari Jakarta ke Jogjakarta yang harus dijawab pada tanggal 18 Desember 1948, dicoba oleh KTN (Graham cs) untuk menengahi. Usaha itu gagal karena Belanda telah berniat untuk melampiaskan nafsunya menghancurkan Republik dengan kekuatan sejarah. Tanggal 19 Desember 1948 aksi militer Belanda dilakukan dari semua front, yaitu daerah yang merupakan status Quo.

Serangan ke Tapanuli pada tanggal 23 Desember 1948 bukan hanya dari darat melalui Parapat. Ajibata ke Lumbanjulu, tetapi ikut juga dari udara. Pasukan Indonesia yang ada di perbatasan antara Lumbanjulu dengan Parapat dapat mengundurkan diri setelah lebih dulu dihujani peluru dari udara. Pertahanan di Porsea, Balige siap siaga, yang di Balige juga mengarahkan senjatanya ke danau Toba kalau-kalau Belanda mempergunakan kapal-kapal dari Parapat. Belanda rupanya mendaratkan beberapa jeep serta perlengkapan-perengkapannya di lapangan terbang Silangit. Dari sana mereka maju ke Balige lebih dulu, bukan ke Tarutung, mengakibatkan pasukan kita kucar-kacir karena datangnya dari belakang, di samping serangan dari Lumbanjulu yang telah dikuasai Belanda.

Kesatuan TNI Batalyon II sektor II pada waktu itu berdaerah di wilayah Toba dan Samosir. Kompi II dari Batalyon II itu dipimpin

oleh Letnan satu Boenga Simanungkalit bersama dengan satuan Markas Batalyon II di bawah pimpinan Kapten Law Pase menghadapi pasukan musuh. Selama tiga hari tiga malam terjadi pertempuran di Balige dan sekitarnya. Banyak korban jiwa dan harta benda. Penduduk kota Porsea, Laguboti dan Balige yang kira-kira dianggap berbahaya untuk tinggal di kota terpaksa mengungsi ke kampung-kampung yang sukar didatangi musuh.

Korban di pihak militer Belanda cukup besar, tetapi karena serangan-serangan udara yang selalu diadakan membabi buta mulai dari Lumbanjulu sepanjang jalan sampai Balige, maka tentara kita terpaksa menyingkir. Perahu motor musuh ada yang dapat dimusnahkan oleh TNI. Karena peralatan-peralatan modern yang cukup banyak maka semua kota kecil di wilayah Toba, Samosir dikuasai Belanda dan TNI bersama rakyat melakukan perang gerilya.

Setelah secara umum Belanda menguasai jalan raya dan kota-kota kecil dari Lumbanjulu sampai Balige maka Belanda dapat mengadakan gerak cepat memberi bantuan dari Parapat. Dalam keadaan ini pasukan Indonesia sering mengganggu iringan-iringan kendaraan-kendaraan tentara Belanda.

Sesudah daerah Toba maka menyusul daerah Humbang dimasuki oleh Belanda setelah pasukannya dapat melalui Sipintu-pintu dari darat dan Silangit dimanfaatkan. Kota Siborong-borong dijaga oleh Batalyon III. Sepanjang jalan menuju Siborong-borong terjadi pertempuran, tetapi pesawat-pesawat terbang yang melakukan pendaratan di Silangit membawa perlengkapan persenjataan yang cukup besar. Siborong-borong dan sekitarnya jatuh. Kesatuan Batalyon III mengerakkan perlawanannya bersama rakyat secara gerilya di daerah Humbang.

Setelah Humbang dianggap Belanda telah dikuasai dengan menduduki Siborong-borong maka pada tanggal 23 Desember 1948 tentara Belanda memasuki kota Tarutung. Perlawanan TNI dapat dikatakan dipatahkan karena tentara Belanda di kawal oleh pesawat terbang dan tentara kita tidak menghendaki pertempuran seru dalam kota. Hal itu dihindarkan untuk mengurangi korban dari rakyat yang tidak berdosa, apa lagi hari menjelang pesta Natal. Tarutung adalah tempat markas Komando TNI Sektor II di bawah pimpinan Mayor Liberty Malau. Banyak penduduk yang mengungsi keluar kota karena Belanda menyerang dan menembaki secara membabi buta dari udara.

Komandan Sektor II Mayor Liberty Malau terpaksa memindahkan

markas kearah Sipahutar – Pangaribuan. Daerah Silindung diserahkan untuk dikuasai oleh Ulisaut Nainggolan sebagai Komandan Batalyon I. Daerah Silindung dikuasai pada malam hari oleh TNI kecuali daerah pengawalan Belanda dan kota Tarutung.

Dengan mundurnya Batalyon I, II dan III serta Komando markas dari dalam kota, maka diaturlah cara-cara penyerangan dengan gerakan operasi taktik gerilya. Taktik seperti itu tak akan dapat dilaksanakan jika tidak ada kerja sama antara rakyat, tentara dan pemerintah sipil. Pemerintahan dan kemiliteran harus bahu membahu dengan rakyat. Hal itu memerlukan usaha penerangan agar rakyat tidak luntur semangatnya untuk tetap cinta akan kemerdekaan negara dan tanah air.

Begitu banyak peristiwa penting yang dihadapi. Operasi militer Belanda sering ke Markas Komando sektor II di Sipahutar dan Pangaribuan untuk mengobrak-abrik kekuatan TNI, tetapi berkat pengalaman-pengalaman dari Medan Area, menghadapi tentara sekutu, Jepang dan Perang Kemerdekaan I, tentara kita tidak terus luntur semangatnya walaupun terpaksa tinggal di hutan-hutan, kampung-kampung untuk tetap bergerilya. Rencana Belanda untuk menguasai dan mematahkan perlawanan rakyat dan TNI tidak berhasil. Dalam kota-kota yang didudukinya pun Belanda tidak aman apa lagi kalau malam hari. Jika mengadakan patroli ke kampung-kampung tidak sedikit perlawanan-perlawanan yang dihadapi jika tak dikawal pesawat terbang. Konvoi Belanda dari Sumatera Timur ke Tapanuli sering dihadang di tengah jalan dan sering terjadi tembak menembak.

Baik pemerintahan darurat dan komando militer di daerah Tapanuli bagian Utara dan Sumatera Timur bagian Tengah selalu mengadakan hubungan ke induk pasukan Territorium Sumatera di bawah pimpinan Kolonel Hidayat. Pada tanggal 23 Pebruari 1949 Kolonel Hidayat datang ke Pangaribuan dan menetapkan Mayor Liberty Malau menjadi Komandan Sektor II Sub Terr-VII dan daerahnya diperluas sampai daerah Sumatera Timur Tengah. Surat penetapan ini ialah Nomor X-Ad-24-29 tanggal 23 Pebruari 1949. Daerah yang termasuk daerah-militer II yang dikuasai Kesatuan TNI ex. Sektor II adalah :

1. Kabupaten Silindung,
2. Kabupaten Humbang,
3. Kabupaten Toba Samosir,
4. Kabupaten Simalungun,
5. Daerah Bedage sampai pantai laut selat Melaka.

Komandan Sektor II mengumumkan pada seluruh komandan-komandan kesatuan dan staf, Pemerintahan sipil dan kepolisian berlakunya penetapan tadi dan sekaligus diumumkan berlakunya Undang-Undang dalam keadaan perang.

Karena surat penetapan itu maka perlu dibentuk Batalyon II yang bertugas untuk memasuki daerah Sumatera Timur Tengah. Kesatuan Kompi II Batalyon II sektor II ditingkatkan dan dijadikan menjadi Batalyon IV. Letnan satu Boenga Simanungkalit menjadi Komandan Batalyon IV dan pangkatnya dinaikkan menjadi Kapten. Letnan satu C. Marbun bekas Kepala Intendans, persenjataan dan pengangkutan Brigade ex. Banteng Negara, ditetapkan menjadi wakil Komandan Batalyon IV merangkap Kepala Staf.

Batalyon IV diberi kepercayaan penuh sebagai Stoottroep Batalyon Sektor II segera memasuki daerah Sumatera Timur. Pada pertengahan bulan Maret 1949 tersusunlah kesatuan itu dan melalui Onan Runggu dan Simanindo di Samosir menyeberang bergelombang ke Kabupaten Simalungun. Pada bulan April 1949 seluruh pasukan telah tiba pada pos masing-masing yang telah ditentukan.

Kota Sibolga sebagai pusat Tapanuli Tengah diserang Belanda dari dua jurusan, yaitu dari laut pada tanggal 24 Desember 1948 dan dari darat yaitu dari Tarutung. Pada tanggal 24 Desember itu kota Sibolga dapat diduduki, karena Belanda memiliki persenjataan lebih modern dan dikawal oleh pesawat-pesawat.

TNI Sektor II Sub Terr-VII beserta Sektor-sektor yang bermarkas di Sibolga mundur keluar kota ke tempat-tempat yang telah ditentukan untuk mengatur siasat dan operasi perang gerilya. Sektor IV di bawah pimpinan Mayor M. Panggabean dipusatkan sekitar Bonandolok. Pasukan-pasukan sektor S di bawah pimpinan Mayor P. Simanjuntak yang diperkuat oleh Mobil Brigade pimpinan Komisaris Polisi Gultom ditugaskan menguasai jalan raya antara Sibolga dan Barus.

Sektor IV Batalyon I di bawah pimpinan Kapten Oloan Sarumpaet bertugas mengawasi jalan antara Sibolga Tarutung yang dibagi atas 8 pos-pos di bawah pimpinan Kapten Henry Siregar, Letnan Agus Marpaung, Letnan Sinta Pohan, Letnan Parlindungan, Letnan Pulungan, Rumi Letnan Bangun Siregar dan Kapten Sahala Hutabarat. Batalyon-II mengawasi jalan antara Sibolga dan Batang toru yang dibagi atas 5 pos, yaitu dipimpin masing-masing oleh Kapten Maruli Sitorus, Letnan C. Marpaung, Letnan Z. Tambunan, Letnan M. P. Lingga.

Markas Gubernur Militer Tapanuli/Sumatera Timur Selatan serta

markas Komando Sub Terr-VII dipindahkan ke daerah sekitar Sibolga dengan jarak 7 km saja yang terletak di daerah hutan bernama Rimba Amplu.

Di bagian Timur yaitu dari jembatan Pulo Raja dan jembatan Nagaga Belanda melancarkan serangan yang didahului oleh ruangan pesawat pemburu Mustang. Garis status quo diterobos oleh Belanda dengan menembak petugas di pos jembatan-jembatan itu. Daerah Labuhan Batu tidak hanya diserang dari darat, melalui jalan raya Pulo Raja ke Rantau Prapat, tetapi juga dari laut melalui Labuhan Bilik pada tanggal 19 Desember 1948.

Pasukan Belanda terdiri dari 1 kompi tentara gabungan Koninklijke Landmacht (KL), Koninklijke Nederlandsch Indische Leger (KNIL) dan Barisan Pengawal (BP) menduduki Pulo Raja. Pasukan yang dipersiapkan menyerbu ke Rantau Prapat datang dari arah Negeri Loba lengkap dengan berpuluh-puluh truk, tank, panzer dan lain-lain. Tiba di Aek Loba pasukan yang dipimpin oleh A. W. Pringgo menghadangnya dengan cara tembakan-tembakan gencar. Tetapi bagi Belanda hal itu tidak berarti, hingga mereka meneruskan saja perjalanan mengikuti jalan raya menuju Rantau Prapat melalui Aek Kanopan.

Di Mambang Muda dan Damuli pasukan kita yang dipimpin oleh Siddik tidak dapat berbuat apa-apa. Belanda terus maju melalui Merbau. Abdullah Musa dan Letnan Mansyur tak dapat mengadakan perlawanan yang berarti. Pasukan yang dipimpin oleh Ibrahim Pardede dari Batalyon IV Sektor I terpaksa mengundurkan diri ke Padang Matinggi setelah mengadakan perlawanan. Markas Batalyon dan anggota-anggota staf Batalyon pimpinan M. Sukud tidak dapat berbuat apa-apa setelah pesawat Mustang menjatuhkan granat beberapa kali.

Di Winfoot pasukan Letnan Sofyan Surbakti mencoba menghadang Belanda yang datang dari Labuhan Bilik, Negeri Lama dan berusaha mengadakan bumi hangus, tetapi gagal. Yang berhasil dipecahkan ialah tangki air. Kemudian pasukan mengundurkan diri keluar perkebunan Wingfoot dan ada yang ke Kotapinang, Tanjung Tiram. Kapten M. Sukardi, Kapten A. Manap Lubis dan Kapten Rami Bodho menuju ke Huta Godang. Kota Pinang dan Langa Payung jatuh pada tanggal 22 Desember 1948.

Setelah seluruh daerah Asahan dan Labuhan Batu diduduki, maka pasukan-pasukan Republik Indonesia mundur ke gunung-gunung. Pasukan-pasukan yang dulu ikut perang saudara di Tapanuli juga berkeompok-kelompok datang. Semua mereka itu mengatur siasat perang

gerilya dan bekerja sama dengan rakyat dengan mengadakan usaha perlawanan Rakyat Semesta (PRS).

Setelah Belanda dapat melalui jembatan Batangtoru dengan memasang jembatan bally maka pada tanggal 2 Januari 1949 sampailah ke Padangsidempuan. Untuk merebut Sipirok maka diadakan persiapan oleh Belanda. Serangan datang dari Padang Sidempuan, Tarutung, Gunungtua untuk mengepung Sipirok. Namun demikian tidak ada perlawanan karena pasukan kita telah menyingkir, Belanda menganggap pasukan-pasukan TNI tidak ada lagi yang berarti.

D. INTERAKSI DI DAERAH DENGAN BERBAGAI KEJADIAN BERSEJARAH TINGKAT NASIONAL.

Pada tanggal 16 Oktober 1945 diadakanlah Sidang Lengkap Pertama Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) di Jakarta. Ketua-nya ialah Kasman Singodimejo SH. Sidang pertama ini dihadiri oleh kebanyakan menteri-menteri presidetil kabinet dan wakil Presiden Drs. Mohammad Hatta. Sidang itu memutuskan bahwa sementara Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat belum terbentuk, maka dimintakan kepada Presiden supaya hak legislatip dipegang oleh KNIP. Sidang juga memperbincangkan tentang pembentukan Badan Pekerja untuk menjalankan tugas KNIP sehari-hari.

Maklumat Pemerintah Nomor X yang dikeluarkan oleh Wakil Presiden bertanggal 16 Oktober 1945 juga memutuskan bahwa KNIP disertai kekuasaan legislatip dan ikut menetapkan garis-garis besar haluan Negara.

Sidang Lengkap itu dilanjutkan lagi besok paginya yang dipimpin oleh J. Latuharhary, SH bertepatan dengan peringatan dua bulan Negara Republik Indonesia. Karena gentingnya keadaan, maka diangkat Sutan Syahrir sebagai Ketua Badan Pekerja dan Amir Syarifuddin, SH sebagai Wakil Ketua.

Di daerah Sumatera Utara hal itu disambut baik dan dibentuklah Komite Nasional Daerah sampai tingkat Kecamatan untuk mendampingi pemerintah setempat. Pembentukan Komite-komite itu disesuaikan dengan partai yang ada, karena sesudah tanggal 3 Nopember 1945 dianjurkan oleh Wakil Presiden agar rakyat membentuk partai-partai asal saja partai-partai itu memperkuat perjuangan dan mempertahankan kemerdekaan.

Dalam perjalanan sejarah sesudah Pemerintah Republik Indonesia pindah ke Jogjakarta maka ada golongan yang mau memaksakan ke-

hendaknya itu tidak dianggap ditanggapi oleh pemerintah maka ada usaha untuk menumbangkan pemerintahan Syahrir kedua. Bekas Menteri Luar negeri pada zaman Kabinet – Presidentil yang dibentuk tanggal 5 September 1945, yaitu Akhmad Subarjo, SH ditahan di Jogjakarta pada tanggal 5 Maret 1946. Subarjo bersahabat dengan Tan Malaka yang telah ditahan beserta sahabat-sahabatnya pada minggu sebelumnya.

Sehubungan dengan penahanan Tan Malaka secara resmi Menteri Pertahanan Amir Syarifuddin dan Menteri Dalam Negeri Dr. Sudarsono mengeluarkan maklumat yang berisi antara lain bahwa Pemerintah perlu mengambil tindakan tegas kepada siapa pun yang dianggap mengadakan perpecahan, menyiarkan berita-berita bohong yang dapat menggelisahkan rakyat serta kepada orang-orang yang menghambat usaha dalam penyempurnaan pertahanan negara.

Khusus di Medan diterangkan oleh Mr. Amir Syarifuddin mengenai penangkapan Tan Malaka bahwa, waktu ini perjuangan Negara Republik Indonesia ditujukan kepada susunan negara, hingga ia mendapat pengakuan luar negeri. Untuk itu Negara Republik Indonesia - perlu kuat, satu, dan mempunyai pemerintahan yang berkuasa. Tidak boleh ada kekuasaan lain, negara dalam negara. Karena Persatuan Perjuangan (PP) di Pulau Jawa melakukan oposisi di luar garis yang loyal, maka terjadilah penangkapan itu.

Dengan keterangan di atas maka pemerintah dan rakyat di Sumatera Utara mengerti peristiwa yang terjadi di pusat. Karena cinta kepada kemerdekaan dan pemerintah maka Sumatera Utara tunduk kepada kebijaksanaan pemerintah.

Rupanya situasi makin hari makin memuncak hingga pada tanggal 27 Juni 1946 waktu rombongan Sutan Syahrir menginap di Solo mereka diculik oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Turut serta diculik ialah Ir. Darmawan sebagai Menteri Kemakmuran, Ulfah Santoso, SH sebagai Menteri Sosial. Presiden Sukarno mengumumkan negara dalam keadaan bahaya pada tanggal 28 Juni 1946. Presiden Sukarno minta agar supaya dikerahkan tenaga rakyat Indonesia untuk memerdekakan Perdana Menteri dan anggota-anggota kabinetnya yang diculik itu. Syukurlah bahwa pada tanggal 1 Juli 1946 jam 4.00 pagi Syahrir, Darmawan, Dr. Sumitro, Jendral Mayor Sudibyo dilepaskan.

Rupanya keadaan bukan reda, malah pada tanggal 3 Juli terjadilah peristiwa yang terkenal itu yang disebut “Peristiwa 3 Juli 1946”. Jenderal Mayor Sudarsono mengadakan perebutan kekuasaan di Jog-

jakarta. Presiden dipersilakan menanda tangani daftar menteri baru. Komplotan ini yang sebenarnya dipimpin oleh Tan Malaka dapat digagalkan.

Peristiwa 3 Juli 1946 tidak mengurangi semangat rakyat dan tentara di Sumatera Utara, bahkan mempertebal rasa persatuan untuk mempertahankan kemerdekaan.

Sesudah pada tanggal 15 Nopember 1946 di Jakarta diparaf rencana persetujuan oleh delegasi Indonesia dan Belanda maka diadakanlah perundingan-perundingan selanjutnya. Akhirnya pada tanggal 25 Maret 1947 Perjanjian antara Belanda dengan Indonesia ditanda tangani. Perjanjian itu terkenal dengan nama Perjanjian Linggajati. Dari pihak Belanda dan dari pihak Indonesia ada juga yang tidak setuju.

Di Sumatera Utara diharapkan dengan adanya persetujuan itu Belanda tidak mengadakan gangguan-gangguan terhadap pemerintahan dan pasukan-pasukan Indonesia. Harapan itu tidak terlaksana karena Belanda dalam hati kecilnya tetap mau menghapuskan Republik Indonesia. Terjadilah perbedaan-perbedaan pendapat atas pasal-pasal persetujuan itu dan akhirnya menjurus pada adu senjata.

Demikianlah garis demarkasi yang telah ditetapkan bersama dilanggar oleh Belanda dengan melancarkan aksi militernya pada tanggal 12 Juli 1947 di seluruh front termasuk di Sumatera Utara.

Sesudah Belanda melancarkan aksi militernya, yang menurut perkiraannya akan segera menghancurkan Republik, maka nampak kegigihan rakyat dan pasukan kita untuk mempertahankan kemerdekaannya. Walaupun banyak kota-kota diduduki, tetapi Belanda tidaklah aman, karena selalu diserang oleh pasukan Republik Indonesia.

Pada tanggal 17 Januari 1948 atas usul Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB) diadakanlah persetujuan yang menghendaki perselisihan Indonesia Belanda diselesaikan dengan jalan perundingan. Persetujuan itu terkenal dengan nama "Persetujuan Renville". Dengan adanya perjanjian itu maka walaupun dengan rasa mendongkol tentara-tentara kita mundur sampai garis yang ditetapkan. Garis batas antara kekuasaan Republik dan Belanda itu disebut garis *status quo*. Belanda selalu berusaha memancing kericuhan setiap pos penjagaan mereka yang berhadapan dengan pos penjagaan Republik. Pasukan kita tetap waspada dan patuh kepada instruksi dari pusat. Belanda sering melanggar isi perjanjian itu.

Sewaktu Pemerintah Indonesia makin berkurang dengan kekuasa-

annya, pengalaman pahit yang tidak diinginkan terjadi. Sedang sibuk-sibuknya pemerintah untuk mengadakan konsolidasi maka terjadilah Pemberontakan PKI tahun 1948 di Madiun. Pemberontakan itu kemudian diketahui orang dipimpin oleh Muso cs. Pemberontakan itu seolah-olah melapangkan jalan bagi Belanda untuk menguasai daerah Republik.

Di Sumatera Utara tidak ada pengaruhnya, dan partai komunis tidak mendapat tempat di kalangan rakyat. Dalam melaksanakan maksudnya Belanda selalu berusaha untuk melemahkan Republik Indonesia. Untuk itu Van Mook selalu berusaha agar satu daerah dengan daerah lain bentrokan, dan di bidang militer diusahakan lewat kaki-kaki tangannya agar lasykar yang satu berselisih satu dengan lainnya. Politik *divide et impera* Belanda selain dalam bidang yang telah disebut di atas juga terjadi dalam bidang politik.

Setelah agresi Belanda yang pertama dan sebahagian daerah di Sumatera Timur dikuasainya terkecuali Labuhan Batu dan sebahagian daerah Langkat maka mulailah Belanda menyusun usaha untuk memperkecil wilayah Republik Indonesia Di Sumatera Utara.

Antek-antek Belanda seperti yang telah diuraikan pada bahagian sebelumnya mengadakan suatu demonstrasi dan pawai untuk memintakan suatu Daerah Istimewa bagi Sumatera Timur. Sebagai pelopor dalam hal ini adalah bekas-bekas tokoh-tokoh **Comite van Ontvangst dan PADI, PARDIST.**

Demonstrasi itu diadakan di depan, **Recomba Sumatera Timur**, yaitu Dr. J. J. van de Velde untuk menuntut segera tuntutan mereka itu dilaksanakan. **RECOMBA** kepanjangannya adalah **Regering Com-misaris Bestuur Aangelepenheden** yaitu sebagai pelaksana pemerintahan di daerah. Di daerah yang berkedudukan sebagai kabupaten ditempatkannya seorang pejabat yang disebut **Plaatselijke Bestuur Ab-tenaar** atau **PBA.**

Dengan adanya demonstrasi yang telah diatur kian maka kemudian lahirlah Negara Sumatera Timur sebagai keputusan dari van Mook wakil dari pemerintah Belanda. Sebagai Wali Negara Sumatera Timur itu ialah Dr. Mansyur, dan di dalamnya duduk di antaranya Mr. Bahriun, Mr. T. Zulkarnain, Ngerajai Meliala, Kaliasyah Sinaga, F. Lalisang sebagai pimpinan dari beberapa lembaga dalam negara boneka itu.

Dengan tindakan Belanda itu maka mereka berusaha meniadakan Republik Indonesia di Sumatera Timur. Walaupun demikian para pencinta Republik Indonesia yang berdiam di Medan tidak tinggal diam.

Kaum Republikein mencemoahkan negara boneka itu malahan mereka tidak mau bekerja sama dengan NST. Mereka inilah yang disebut kaum Republikein. Kaum Republikein ini malah membentuk Front Nasional di daerah pendudukan Belanda ini untuk mengimbangi hasutan Belanda itu. Pimpinan Front Nasional ini adalah Sugondo Kartoprojo, Dr. Jabangun dan berkedudukan di Medan. Di kota-kota besar di Sumatera Timur dibentuk pula front nasional yang sama. Di samping badan ini di kota Medan juga terdapat Surat Kabar yang menyuarakan suara Republik yaitu Mimbar Umum yang dipimpin oleh Arif Lubis dan Waspada yang dipimpin oleh Mohd. Said. Perlunya media ini adalah untuk mengimbangi propaganda Belanda melalui negara bonekanya Sumatera Timur dengan media seperti Neraca dan Sinar Siantar yang dipimpin oleh Tengku Yafizham.

Pembentukan Negara Sumatera Timur ternyata tidaklah merupakan suatu aspirasi rakyat di daerah ini karena nanti dapat kita lihat betapa sikap rakyat menentang negara itu dan meminta segera dibubarkan setelah terjadinya pengakuan kedaulatan pada 27 Desember 1949. Untuk memperlihatkan bagaimana Belanda ingin mengadudomba di Sumatera Timur ini antara lain pembentukan Blau Pijper yang dipimpin oleh Jomat Purba. Di daerah perkebunan mereka membentuk pula **Ordenemings Bewakers** sebagai pengawal perkebunan. Kedua pasukan ini hendak dijadikan sebagai perisai untuk menghadapi pasukan-pasukan Indonesia.

E. PERJUANGAN MASYARAKAT PADA BERBAGAI BIDANG KEGIATAN DAN KEHIDUPAN

1. Tata Pemerintahan

Sesudah selesai sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia kembalilah Mr. Teuku Mohammad Hasan dan sampai di Medan pada tanggal 29 Agustus 1945 bersama-sama dengan Dr. M. Amir. Mereka berdua diinstruksikan dari Jakarta untuk menyebar luaskan proklamasi serta menyelenggarakan segala sesuatu yang sehubungan dengan itu di Sumatera. Mereka menghubungi Dr. A.K. Gani di Palembang, Dr. Sagaf Yahya di Jambi, Adinegoro di Bukittinggi dan Dr. Ferdinand Lumbantobing di Tarutung dan maksud agar turut berpartisipasi dalam pelaksanaan instruksi tersebut di atas.

Sesuai dengan terbentuknya Komite Nasional tanggal 22 Agustus, maka Presiden mengumumkan pada hari berikutnya untuk membentuk Komite Nasional di daerah-daerah. Mr. Teuku Muhammad Hasan dan Dr. M. Amir mengundang pemuka-pemuka masyarakat di kota

Medan untuk maksud menjelaskan proklamasi dan pembentukan Komite Nasional di daerah. Usaha mereka tak berhasil, karena ada di antara pemuka-pemuka masyarakat itu yang bersifat ragu-ragu, bahkan ada yang sebenarnya anti, karena telah lebih dulu mendirikan satu panitia penyambutan terhadap Belanda. Panitia itu disebut *Comite van Ontvangst*. Logika mereka ialah, bahwa Belanda akan kembali menjajah di Indonesia.

Keragu-raguan di kalangan pemuka masyarakat itu juga disebabkan masih tampak Jepang berkuasa menurut pengamatan mereka ditambah lagi dengan tibanya wakil tentara Sekutu. Memang pada ketika itu tidak jelas diketahui oleh rakyat apa tugas tentara Sekutu itu.

Comite van Ontvangst yang akan mempersiapkan segala sesuatu untuk menerima kedatangan Belanda itu diorganiser oleh orang-orang yang dulu bergabung dalam gerakan dibawah tanah sewaktu Jepang. Mereka bergabung dalam "Persatuan Sumatera Timur (PST) dan "Siap Siaga" (SS). Banyak anggotanya dari keluarga raja-raja.

Pemuda-pemuda dan lapisan masyarakat merasa gelisah. Mereka tak sabar lagi kapan realisasi kemerdekaan itu segera diwujudkan. Pada tanggal 17 September berlangsungnya pertemuan di gedung Tsyu Sangi Kai Sumatera Timur. Hadir pada ketika itu pemimpin-pemimpin rakyat, Sultan dan Raja, serta pemuka-pemuka masyarakat lainnya. Pertemuan itu hanya menghasilkan pembentukan "Panitia Kebangsaan" yang bergerak di bidang sosial.

Keinginan bertanggung jawab terhadap kemerdekaan Indonesia, maka para pemuda Indonesia di Medan mengadakan pertemuan Fuji Dori 6 (Dirga Surya sekarang) untuk menyusun Barisan Pemuda Indonesia. Barisan itu bertekad untuk menegakkan Proklamasi dengan pertaruhan segenap jiwa raga. Karena banyak persoalan yang dihadapi, maka baru pada tanggal 30 September 1945 BPI diresmikan dengan Pak Gondo sebagai Ketua Umum, Ketua I ialah Achmad Thahir, Ketua II ialah Abdul Malik Munir dan sebagai Sekretaris Umum ialah M.K. Jusni.

Pada pertemuan selanjutnya di Jalan Ampelas gedung Taman Siswa, hadir juga pemuka-pemuka masyarakat yang melahirkan ikrar untuk menaikkan sang saka Merah Putih dan mempertahankan Indonesia Merdeka.

Secara resmi pemerintah Republik Indonesia di Sumatera diumumkan oleh Teuku Mohammad Hasan pada tanggal 3 Oktober. Mr. Teuku

Mohammad Hasan telah diangkat pada tanggal 29 September sebagai Gubernur Sumatera serta Dr. M. Amir sebagai Wakil Gubernur. Pada hari itu juga (3 Oktober) diangkat Residen-residen dan staf Gubernur.

Pada hari berikutnya dilaksanakanlah pengibaran bendera Merah Putih di lapangan **Esplanade** (Lapangan Merdeka sekarang). Jepang menghalangi penaikan bendera itu, tetapi dapat juga diatasi. Di gedung-gedung instansi-instansi pemerintahan yang telah direbut dari Jepang-pun dilakukan pengibaran bendera Merah Putih. Selanjutnya diadakan pawai menyambut kemerdekaan pada tanggal 6 Oktober 1945.

Sesudah pemerintahan kota Medan direbut, maka Wali Kota Mr. Luat Siregar memindahkan pusat pemerintahan kota ke **Cremer Weg 6**. Di daerah-daerah Sumatera Utara berlangsung pertumbuhan pemerintahan itu dengan mengalami berbagai perjuangan.

Di Sumatera Timur pada mulanya diangkatlah Mr. Mohd. Yusuf sebagai Residen. Dalam keresidenan Sumatera Timur ada beberapa kesultanan dan kerajaan-kerajaan. Sultan dan raja memerintah secara otokrat sedangkan Republik menghendaki pemerintahan dijalankan berdasarkan sistim demokrasi. Dengan demikian ada dua sistem pemerintahan di Sumatera Timur. Tetapi hal itu tidak dapat dipertahankan. Harusnya pemerintahan bersifat demokrasi.

Untuk menyelesaikan persoalan itu Gubernur mengadakan pendekatan bersama Residen. Langkah pertama nampak cerah setelah pada tanggal 9 Nopember 1945 Langkat mengibarkan Merah Putih yang disusul Asahan pada tanggal 14 Nopember 1945.

Akhirnya pada bulan Januari 1946 diadakan rapat antara Komite Nasional yang sudah berdiri dengan Gubernur Mr. Teuku Mohammad Hasan bersama-sama dengan sultan-sultan dan raja-raja serta Residen Sumatera Timur, Tengku Hafas dan Mr. Mohd. Yusuf yang telah menjadi Residen diperbantukan di kantor Gubernur. Dalam rapat itu diputuskan supaya dalam waktu yang singkat semua menjalankan pemerintahan berdasarkan sistim demokrasi. Rupanya keputusan rapat itu tidak dijalankan oleh Raja-raja dan Sultan-sultan, bahkan mereka berusaha mempertahankan kedudukannya dengan menyusun kekuatan bersenjata. Disamping itu mereka membentuk organisasi **Perkumpulan Anak Deli Islam (PADI)**. Di Langkat, Serdang, Asahan dibentuk kekuatan-kekuatan bersenjata untuk melindungi raja.

Karena hal itu diketahui oleh rakyat dan pemuda, maka di beberapa tempat diadakan tindakan terhadap mereka. Hal ini kemudian menjurus pada pergolakan rakyat sejak tanggal 4 Maret di Sumatera

Timur untuk menumbangkan kekuasaan raja-raja, sultan-sultan dan kaum feodal. Banyak keluarga-keluarga Sultan dan raja-raja yang dibunuh. Pergolakan itu melalui organisasi-organisasi rakyat dan pemuda dan di sebut revolusi sosial.

Pada waktu terjadi revolusi itu Gubernur sedang mengadakan keliling di Sumatera. Dr. M. Amir bertindak sebagai wakil Gubernur di Medan dan mengangkat M. Junus Nasution sebagai Residen Sumatera Timur.

Akibat gentingnya suasana, maka pada tanggal 13 Maret 1946 pemerintahan sipil di Sumatera Timur dibubarkan dan diganti dengan pemerintahan militer di bawah Mahruzar atas pemilihan Komandan Divisi.

Sesudah Gubernur kembali di Medan maka diambil langkah-langkah untuk mengatur kembali pemerintahan sipil. Akhirnya terbentuklah pemerintahan sipil itu pada tanggal 25 Maret 1946 di Sumatera Timur.

Di Tapanuli disusun pemerintahan Republik berpusat di Tarutung sebagai ibu kota keresidenan, setelah mengetahui Jepang telah kalah dan adanya proklamasi kemerdekaan, maka dibentuklah Badan Keselamatan Rakyat (BKR). Pemimpin-pemimpin antara lain ialah Dr. Ferdinand Lumbantobing, Sutan Naga, Abdul Hakim, Mr. Furinus Lumbantobing, Mr. H. Silitonga dan Dr. Luhut Lumbantobing. Badan yang didirikan itu pada mulanya bermaksud untuk menjual barang-barang kebutuhan rakyat yang diambil dari peninggalan-peninggalan Jepang. Cabang-cabangnya ada didaerah-daerah kabupaten.

Di Tapanuli Selatan berdiri sebuah badan yang diketuai oleh Raja Junjungan pada tanggal 8 September 1945. Pusatnya di Padang Sidempuan. Badan itu merupakan panitia yang mendapat mandat dari seluruh Tapanuli Selatan untuk membentuk pemerintahan dan Komite Nasional Indonesia dilaksanakan di Tarutung. Alasannya ialah bahwa di sanalah kedudukan Residen dan pemimpin terkemuka tinggal di sana.

Badan tadi mengutus Hamzar Lubis pergi ke Bukittinggi menjumpai pemimpin-pemimpin yang ada disana. Diperoleh dari mereka itu keterangan yang jelas mengenai proklamasi. Teks proklamasi itu pun ada dibawa bersama dengan teks Undang-Undang Dasar.

Rombongan dari Tapanuli Selatan yang dipimpin oleh Raja Junjungan ialah Kari Usman dan Fakhrudin Nasution. Mereka tiba

di Tarutung pada tanggal 12 September 1945. Mereka ikut dalam rombongan demonstrasi pemuda di Tarutung ke kantor Tyokan (Residen) untuk menuntut supaya Jepang menyerahkan pemerintahan kepada Republik Indonesia.

Di Tarutung terjadilah perundingan antara rombongan dari Tapanuli Selatan dengan pemimpin-pemimpin BKR. Raja Junjungan yang membawa mandat dari rakyat Tapanuli Selatan beserta pemimpin-pemimpin BKR memutuskan untuk mengangkat Abdul Hakim sebagai formatur KNI. Dengan kata sepakat lahirlah KNI dan badan-badan yang sudah ada dibubarkan termasuk BKR.

Sesuai dengan pengumuman pemerintah propinsi Sumatera oleh Gubernur Mr. Teuku Mohd. Hasan pada tanggal 3 Oktober, Dr. Ferdinand Lumbantobing diangkat menjadi Residen Tapanuli. Pengangkatan itu diterima di Tarutung. KNI pada hari itu secara resmi mengumumkan proklamasi di tiap daerah Kewedanaan melalui rapat umum sampai ke kecamatan. Dalam setiap rapat umum berkibirlah sang saka Merah Putih dengan megahnya yang disambut oleh penduduk dengan rasa gembira.

Pembentukan KNI di daerah kecamatan pun dilakukan. Terbentuk barisan-barisan pemuda. Mula-mula terbentuklah Pesindo. Sesudah itu terbentuklah Badan Keamanan Rakyat.

Di Tapanuli dibentuk satu badan yang mengurus hal-hal yang berhubungan pembiayaan aparat pemerintahan dan segala sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan itu. Badan itu dinamai Fonds Kemerdekaan yang berdiri pada tanggal 15 Oktober 1945.

Pemerintah Tapanuli mengadakan lagi suatu rapat umum untuk memperingati tiga bulan hari Proklamasi. Penduduk berduyun-duyun datang ke Tarutung dari segala sudut dengan jalan kaki untuk ikut mendengar pidato-pidato para pemimpinnya. Hal yang serupa terjadi juga di tiap Kewedanaan dan Kecamatan di seluruh Tapanuli. Rakyat mengucapkan ikrar setia kepada pemerintah Republik Indonesia.

Pemerintahan di Tapanuli berjalan dengan baik, karena tidak seperti di Sumatera Timur yang selalu diganggu oleh Sekutu dan Belanda. Keadaan semacam itu membuat pemerintahan di Tapanuli dapat tersusun dengan baik sampai bulan Januari 1946.

Sedikit menjadi masalah di Tapanuli, ialah kedudukan kepala-kepala Kuria di Tapanuli Selatan, kepala-kepala Negeri di Tapanuli Utara. Kedudukan mereka turun temurun yang diakui oleh Belanda. Mere-

ka disorot oleh rakyat dan tidak diberi kekuasaan lagi. Lain halnya dengan di Sumatera Timur, mereka dengan rela mengundurkan diri. Sebagai pengganti dibentuklah Dewan Negeri yang dipilih oleh rakyat secara demokratis. Demikian juga diadakan pemilihan Kepala Kampung menurut kemampuan.

Aturan-aturan pemilihan dikeluarkan oleh Residen dengan surat ketetapan Nomor 274 tanggal 14 Maret 1946. Aturan itu diperkuat lagi tanggal 11 Januari 1947 Nomor 1/DPT. Isi aturan itu antara lain ialah memberi hak memilih bagi warga negara Republik Indonesia yang telah dewasa laki-laki dan perempuan.

Nias dan pulau-pulau sekitarnya agak terpencil dari Sumatera. Kabar mengenai proklamasi tidak segera diketahui di sana. Yang diketahui sejak tanggal 21 Agustus ialah bahwa Jepang sudah kalah dan akan digantikan oleh suatu pemerintahan baru. Hal itu diketahui dari surat-surat selebaran yang dijatuhkan di sana. Surat-surat selebaran itu ditandai tangani oleh *van Mook*. Berita itu dibantah oleh Jepang pada mulanya. Baru pada tanggal 30 Agustus pembesar Jepang di sana mengumumkan bahwa Jepang telah meletakkan senjata. Dinyatakan bahwa pegawai sipil Jepang akan meninggalkan Nias. Pemerintahan diserahkan kepada D. Marunduri.

Berita mengenai kemerdekaan barulah awal Oktober diketahui rakyat secara resmi sesudah Residen Tapanuli mengirim kawat ke sana. Yang diangkat menjadi kepala *afdeeling* (dikepalai oleh seorang asisten residen) ialah D. Marunduri. D. Marunduri menerima pengangkatan itu dan mengatakan setia pada pemerintah Republik Indonesia bersama rakyat Nias.

Untuk menyambut kemerdekaan itu maka diadakanlah upacara pada tanggal 8 Oktober. Disusunlah pemerintahan dan KNI pada tanggal 13 Oktober 1945. Pengurus KNI ialah P.R. Telaumbanua sebagai Ketua I, R. K. Prawirodinoto sebagai Ketua II dan S.L. Marbun sebagai Sekretaris I.

Partai-partai yang waktu Jepang dibekukan hidup kembali. Ketua-ketua partai politik ini diikuti sertakan oleh KNI jika ada rapat.

Pemerintahan di Nias mengalami sedikit gangguan, karena pada kira-kira tanggal 16 Nopember 1945 ada seorang Jepang datang ke Nias. Maksudnya ialah untuk mengambil kekuasaan sebagai pemerintah yang kelak akan diserahkan kepada pemerintah di bawah Sukarno-Hatta. Namun demikian ia tidak berhasil dan diusir dari Nias.

Pembentukan KNI di tiap Kecamatan berjalan lancar dan demiki-

an juga KNI di tiap-tiap Ori.

Pemerintahan di Nias sama seperti di Tapanuli berjalan dengan baik sampai perjanjian Linggajati dan agresi Militer Belanda ke II. Peristiwa yang penting dalam sejarah Sumatera Utara terutama dalam perkembangan pemerintahan sipilnya ialah keputusan dari sidang DPR propinsi Sumatera pada tanggal 17 April 1946 yang menetapkan bahwa propinsi Sumatera dibagi atas sub propinsi yaitu : Utara, Tengah dan Selatan. Yang termasuk sub Propinsi Sumatera Utara ialah Aceh, Tapanuli dan Sumatera Timur. Ini adalah suatu permulaan dari pembentukan dari propinsi Sumatera Utara. Sebagai kepala dari sub propinsi Sumatera Utara ini diangkat Mr. Muhammad Amin sebagai Gubernur Muda.

Selanjutnya karena situasi yang semakin gawat dan terjadi agresi Belanda yang kedua, dan daerah-daerah Republik Indonesia sebahagian diduduki oleh Belanda seperti Sumatera Timur (sebahagian Langkat, Tanah Karo, Simalungun dan Asahan) maka lahirlah keputusan wakil Presiden Muhammad Hatta yang waktu itu berada di Bukit Tinggi No. 1/BKP/11/47 yang isinya mengangkat Tengku Daud Berueh sebagai Gubernur Militer untuk Aceh, Langkat dan Tanah Karo dan ketetapan tanggal 23 September menetapkan Dr. Gindo Siregar sebagai Gubernur Militer Tapanuli dan Sumatera Timur bahagian Tengah dan Selatan. Mereka diberikan pangkat Mayor Jenderal Tituler.

Dengan putusan ini maka kordinasi menjadi lebih baik karena waktu itu keadaan wilayah Sumatera Utara menjadi terputus-putus, akibat agresi Belanda itu. Dengan adanya kedua pejabat baru itu maka roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Para Bupati atau Residen yang daerahnya diduduki dapat juga melakukan tugasnya di daerah yang berdekatan dengan wilayah kekuasaannya. Misalnya untuk melaksanakan tugas-tugas keresidenan. Residen Sumatera Timur berada di Rantau Prapat. Setelah persetujuan Renville dan ditetapkan status quo, yaitu batas wilayah antara kekuasaan Republik dengan Belanda di Sumatera Utara maka berdasarkan keputusan Presiden dengan ketentuan undang-undang nomor 10 tahun 1948 tanggal 15 April 1948 menjadikan Sumatera menjadi 3 propinsi sehingga Sumatera Utara sekarang syah sebagai propinsi tersendiri dengan Mr. Muhammad Amin sebagai Gubernur.

Setelah pembentukan Propinsi Sumatera Utara Pemerintah segera pula membentuk Dewan Perwakilan Daerah Propinsi Sumatera Utara yang pertama sekali. Karena situasi daerah-daerah Sumatera Timur yang sebahagian besar diduduki Belanda dan daerah Tapanuli

menurut pertimbangan tidak cocok maka Sidang DPR Propinsi Sumatera Utara pertama diadakan di Tapak Tuan yaitu daerah Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 13 Desember 1948. Sebagai Utusan dari Sumatera Timur ialah Xarim M. S. sebagai ketua rombongan dan dari Tapanuli Abdul Hakim sebagai ketua rombongan. Anggota DPR propinsi itu berjumlah 45 orang merupakan wakil dari partai-partai politik yang ada di Sumatera Utara. Tetapi yang hadir hanya sebanyak 23 orang saja kemungkinan karena perhubungan yang kurang baik. Keputusan sidang yang penting antara lain memilih Badan pekerja DPR Sumatera Utara dan Kotaraja dipilih sebagai ibu kota propinsi untuk sementara.

2. Keadaan Sosial Ekonomi.

Keadaan sosial dan perekonomian di Sumatera Timur dan Tapanuli sejak masa agresi pertama sampai kepada agresi Belanda yang kedua sangat bertautan sekali dengan perjuangan dari bangsa Indonesia yang sedang mempertahankan kemerdekaannya.

Suasana di pedesaan boleh dikatakan sangat sederhana. Kegiatan-kegiatan pertanian dan perdagangan berlangsung sebagaimana biasa, dan para nelayan tetap turun kelaut. Kegiatan perdagangan di kota-kota yang dikuasai Republik Indonesia dilakukan para pedagang-pedagang Cina. Melalui pelabuhan-pelabuhan Tanjung Balai Sibolga dan Labuhan Bilik terjadi Barter dengan Malaya dan Singapura. Walaupun Belanda melakukan **blokade** yang ketat barang-barang yang dibutuhkan untuk rakyat masih dapat didatangkan seperti tekstil dan obat-obatan. Jadi keadaan perekonomian lebih baik dari pada zaman Jepang. Tetapi untuk kebutuhan pangan memang menghadapi kesulitan karena Sumatera Timur yang terkenal sebagai daerah perkebunan tidak menghasilkan beras. Karena itu kebutuhan beras didatangkan dari daerah Aceh dan Tapanuli. Hal ini pun agak seret karena perhubungan melalui darat tidak dapat lancar karena mobil-mobil mengalami kesulitan akan bahan bakar.

Tidak mengherankan banyak juga di daerah-daerah yang tidak ada sawah penduduk memakan ubi atau bahan makanan yang lain. Walaupun demikian semangat penduduk untuk membantu perjuangan kemerdekaan tidak kendor. Untuk kebutuhan perlengkapan tentara oleh John Lee seorang keturunan Cina dan menjadi anggota ALRI sering dilakukan penerobosan **Blokade** Belanda dan usahanya ini sangat berhasil sehingga perlengkapan pasukan Indonesia dapat terjamin. John Lee sekarang telah pensiun sebagai Laksamana Madya dan jasanya sangat

banyak bagi kegiatan ALRI di Sumatera Utara waktu masa perang Kemerdekaan.

Mengenai keadaan penduduk di daerah yang dikuasai Republik atau juga disebut pedalaman boleh dikatakan padat karena penduduk dari kota-kota di Sumatera Timur mengadakan pengungsian ke daerah tersebut. Rantau Prapat, Padang Sidempuan dan Tarutung setelah agresi Belanda menjadi tempat penampungan-penampungan dari pengungsi. Di kota-kota tersebut dibentuk panitia-panitia untuk mengurus masalah pengungsi itu dan para pengungsi itu mendapat santunan dari pemerintah Republik Indonesia. Tetapi setelah agresi Belanda kedua banyak para pengungsi itu yang kembali ke daerah pendudukan Belanda karena hampir seluruh wilayah Republik Indonesia di Sumatera Utara dikuasai Belanda. Kembalinya pengungsi-pengungsi itu ke wilayah Belanda itu sangat terasa menyulitkan mereka karena banyak tempat kediaman mereka yang dahulu telah habis terbakar dan kalau pun ada rumahnya telah didiami oleh orang-orang Cina. Lapangan pekerjaan tidak ada dan mereka tetap pada prinsip mereka tidak ingin untuk bekerja dengan Belanda. Selain dari pada itu mereka juga menjadi intaian dari dinas rahasia Belanda karena dianggap pro kaki tangan Republik. Banyak diantara mereka itu yang ditangkap dan disiksa oleh NEFIS. (Badan inteligen Belanda).

Untuk mengatasi kesulitan akan mata uang sebagai alat pembayaran maka atas inisiatip pemerintahan propinsi Sumatera yang berkedudukan di Pematang Siantar pada masa sekitar tahun 1946 dicetak uang Republik Indonesia Sumatera Sementara atau disingkat dengan ORIPS. Selain dari pada itu pemerintah juga mengeluarkan suatu obligasi melalui Bank Negara untuk membiayai Pemerintah. Sejak agresi Belanda pertama dimana kordinasi dan hubungan antara pemerintahan propinsi Sumatera yang telah dipindahkan ke Bukittinggi maka pada tiap daerah telah pula dicetak uang ORITA, ORLAB yaitu Uang Republik Indonesia Tapanuli, Uang Republik Indonesia Labuhan Batu dan banyak lagi yang lain-lainnya. Malahan untuk mengatasi keadaan yang gawat dalam pembayaran itu pernah pula distensil uang Bon. Semuanya ini dijalankan untuk mengatasi kebutuhan-kebutuhan yang mendesak demi untuk berhasilnya perjuangan kemerdekaan Indonesia itu.

Di daerah pendudukan Belanda keadaan perekonomian memang agak baik karena mereka mempunyai hubungan dengan luar negeri. Barang-barang pangan cukup dan penduduk ada sebahagian yang diberikannya bahan makanan melalui catu atau distribusi. Ini mungkin se-

bagai propaganda mereka untuk menarik penduduk agar berpihak kepada mereka. Walaupun demikian penduduk yang berjiwa Republikein tidak hendak menerima pemberian dari Belanda yang demikian. Dari daerah pendudukan ini para pendatang kemudian secara menyelundup dapat pula membawa barang-barang yang penting seperti obat-obatan ke daerah yang dikuasai Republik. Oleh karena adanya kontak-kontak antar daerah pendudukan Belanda dengan daerah Republik keadaan sosial di daerah Republik tidaklah begitu parah. Karena itu Republik Indonesia terus hidup dan berkembang walaupun Belanda terus menerus melakukan suatu rongrongan. Faktor ini juga merupakan suatu ketidak berhasilan Belanda untuk melikuidasi Republik Indonesia di Sumatera Utara.

3. Keadaan Sosial Budaya.

Dalam kehidupan Sosial Budaya boleh dikatakan mencerminkan suatu keadaan dalam suasana perjuangan kemerdekaan. Lagu-lagu dan sandiwara mengemukakan dan mengumandangkan perjuangan kemerdekaan. Lagu-lagu perjuangan terdengar di sana-sini dilagukan oleh anak-anak yang didengar mereka dari siaran RRI maupun yang dipelajari di sekolah-sekolah. Jiwa perjuangan meresap dalam jiwa setiap orang pada waktu itu dan di mana-mana terdengar pekikan merdeka sebagai salam setiap pertemuan antara seorang dengan yang lain. Setiap para pejuang yang pergi atau pulang dari garis depan disambut oleh rakyat dengan berbagai upacara. Ini membuktikan rakyat turut bahu-membahu dalam perjuangan kemerdekaan itu. Para Seniman seperti Lili Suhairy menciptakan lagu-lagu Perjuangan yang tidak kalah pentingnya untuk menggelorakan masyarakat yang pada waktu berada menghadapi Belanda. Pada beberapa tempat seperti di Pematang Siantar diadakan Pasar Malam untuk mengumpulkan dana bagi perjuangan Republik Indonesia.

4. Pendidikan, Agama dan Kepercayaan.

Walaupun suasana dalam siap siaga menghadapi Belanda pendidikan tidaklah terbengkalai. Sekolah-sekolah berjalan seperti biasa ma-lahan sekolah yang dahulunya tidak ada seperti Sekolah Menengah Atas sekarang telah pula didirikan. Di kota Pematang Siantar sekolah tersebut didirikan oleh Ismail Daulay dengan nama Sekolah Menengah Tinggi. Demikian pula sekolah menengah pertama dan sekolah Guru. Karena kota Medan tidak mungkin berlangsung sekolah-sekolah itu maka sejak Pematang Siantar menjadi kota Propinsi maka Pematang Siantar merupakan pusat kegiatan pendidikan pula. Dengan alat yang

serba sederhana pendidikan itu berlangsung dengan baik malahan ujian-ujian untuk masuk SMP masih dapat dilaksanakan.

Setelah agresi militer Belanda kedua kegiatan pendidikan terhenti dan banyak para pelajar-pelajar itu yang menerjunkan dirinya ke dalam Tentara Pelajar Indonesia.

Di daerah pendudukan Belanda setelah agresi Belanda oleh pemerintahan NICA dibuka sekolah-sekolah kembali. Situasi dan bentuk sekolah seperti sebelum perang kembali lagi, hanya untuk bangsa Indonesia juga disediakan sekolah-sekolah menengah yang memakai bahasa Belanda dan bahasa Indonesia sebagai pengantar. Sekolah yang dibuka waktu itu adalah **HBS**, **Kweek School Nieuwe Stijl**, **VHO** (**Voorberijding tot Hoger Onderwijs**) yang berkedudukan di Medan dan pada beberapa kota-kota diadakan pula **IMS** (**Indonesische Middelbare School**) dan **MULO** dan **Middelbare School**, **NS Normaalschool** dan **OVVO** (**Opleiding voor Volksonderwijzer dan Ambacht leergang**). Pada sekolah-sekolah tersebut banyak di antaranya duduk juga para pelajar-pelajar yang ditugaskan dari daerah pedalaman untuk memberikan laporan tentang kegiatan tentara Belanda. Karena itu tidak mengherankan bahwa banyak di antara pelajar itu yang kemudian ditangkap oleh **NEFIS**, karena membantu Republik Indonesia.

Karena adanya hubungan-hubungan inilah maka sering sekali terjadi sabotase-sabotase di daerah-daerah pendudukan Belanda. Jadi agresi Belanda kedua ini membuat Belanda memperluas front mereka sehingga mereka tidak dapat lagi mengawasi daerah yang didudukinya itu. Mungkin atas pertimbangan ini mereka menggunakan **Blauw Pijpers** atau Barisan Pengawal **NST** dan **Ondernemings Bewaker** (**O. B.**) yang telah diuraikan di atas.

Keadaan dan kehidupan beragama pada masa-masa itu tidak mengalami gangguan-gangguan dan penduduk menjalankan ibadah dengan tenteram sesuai dengan undang-undang dasar 1945. Para ulama mendukung perjuangan dari kemerdekaan bangsanya seperti telah dikemukakan golongan Islam membentuk pasukan **Hizbullah** dan golongan Kristen membentuk **Divisi Panah**. Para ulama Islam mengeluarkan fatwa mereka perang melawan Belanda adalah perang yang bersifat **Sabilillah** yang berarti menurut keinginan **ALLAH**. Karena fatwa seperti ini dicanangkan oleh Syekh Abdul Wahab di Tanjung Balai ia menjadi inceran Belanda sehingga ia ditangkap Belanda dan kemudian ditembak mati karena tidak mau mencabut fatwanya itu. Ia gugur sebagai pahlawan dan oleh setiap penduduk di Tanjung Balai te-

tap mengenang jasa-jasanya. Pada masa itu tidak ada suatu permasalahan dalam keagamaan, kerukunan hidup beragama terjadi di antara kelompok yang beragama demi persatuan bangsa.

—0—

BAB V

SUMATERA UTARA MENJELANG AKHIR REVOLUSI KEMERDEKAAN

A. MASA MENJELANG PERSETUJUAN KMB

1. Keadaan Sumatera Utara setelah Agresi Belanda II

Dengan penyerbuan Belanda dan mendobrak seluruh daerah garis yang disebut “Demarkasi van Hook” maka boleh dikatakan sebahagian besar wilayah Propinsi Sumatera Utara yang sekarang telah dikuasai oleh Belanda. Pasukan TNI sekarang menyingkir ke daerah pegunungan dan mulai pula menyusun kekuatan-kekuatan perang gerilla. Pada waktu itu hanyalah daerah Aceh yang tidak dikuasai dan sebagian Langkat.

Untuk memperkuat kedudukannya di Sumatera Timur Belanda mengadakan pengawalan-pengawalan di daerah-daerah perkebunan dengan pengawal yang disebut *Ondernemings Bewaker* atau *Ondernemings Wachter*. Pasukan Belanda itu kalau dihitung relatif kecil tetapi mempunyai peralatan modern yang sangat baik sehingga sukar untuk melakukan perlawanan dengan pertempuran terbuka. Pada umumnya pasukan Belanda itu menempatkan pasukan di kota-kota. Maka dengan situasi seperti ini maka pasukan Indonesia mulai melakukan taktik perang gerilla melumpuhkan Belanda. Dengan melalui penyerpakan-penyerpakan dan penghadangan terhadap konvoi mereka maka sering sekali suatu pasukan Belanda yang terpencil terpaksa ditarik mundur guna keselamatan mereka. Pada perkebunan-perkebunan setiap saat tidak aman karena malam hari pasukan kita melakukan serbuan-serbuan ke kebun-kebun. Pengawal perkebunan itu banyak yang menyerah kepada pasukan kita. Dengan gerakan pasukan gerilla itu maka pasukan kita mulai masuk ke Sumatera Timur kembali dan menjadikan Sumatera Timur sebagai basis dari TNI. Daerah yang diharapkan Belanda untuk menjadi sumber devisa menjadi berantakan. Tidak hanya perkebunan tetapi mulai pula pasukan kita melakukan sabotase-sabotase di daerah-daerah kota-kota yang diduduki Belanda. Kegiatan gerilla pasukan TNI dapat kita lihat dari pembahagian tugas-tugas di antara mereka seperti :

- a. Pasukan Batalyon Burhanuddin melakukan kegiatan sekitar daerah Kuala, Marike sehingga mereka malahan mengacaukan daerah perkebunan sekitarnya. Pasukan NIP Xarim beroperasi sekitar rumah Galuh dan berhasil pula menawan tiga perwi-

ra musuh.

- b. Pasukan Yusman Kandou berhasil pula mengadakan pengacauan sekitar Bekiung, Tanjung keliling dan Timbang Langkat.
- c. Pasukan Wiji Alfisah dari daerah perbatasan Status Quo melakukan penghadangan terhadap pasukan Belanda demikian pula pasukan Hanafiah.

Pasukan-pasukan ini semuanya mengadakan kegiatan gerilla di daerah Langkat. Di daerah lainnya di Sumatera Utara juga demikian adanya. Pasukan Jamin Ginting yang dahulu sesudah Agressi I berpusat di Kotacane sekarang mulai pula menyusup ke Tanah Karo. Mereka mulai mengadakan pula kegiatan Gerilla di dataran Tinggi Karo. Ini hanyalah sekelumit keadaan dari Sumatera Utara setelah agresi Belanda itu. Jadi boleh dikatakan di segala tempat gerakan Gerilla mulai melakukan gangguan-gangguan terhadap Belanda. Keadaan ini memang sangat memusingkan Belanda karena dengan pasukan yang kecil harus melakukan suatu bezetting atau pendudukan atas wilayah yang luas. Sebenarnya gerakan perang gerilya ini berlangsung dalam waktu yang singkat saja karena kemudian setelah beberapa bulan timbul perundingan-perundingan antara Indonesia dengan Belanda atas desakan Dewan Keamanan.

Walaupun relatif singkat tetapi mempunyai arti yang besar bagi perjuangan selanjutnya. Belanda yang pada waktu sebelumnya menyangka bahwa proklamasi itu hanya keinginan dari sekelompok manusia saja sekarang melihat kenyataan bahwa proklamasi itu didukung oleh seluruh masa rakyat. Walaupun mereka menguasai kota-kota dan TNI terdesak ke gunung-gunung tetapi TNI masih *survival* atau masih utuh. Penilaian yang tepat pada waktu itu dapat kita ambil dari hasil perang gerilla di Sumatera Utara sebagai berikut :

- a. Pasukan TNI menguasai sebahagian besar wilayah di Sumatera Utara. Belanda hanya menguasai kota-kota dan inipun di waktu malam harinya mereka tidak aman. Secara moril kedudukan Tentara Belanda itu jauh merosot.
- b. Penduduk Sumatera Utara umumnya membantu gerilla karena alam perang gerilla itu seluruh kebutuhan TNI disediakan rakyat dan di sinilah kelihatan suatu kemanunggalan TNI dengan rakyat. Hanya sebahagian kecil saja yang berfihak kepada Belanda.
- c. Keadaan alam yang sangat idial di Sumatera Timur dan Tapa-

nuli membuat pasukan Belanda menjadi jemu untuk bertempur sehingga kekuatan pasukan mereka sebenarnya tidak mempunyai semangat lagi untuk perang.

- d. Di daerah-daerah luar kota yang berkuasa adalah pemerintah Republik karena sesudah agresi II segera dibentuk suatu pemerintahan peralihan militer pada setiap daerah karena batas-batas wilayah yang ditentukan dahulu tidak berlaku lagi. Hal ini sesuai dengan perintah dari Pemerintahan Darurat Republik Indonesia.

2. Keadaan Penduduk di Daerah yang dikuasai Belanda

Agresi Belanda yang melanggar perjanjian Renville dan penyerbuan Belanda terhadap ibu kota Republik Indonesia ditanggapi penduduk di daerah pendudukan Belanda dengan rasa pilu dan sedih. Surat-surat kabar yang condong kepada pemerintah Republik seperti Waspada dan Mimbar Umum mencela tindakan itu sebagai suatu tindakan yang melanggar perjanjian. Penduduk yang pro kepada Republik Indonesia secara berbisik-bisik menceritakan tindakan Belanda itu. Walaupun pada masa itu sudah ada pemerintahan Negara Sumatera Timur tetapi sebagian besar rakyatnya pro kepada republik.

Sebelum Belanda melakukan aksi agresi itu mereka memang telah mengadakan persiapan-persiapan. Beberapa tokoh kaum Republik yang berdiam di kota-kota besar di Sumatera Timur telah ditangkap mereka. Sebelum aksi penangkapan yang dilakukan oleh Belanda ini di daerah penduduk Belanda telah ada kegiatan-kegiatan dari penduduk yang pro kepada Republik yang sering disebut kaum Republikein sebagai lawan dari kaum federalis. Segala orang yang non koperator dihimpun dalam satu kekuatan yang merupakan motor untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia di daerah pendudukan Belanda yaitu di Sumatera Timur. Tokoh-tokoh yang menjadi pelopor adalah Dr. Jabangun, Ir. Indrachya, MA Dasuki, Sugondo Kartoprojo membentuk suatu badan yang disebut Front Nasional Sumatera Timur pada 8 Pebruari 1948. Sebenarnya Front Nasional itu adalah suatu badan yang menghimpun seluruh kekuatan partai-partai politik untuk menjadikan suatu kesatuan dalam menghadapi Belanda. Tetapi di daerah pendudukan tidak ada lagi partai politik maka sebagai anggotanya adalah tokoh-tokoh yang berasal dari berbagai-bagai pandangan politiknya disatukan dalam satu wadah. Dalam anggaran dasar dari Front Nasional itu jelas bahwa menitik beratkan kepada kesatuan Bangsa yang berazaskan Kebangsaan Indonesia. Tujuannya adalah berdiri di

belakang negara Republik Indonesia dalam garis-garis politiknya dan memperjuangkan suatu negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Sejak berdirinya badan ini ia meluas ke seluruh kota-kota di Sumatera Timur.

Dengan berdirinya Front Nasional ini rakyat yang pro Republik dan berdiam di daerah pendudukan Belanda menyambutnya dengan gegap gempita karena dengan adanya badan ini dapat pula dilakukan kegiatan-kegiatan langsung di daerah lawan.

Sebagai pimpinan dalam kepengurusan front Nasional ini adalah Ketua Ir Indrachaya, Wakil ketua Dr Jabangun, Sekretaris MA Dasuki (Pak Das), Komisaris adalah Arif Efendy, Tengku Yohani dan F. Panggabean.

Sesudah itu beberapa kali diadakan penggantian pengurus dan Sugondo Kartoprojo diangkat pula sebagai penasehat, dan masuk pula tokoh-tokoh seperti Mohd Said dan Nurdin salah seorang guru Bahasa Inggris.

Dengan adanya badan ini para pengurusnya itu tidak luput menjadi incaran dari NEFIS dan kepolisian NST karena itu pula maka sering pengurusnya ditahan. Demi untuk melanjutkan perjuangan itu maka terpaksa beberapa kali diadakan penggantian-penggantian pengurusnya. Setelah pengakuan Kedaulatan badan ini turut pula melakukan aksi nantinya untuk menuntut pembubaran NST dan Republik Indonesia Serikat.

3. Politik Separatisme Belanda

Tiap-tiap daerah yang diduduki oleh Belanda mereka senantiasa berusaha untuk mengumpulkan antek-anteknya. Demikian setelah mereka berhasil menduduki Jogyakarta dan sebahagian besar Tapanuli maka mulailah politik divide mereka jalankan pula. Kasak-kasuk antara antek-antek Belanda itu dengan tokoh-tokoh di Tapanuli berhasil menarik beberapa tokoh-tokoh itu kepihak mereka. Beberapa daerah pada kota-kota di Tapanuli Belanda berhasil membentuk Panitia Persiapan pembentukan pemerintahan Tapanuli (Panitia Pembentukan Negara Tapanuli).

Keberhasilan Belanda menarik beberapa tokoh di Tapanuli itu adalah karena tokoh-tokoh itu telah kehilangan kepercayaan kepada dirinya sendiri dan keberhasilan perjuangan Republik Indonesia itu. Menurut buku Sejarah Kodam II Bukit Barisan terjadilah beberapa kegiatan mereka kemudian. Di Padang Sidempuan Panitia Status Ta-

panuli itu dipimpin oleh Mr. Syukur Soripada, Mr. Abbas, Bachtiar Ananda dan Pangeran Nasution. Di Sibolga dipimpin oleh Zainal Basri, Edward Nasution, I Tampubolon dan Dr. A Pohan. Di Tarutung dipimpin oleh R. B. Sinambela, Eliab Siagian, R. Oloan Hutagalung, Romulus Sihombing, Elias Ujung dan lain-lain.

Tujuan berdirinya panitia mengenai status Tapanuli ini tiada lain adalah untuk menikam Republik Indonesia yang pada waktu itu sedang mendapat perhatian dunia Internasional seperti PBB karena beberapa negara telah mengajukan agresi Belanda itu kepada Dewan Keamanan. Dengan adanya keinginan mereka itu maka sendirinya wilayah Republik Indonesia menjadi menyit dan kedudukan Republik Indonesia akan sama dengan negara-negara boneka Belanda yang dibentuknya setelah Agresi I dan II.

Untuk melakukan perjuangan mereka itu bagi membentuk Negara Tapanuli mereka mengadakan rapat-rapat. Pada 13 Pebruari 1949 di Padang diadakan rapat, dan pada 9 Maret di Sibolga. Pada masa itu memang telah disetujui akan menentukan suatu status Tapanuli tetapi untuk mencapai pembentukan negara belum ada. Walaupun demikian kemudian pada 11 Mei 1949 setelah tercapainya Persetujuan Roem-Royen yang merupakan suatu permulaan dari perdamaian Indonesia Belanda maka Belanda telah mengakui pula kedudukan Panitia Status Status Tapanuli sebagai suatu Dewan Perwakilan Tapanuli. Inilah sebagai suatu bukti bahwa Belanda di Sumatera Utara setelah penghentian tembak menembak tidak ingin memperkecil wilayah Republik Indonesia yang dikuasainya.

Politik untuk melakukan separatisme itu jelas pula kemudian dengan lahirnya suatu gagasan dari Negara Sumatera Timur untuk melakukan apa yang mereka namakan Mukhtar Sumatera.

Wali negara Sumatera Timur, yaitu Dr Mansur telah mengirimkan undangan-undangan kepada daerah-daerah di Sumatera untuk mengirimkan utusannya dalam suatu mukhtar yang akan diadakan di Medan. Ke Nias dan Aceh dikirim mereka itu surat undangan tetapi tidak mendapat suatu perhatian atau tidak diacuhkan oleh penduduk di daerah itu. Mukhtar itu diadakan mulai tanggal 29 Maret sampai 2 April 1949, yang berlangsung di Medan. Ada juga beberapa daerah yang dikuasai Belanda mengirimkan utusannya seperti Pangkal Pinang dan Sumatera Selatan.

Dalam Mukhtar itu kemudian diambil keputusan-keputusan mengenai masalah-masalah yang perlu menjadi pokok-pokok pembicaraan

yang antara lain :

- a. Kedudukan bahagian-bahagian dari daerah-daerah di Sumatera dalam Republik Indonesia yang akan dibentuk.
- b. Sikap Sumatera terhadap keadaan politik mengenai Indonesia.
- c. Keadaan Indonesia dan dunia Internasional.
- d. Mengenai keamanan dan ketertiban umum.

Walaupun itu yang menjadi pokok-pokok yang dibahas tetapi dalam kenyataan nanti jelasnya bahwa tujuan pokok dari muktamar itu untuk memperluas kemungkinan dari pembentukan negara Sumatera. Setelah beberapa hari bersidang maka Muktamar Sumatera itu mengambil beberapa pernyataan-pernyataan yang pada prinsipnya menyokong sepenuhnya konsep pembentukan Negara Indonesia Serikat menurut keinginan Belanda di mana semua negara bahagian itu mempunyai kedudukan yang sama. Kemudian juga dalam pernyataan itu diberikan kesempatan bagi daerah-daerah yang melahirkan keinginan untuk membentuk suatu status sendiri di daerahnya diberi hak untuk ikut serta dalam pembicaraan-pembicaraan. Sifat dan kehendak separatisme ini lebih jelas lagi dalam pernyataan hendak membentuk suatu Sumatera yang kuat dan bukan Indonesia. Tidak berapa lama setelah Muktamar Sumatera itu berakhir maka Persetujuan Roem Royen tercapai dan dengan demikian proses pembentukan Republik Indonesia Serikat menjadi kenyataan. Jadi untuk memperluas cita-cita federalis inilah maka Muktamar Sumatera diadakan oleh Dr Mansur dan kelompoknya. Tentu saja tindakan yang dilakukan dalam Muktamar Sumatera mendapat suatu reaksi dari golongan yang cinta terhadap negara kesatuan dan Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selain dari reaksi dari pihak Republik juga hal ini melahirkan kesulitan atas kelanjutan Persetujuan Roem Royen yang telah tercapai.

Dengan sendirinya hal itu melahirkan suatu reaksi yang keras dari pemerintah Republik karena bertentangan dengan tujuan dari Persetujuan Roem Royen yang telah tercapai. Apalagi dalam pasal 4 tercantum bahwa untuk menentukan nasib sendiri sebagaimana yang terdapat pada Linggajati dan Renville, maka pemerintah Belanda tidak akan mendirikan atau mengakui negara-negara atau daerah-daerah di atas daerah yang dikuasai oleh Republik sebelum tanggal 19 Desember 1948. Seterusnya tidak akan meluaskan negara atau daerah dengan merugikan daerah Republik.

Sikap Belanda ini ditanggapi oleh para pemimpin Republik sebagai suatu pelanggaran dari isi persetujuan Roem Royen. Menurut Ha-

rian Merdeka yang terbit pada 19 Mei 1948 mengatakan Ini sebetulnya harus dipikirkan dengan masak-masak sebelumnya melakukan sesuatu yang hanya ditinjau menurut kaca mata sendiri saja, tetapi juga dengan kacamata pihak lain yang bersangkutan.

Ditinjau dari keadaan waktu itu jelaslah bahwa Dr Mansur sebagai seorang feodal ingin untuk meluaskan suatu keadaan perpecahan yang lebih luas lagi sehingga ia membentuk suatu blok Sumatera dalam suatu negara Indonesia Serikat yang akan dibentuk. Ini jelas merupakan sikap yang tidak menginginkan suatu persatuan yang lebih erat di antara suku-suku yang banyak di Indonesia. Sebagai seorang dokter barang kali ia tidak mengetahui aspirasi bangsa Indonesia yang bergolak waktu itu. Pandangan Dr Mansur yang picik itu jelas sekali dapat ditanggapi masyarakat bahwa pesimis terhadap pembentukan suatu negara Indonesia yang besar. Sesudah Muktamar Sumatera ia mengemukakan kepada pers bahwa tidak mungkin suatu negara Indonesia Serikat itu terbentuk dalam waktu yang singkat. Kalau kita membangun haruslah dari bawah dahulu. Karena itu perlulah pembentukan negara bahagian dulu, baru masalah pusat kemudian. Ucapan seperti ini jelas pula diucapkan oleh Abdul Malik sebagai Wali negara Sumatera Selatan yang mengatakan bahwa negara bagian adalah primer. Jadi dengan adanya Muktamar Sumatera itu diharapkan Sumatera akan menjadi blok sendiri dalam BFO atau suatu badan yang diciptakan Belanda sebagai suatu pemerintahan yang memiliki daerah-daerah di pusat. Dalam bahasa Belanda disebut *Bijzondere Federale Overleg* yang kira-kira berfungsi sebagai suatu badan persiapan membentuk pemerintahan peralihan. Di dalam BFO ini telah mulai terjadi perselisihan pendapat karena banyak para anggota BFO yang tidak sependapat dengan tindakan Dr Mansur dan kawan-kawannya. Seperti Negara Indonesia Timur telah berfikir maju tidak inginkan agar Persetujuan Roem Royen itu diabaikan. Karena reaksi dari kalangan sendiri itu maka Dr Mansur mengadakan lagi Muktamar Sumatera yang ke-II di kota Medan sejak 28 Mei sampai dengan 30 Mei 1949. Perutusan yang hadir dari daerah-daerah Sumatera berjumlah 31 orang dan dihadiri oleh hampir seluruh daerah tetapi Aceh tidak hadir. Kalau pada konperensi Muktamar Sumatera mereka memutuskan untuk membentuk suatu persatuan yang kokoh untuk Sumatera dan para Muktamar yang ke II mereka menyatakan hendak membentuk suatu federasi untuk Sumatera.

Sikap dari golongan Muktamar Sumatera itu jelas memperuncing keadaan sesama anggota dalam BFO sehingga perbedaan pendapat ter-

jadi antara Anak Agung dengan Dr Mansur. Ini adalah suatu politik divide et impera Belanda yang sengaja dilakukan untuk memperkecil-kecil daerah di Indonesia dan membesar-besarkan perasaan kedaerahan. Perbedaan pandangan antara Dr Mansur dengan Anak Agung Gde Agung di BFO terjadi karena Anak Agung beranggapan bahwa Muk-tamar Sumatera itu merupakan tindakan dari Sumatera untuk keluar dari BFO. Jadi Muktar Sumatera itu mendapat tantangan dari pihak mereka sendiri. Selain dari reaksi dari pihak sendiri, di daerah-daerah Sumatera seperti Lampung, Aceh dan lain-lainnya rakyat menentang karena segala utusan-utusan itu bukan yang mewakili mereka karena ia bukan merupakan utusan daerah yang dipilih rakyat. Tetapi mereka itu adalah orang-orang yang dihunjuk oleh Belanda saja tanpa sepengetahuan rakyat. Mereka seandainya saja mengatas namakan rakyat untuk kepentingan dan ambisi mereka itu.

Ternyata ilusi mereka untuk membentuk suatu federasi Sumatera menjadi berantakan dan tidak pernah terwujud.

4. Perang Gerilya Menjelang Persetujuan KMB

Setelah Agresi Militer Belanda II pasukan TNI telah mengadakan perang Gerilya tidak saja di daerah yang baru diduduki Belanda tetapi telah menyebar luas. Daerah-daerah yang pada masa agresi I ditinggalkan sekarang telah diisi kembali. Perjuangan pada waktu itu lebih terkordinasi lagi karena pada waktu itu pemerintahan Pertabhiran militer telah dibentuk dengan susunan yang telah diuraikan pada halaman sebelumnya. Dengan adanya susunan pemerintahan yang baru ini maka pembentukan pemerintahan itu terus dijalankan sampai-sampai ke daerah yang dahulu ditinggalkan dalam agresi I.

Dengan menggunakan suatu siasat perang gerilya maka kemajuan dari operasi yang dilakukan TNI malah berhasil sekali, dan pengacauan malah sampai ke daerah-daerah kota-kota yang didiami Belanda. Akibatnya Belanda harus meningkat patrolinya dan melakukan razia-razia di daerah yang didudukinya. Negara-negara boneka yang didirikannya itu sudah tidak aman lagi. Daerah Sumatera Timur di mana telah didirikannya Negara Sumatera Timur sekarang telah diserbu oleh Tentara Nasional Indonesia, di bawah komando Pasukan Sub Teratorium VII baik dari Tapanuli Utara, Selatan, Dairi dan divisi X Aceh telah pula mengadakan suatu penyerbuan ke daerah Langkat. Daerah-daerah dahulu yang ditinggalkan sekarang telah diisi kembali sehingga pencegahan-pencegatan terhadap konvoi Belanda lebih sering pula dilakukan. Komunikasi-komunikasi pasukan musuh sering terputus sehingga untuk mengatasi keadaan ini maka mereka sering mengguna-

kan pesawat udara dengan melakukan pemboman terhadap daerah yang dianggapnya dihuni oleh pasukan gerilla kita. Hal inilah yang menjadi kesulitan kepada pihak Belanda karena kekuatan pasukan kecil tetapi mereka harus menyebarkan pasukannya meluas.

Dengan taktik ini maka mereka terpaksa melakukan pemusatan pasukan pada beberapa tempat yang dianggapnya strategis. Daerah-daerah yang ditinggalkannya diisi oleh pasukan kita kembali. Faktor keadaan perang gerilla inilah yang menyebabkan Belanda terpaksa untuk mengadakan **perundingan** dengan pemerintah Republik Indonesia. Apalagi mereka merasakan keadaan perkebunan mereka yang vital di Indonesia terletak di Sumatera Timur sudah sering menghadapi serangan-serangan dari Gerilla TNI sehingga tidak aman lagi bagi para petugas Belanda untuk mengawasi perkebunan mereka. Hal ini jelas kelihatan setiap tuan kebun yang akan keluar ke kota harus dikawal oleh OB dan ia sendiri memakai senjata pula. Gerilla yang terus menerus berarti modal mereka yang tertanam di Sumatera Timur ini akan lenyap. Untuk mengatasi hal itulah maka Belanda pada mulanya sengaja membentuk Negara Sumatera Timur dan dengan segala cara mereka menguasai Sumatera Timur lebih dahulu. Tetapi kenyataannya mereka tidak dapat menguasainya.

Taktik perang gerilya memang sangat berhasil ialah di Sumatera Timur berkat suatu kerja sama yang baik dari segala lapisan masyarakat di sini. Selain itu kator intern yang dihadapi Belanda di daerah yang dikuasainya juga memberikan suatu pendorong ke arah itu.

B. SIKAP MASYARAKAT DI SUMATERA UTARA TERHADAP KONPERENSI INTER INDONESIA

Sumatera Utara yang mempunyai corak ragam suku dan kebudayaannya senantiasa mempunyai perhatian yang cukup terhadap keadaan dan situasi tanah airnya. Sikap pemerintah kolonial Belanda yang telah melakukan politik *divide et impera* pada umumnya tidak mendapat dukungan rakyat dan walaupun terjadi pembentukan Negara Sumatera Timur itu hanyalah suatu tindakan segelintir manusia saja yang dapat diperalat oleh Belanda sehingga Sumatera Timur hendak dipisahkan oleh suatu kesatuan Indonesia. Reaksi rakyat terhadap usaha Belanda untuk menceraikan beraikan suatu cita-cita kesatuan bangsa jelas mendapat tantangan. Surat-surat kabar yang pro Republik seperti Waspada dan Mimbar Umum jelas mengemukakan tantangan-tantangan yang keras dari usaha Belanda untuk menentang cita-cita kesatuan itu.

Pembentukan Front Nasional di Sumatera Timur yaitu di daerah pendudukan Belanda jelas membuktikan kesatuan Indonesia tetap menjadi suatu tujuan dari rakyat di Sumatera Timur. Adanya BFO yang diciptakan Belanda sebagai suatu usaha untuk menghancurkan suatu cita-cita kesatuan itu oleh penduduk di Sumatera Utara tidak dapat diterima. Suara-suara menentang tercermin dari suatu sikap rakyat yang apatis terhadap ide itu. Apalagi rakyat melihat bagaimana simpatik negara-negara Asia terhadap perjuangan rakyat Indonesia menghadapi kolonialisme Belanda, maka cita-cita federasi yang diku- mandangkan Belanda tidak menarik. Di Sumatera Utara setiap situasi dalam perjuangan Republik Indonesia sangat mendapat perhatian sekali. Surat-surat kabar yang pro Republik laris terjual sedang Neraca dan Sinar Siantar yang merupakan surat kabar yang menyuarakan Negara Sumatera Timur tidak laku walaupun mendapat subsidi dari pemerintah jajahan. Inilah suatu bukti bahwa penduduk Sumatera Uta- ra mengikuti perkembangan tanah airnya.

Setelah Agressi Militer Belanda II terjadi suatu perkembangan ba- ru dalam perjuangan Republik Indonesia. Republik Indonesia tidak saja mendapat dukungan dari negara Asia tetapi juga dari negara Ero- pa. Dewan Keamanan sebagai suatu organ dari PBB segera mengada- kan sidang atas usul India. Ini adalah suatu hasil dari konferensi yang diadakan di New Delhi oleh Nehru untuk menyatakan solider atas perjuangan bangsa Indonesia. Dalam konperensi yang diadakan di ibu kota India itu lahir suatu mosi yang isinya antara lain :

1. Pemulihan pemerintahan Republik Indonesia ke Jogjakarta.
2. Pembentukan suatu pemerintahan peralihan yang mempunyai kekuasaan dan kemerdekaan dalam politik luar negeri.
3. Penarikan tentara Belanda di Indonesia dan menyerahkan ke- kuasaan kepada bangsa Indonesia selambat-lambatnya 1 Janu- ari 1950.

Dengan mosi dari kelompok negara Asia maka lahir pula mosi yang diajukan kepada Dewan Keamanan untuk menuntut agar Belanda me- lakukan :

1. Membebaskan semua tahanan politik.
2. Mengembalikan pemerintahan Republik Indonesia ke Jogja- karta.
3. Mengadakan pemerintahan Serikat 15 Maret 1949.
4. Mengadakan pemilihan umum untuk memilih badan pemben- tukan Undang-undang dasar selambat-lambatnya 1 Oktober- 1949.

Itulah bahagian-bahagian yang penting dari isi resolusi dewan keamanan PBB, yang dinyatakan bertanggal 20 Januari 1949. Dengan adanya mosi dan resolusi yang disebut di atas itu Republik Indonesia mendapat suatu dukungan moril yang sangat besar sekali.

Dengan dukungan moril dari dunia internasional ini maka kedudukan kaum federalis di Indonesia mulai goncang. Dari golongan yang selama ini menyokong Belanda maka mereka itu mulai sebahagian memalingkan dirinya kepada Republik Indonesia. Di dalam Parlemen atau DPR Negara Indonesia Timur timbul suara-suara menyokong Republik Indonesia. Suara-suara mulai menunjukkan sifat yang positif dari golongan federal terhadap Republik Indonesia. Selain kekuatan dari luar juga yang sangat menentukan ialah kekuatan dari dalam, yaitu berhasilnya perang gerilya yang dilakukan TNI.

Situasi dan keadaan ini menyebabkan pemimpin dari Negara Indonesia Timur yang dibentuk oleh Belanda mulai lunak dan mendekati Republik Indonesia. Pemimpin-pemimpin Indonesia yang ditawan di Bangka karena penyerbuan Belanda ke Jogjakarta yaitu pusat pemerintahan Republik Indonesia mulai dikunjungi oleh Anak Agung Gde Agung. Terjadilah pembicaraan antara Anak Agung dengan pemimpin Republik Indonesia pada waktu itu.

Pendekatan yang diadakan oleh Anak Agung Gde Agung itu ada juga manfaatnya karena kelihatan perselisihan yang terjadi waktu itu dapat untuk sementara disingkirkan. Belanda mulai pula lunak sikapnya setelah melihat perkembangan yang terjadi di Indonesia maupun di luar negeri atau dunia internasional yang melihat keadaan Indonesia yang sebenarnya. Pemerintah Belanda kemudian menawarkan kepada pemerintah Republik Indonesia untuk turut serta dalam konperensi Meja Bundar yang akan diadakan di den Haag. Pemerintah Republik Indonesia bersedia turut dalam konperensi itu dengan syarat bahwa Pemerintah Republik Indonesia harus dikembalikan ke Jogjakarta.

Sebagai kelanjutan dari resolusi Dewan Keamanan maka dibentuklah Komisi Tiga Negara untuk menengahkan perselisihan Indonesia Belanda dan melaksanakan resolusi Dewan Keamanan yaitu penghentian tembak-menembak dan segera melaksanakan suatu konperensi Meja Bundar. Sebagai lanjutan dari resolusi Dewan keamanan itu maka antara Indonesia dengan Belanda tercapai pula persetujuan Roem Royen. Persetujuan Roem Royen itu berhasil tercapai pada tanggal 7-Mei 1949. Dalam persetujuan yang dicapai itu terdapat beberapa po-

kok-pokok persetujuan yang berisi antara lain :

1. Pengembalian pemerintahan Republik Indonesia ke Jogjakarta.
2. Membebaskan pimpinan-pimpinan Republik Indonesia yang ditawan.
3. Penghentian tembak-menembak dan segera mengadakan konperensi Meja Bundar antara pihak Indonesia dan Belanda.

Di Sumatera dengan adanya Persetujuan Roem Royen itu belum dapat dilaksanakan segala ketentuan-ketentuan yang tercantum karena pemerintahan Sumatera yang berada langsung di bawah kekuasaan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia belum menerima suatu perintah langsung dari Presiden maupun Wakil Presiden yang berwenang terhadap hal itu. Pernyataan ini dikeluarkan oleh Syafruddin Prawira Negara kepada delegasi Republik Indonesia di Jakarta pada tanggal 8 Juni 1949.

Pada tanggal 14 Juli terjadi sidang Kabinet pemerintahan Republik Indonesia yang pertama di Jogjakarta setelah pengembalian pemerintahan Republik Indonesia ke kota tersebut. Dengan demikian pulihlah keadaan pemerintahan Republik kembali. Dalam sidang itu juga Mr. Syafruddin Prawiranegara mengembalikan mandat yang telah diserahkan kepadanya untuk membentuk pemerintahan Republik Indonesia sewaktu Belanda mengadakan penyerbuan ke ibu kota Republik Indonesia.

Dengan pulihnya pemerintahan Republik Indonesia ke Jogjakarta maka kedudukan Republik Indonesia secara politis bertambah baik. Selain dari pada itu hubungan dengan negara-negara bahagian juga bertambah baik pula terkecuali dengan Negara Sumatera Timur yang telah diuraikan. Sebagaimana kita ketahui Negara Sumatera Timur dengan Mukhtamar Sumatera ingin melikuidasi Republik Indonesia di Sumatera, karena mereka ingin memperluas negara-negara bahagian di Sumatera.

Berbeda dengan Dr. Mansyur dan kelompoknya hubungan dengan Anak Agung Gde Agung semakin erat. Untuk dapat menyatukan pendapat menghadapi Belanda dalam konperensi Meja Bundar itu maka pemimpin Republik Indonesia mengajak tokoh-tokoh BFO untuk mengadakan suatu Front. Tujuan tiada lain agar Belanda dapat mengakui suatu pemerintahan dan negara Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

Atas dasar inilah maka sejak tanggal 19—22 Juli diadakanlah suatu pertemuan antara delegasi Republik Indonesia dengan BFO di Jogja-

karta yang terkenal dengan Inter Indonesia konperensi. Di dalam pertemuan yang diadakan di Jogjakarta kemudian dilanjutkan di Jakarta diambil suatu kata sepakat yang isinya mereka sama-sama menyetujui nama atas Republik Indonesia yang baru yaitu Republik Indonesia Serikat, bendera Merah Putih, dan bahasa Indonesia sebagai bendera dan bahasa bangsa Indonesia serta mengakui Lagu Kebangsaan dan Hari Nasional yaitu 17-8-1945. Demikian pula kata kesepakatan yang lain telah pula tercapai mengenai Angkatan Perang.

Adanya persetujuan yang dicapai dalam Konperensi Antar Indonesia ini maka di Sumatera Utara terjadi perasaan lega karena antara kaum federalis telah ada suatu kesatuan pendapat untuk mencapai suatu kesatuan dalam negara Indonesia ini. Reaksi yang lain tidak ada kelihatan mungkin karena pada waktu itu penduduk Sumatera Utara sedang memusatkan perhatiannya kepada penyelesaian masalah pertikaian antara Indonesia Belanda dan mengharapkan agar Belanda cepat-cepat meninggalkan Indonesia. Mungkin dari pihak Mukhtar Sumatera hal-hal yang negatif ada tetapi tidak kelihatan karena cita-cita mereka tidak tercapai dengan sendirinya.

Di Sumatera perintah penghentian tembak-menembak baru berlangsung pada tanggal 8 Agustus 1949 setelah adanya perintah dari Kolonel Hidayat sebagai Panglima dari Tentara Territorium Sumatera. Pelaksanaan penghentian tembak-menembak ini di Sumatera baru dimulai pada tanggal 14 menjelang tengah malam tanggal 15 Agustus. Dengan adanya perintah penghentian tembak-menembak ini maka seluruh angkatan bersenjata yang berada di bawah kekuasaan tentara Territorium Sumatera harus mematuhi keputusan itu dan menghentikan perang gerilya.

C. SIKAP MASYARAKAT TERHADAP CITA-CITA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DI SUMATERA UTARA

1. Persetujuan KMB di Sumatera Utara

Dengan adanya persetujuan Roem Royen maka kelanjutannya adalah Konperensi Meja Bundar yang diadakan di den Haag. Konperensi antar Indonesia yang telah diadakan antara pihak Republik dengan BFO merupakan suatu kesepakatan yang dicapai baik dalam bidang politik maupun bidang lainnya dalam menghadapi Belanda, persetujuan Konperensi Meja Bundar tercapai tanggal 2 Nopember 1949 antar pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang isinya Belanda mengakui adanya suatu Negara Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat. Hasil konperensi itu kemudian pada disetujui

oleh KNIP di Jogjakarta pada 15 Desember 1949. Dengan demikian maka tinggal lagi pelaksanaan penyerahan kekuasaan Belanda kepada bangsa Indonesia.

Dengan adanya persetujuan KMB itu maka berarti Negara Sumatera Timur masih dapat hidup lagi dan sebahagian rakyat di Sumatera Timur tidak menginginkan kelangsungan hidup negara boneka itu.

Tanah Karo yang belum seluruhnya dikuasai oleh Belanda dan banyak pula daerah yang telah diduduki oleh pasukan gerilya maka mereka menolak untuk bergabung dengan NST yang merupakan boneka Belanda itu. Di Tiganderket suatu daerah di Tanah Karo para pejuang Gerilya mengadakan suatu rapat untuk menolak hasil KMB dilaksanakan di Tanah Karo dan mereka ingin tetap berada dalam pemerintahan Republik Indonesia seperti saudara-saudara mereka yang lain. Pertemuan dari para gerilya Tanah Karo itu yang disebut mereka itu Pertahanan Rakyat Semesta Tanah Karo. Mengenai hal ini akan kita uraikan dalam uraian selanjutnya.

2. Pengambilan Alih Tugas Keamanan di Sumatera Utara.

Sebagai pelaksanaan persetujuan Roem Royen dan Resolusi Dewan Keamanan PBB, maka pada beberapa daerah yang diduduki Belanda pada masa agresi Belanda II sekarang dikembalikan kepada Republik Indonesia. Di Sumatera Utara Daerah yang diduduki Belanda ialah daerah Labuhan Batu dan Tapanuli. Dengan kembalinya pemerintahan Republik Indonesia ke daerah tersebut maka ini berarti pasukan TNI akan menggantikan tentara Belanda dalam tugas menjaga keamanan daerah tersebut. Dalam suasana akan kembalinya pemerintahan Republik Indonesia di daerah itu maka banyak antek-antek Belanda yang meninggalkan daerah itu dan menyingkir ke kota Medan. Mereka ini adalah tokoh-tokoh yang dahulunya menyokong berdirinya negara Tapanuli.

Sebelum pasukan TNI mengambil tugas Belanda itu maka terjadi timbang terima antara pasukan Belanda dengan TNI dan juga diawasi oleh pihak PBB yaitu UNCI. Sebelum serah terima diadakan lebih dahulu dibentuk suatu Local Joint Committee yang mengurus masalah timbang terima dan penghentian tembak menembak itu. Dalam Komite itu duduk wakil Republik, Belanda dan sebagai ketuanya UNCI. Pusat dari Local Joint Committee itu di Medan untuk daerah Sumatera Utara.

Dengan adanya Local Joint Committee itu maka terjadilah penge-

cekan terhadap perintah penghentian tembak-menembak di segala front. Dengan adanya penghentian tembak-menembak itu maka mulailah dilakukan penarikan tentara Belanda dari Tapanuli.

Pada tanggal 30 Nopember tentara Belanda telah menarik pasukannya dari Sipirok dan pada 4 Desember dari Padang Sidempuan. Pada tanggal 10 Desember dari kota Sidikalang dan Tarutung dan kemudian pada 13 Desember dari kota Balige dan Porsea. Dengan peristiwa ini maka sepenuhnya Tapanuli telah berada di bawah pengawasan TNI untuk menjaga keamanan. Sesudah pasukan Belanda meninggalkan Tapanuli maka mereka semua memusatkan kedudukannya di Sumatera Timur. Di Sumatera Timur Tentara Belanda baru secara berangsur-angsur meninggalkan Medan setelah lahirnya negara Indonesia Serikat. Sebagian anggota tentara Belanda yaitu yang bergabung pada KNIL menggabungkan dirinya dalam tentara APRIS atau Angkatan Perang Indonesia Serikat.

Setelah tentara Belanda meninggalkan Sumatera Utara demi untuk mewujudkan keamanan Sumatera Utara maka pada tanggal 13 Desember lahirlah maklumat atau pengumuman bersama Koordinator Keamanan dalam Panitia Persiapan Nasional dengan Wali Negara Sumatera Timur. Sebagai Koordinator Keamanan dari Panitia Persiapan Nasional Letnan Jenderal Hamengku Buwono IX setelah berunding dengan Komandan Tentara Belanda dan Pemerintah Negara Sumatera Timur menetapkan Kolonel A. E. Kawilarang Komandan Tentara dan Teritorial Sumatera Utara sebagai koordinator keamanan wilayah Aceh Tapanuli dan Sumatera Timur. Semua alat keamanan berada di bawah Koordinator Keamanan tersebut.

Adanya pengangkatan ini penting sekali karena di Sumatera Timur khususnya banyak didapati alat-alat keamanan yang dahulunya bekas-bekas dari KNIL, Blauw Pijper, OB dan persoalan Federal dan Republikein sangat meruncing. Untuk menjaga kestabilan keamanan itu maka organisasi Panitia seperti itu perlu dibentuk. Karena itulah Ketua Jenderal Hamengku Buwono IX sebagai Panitia persiapan Nasional dari pusat datang ke Medan.

3. Sikap Rakyat di Sumatera Utara mengenai Negara Kesatuan

Dengan terbentuknya Republik Indonesia Serikat maka negara-negara boneka Belanda terus mempunyai hak untuk hidup, demikian pula halnya dengan Negara Sumatera Timur. Keadaan ini tentunya bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan dalam proklamasi Republik Indonesia 1945. Selain dari pada itu keadaan daerah Republik

Indonesia di Sumatera Utara setelah Agresi militer Belanda II telah pula mengalami perubahan karena pasukan-pasukan TNI telah menduduki sebahagian besar daerah yang dahulunya mereka tinggalkan seperti di Sumatera Timur.

Karena keadaan itu maka pada daerah-daerah yang diduduki oleh Belanda atau yang disebut Negara Sumatera Timur telah lahir masalah-masalah. Pada beberapa daerah terjadi suatu pemerintahan yang kembar yaitu ada pejabat pemerintahan Republik dan ada pula pejabat pemerintahan NST.

Memang kota-kota dikuasai oleh pemerintah NST tetapi di luar kota pemerintahan Republik Indonesia telah berlangsung baik secara *de facto* maupun *de jure*. Karena adanya pemerintahan yang kembar itu baik dalam bentuk pasukan keamanan maupun pemerintahan sipilnya melahirkan suatu kesulitan-kesulitan. Kesulitan ini lahir karena petugas-petugas dari NST melakukan penangkapan-penangkapan setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda kepada Indonesia. Di daerah Labuhan Batu dan Tanah Karo telah terjadi penangkapan-penangkapan sejak tanggal 23 Januari 1950 terhadap petugas-petugas pegawai Republik Indonesia, karena daerah ini memang telah terbagi atas dua penguasa dan di sinilah merupakan basis gerilya TNI. Segala tindak-tanduk pemerintah NST itu tentu menggelisahkan rakyat yang pada waktu itu baru mulai menempuh suatu kehidupan yang damai. Rakyat tidak dapat hidup dari suasana yang tidak aman dan gelisah dan ingin suatu kepastian dalam hidupnya.

Bertolak dari keadaan ini maka mulailah terjadi pergolakan rakyat di Sumatera Timur untuk menuntut pembubaran NST itu dengan segera. Gerakan ini terjadi di daerah Tanah Karo dan Labuhan Batu. Selain dari pada itu terjadi juga pada beberapa daerah yang lain di Sumatera Timur hanya tidak berapa menonjol.

Demonstrasi menuntut pembubaran NST bermula di Tanah Karo. Seorang camat dari Republik Indonesia bernama Mohammad Saleh Barus ditangkap oleh Barisan Pengawal NST. Atas penangkapan camat tersebut rakyat tidak dapat menerima keadaan itu dan karena Mohammad Saleh Barus itu yang mereka akui sebagai camat Sinembah Tanjung Muda Hulu. Peristiwa penangkapan itu sampai kepada pemerintah kabupaten Tanah Karo yang pada waktu itu berada di Tiga Nderket. Seorang utusan dari pemerintahan Kabupaten yaitu Mbera Barus dikirim ke kecamatan tersebut untuk mengurus pembebasan camat tersebut dan berunding dengan pemuka masyarakat setempat. Rakyat se-

tempat kemudian mengambil keputusan untuk melakukan tunjuk perasaan alias demonstrasi ke Medan untuk membebaskan Camat mereka. Sejumlah 20.000 orang rakyat pada waktu itu bersama pemuka setempat berjalan kaki ke Medan. Tetapi kemudian mereka tidak dibolehkan memasuki kota Medan tetapi beberapa hari kemudian camat mereka dibebaskan. Dengan peristiwa ini maka perlawanan terhadap pemerintahan NST telah mulai berlangsung. Sesudah itu berkali-kali lagi terjadi demonstrasi menurut pembebasan beberapa pegawai pemerintah Republik Indonesia yang ditahan oleh alat-alat pemerintah NST misalnya peristiwa pada tanggal 29-1-1950. Peristiwa ini malahan kemudian menuntut suatu pembubaran pemerintahan NST. Mereka itu malahan di muka pembesar-pembesar NST langsung menuntut agar NST segera membubarkan dirinya. Setelah terjadinya aksi untuk menuntut pembubaran NST di Tanah Karo maka di beberapa daerah mulai pula terjadi kegiatan-kegiatan yang sama. Peristiwa di Pancur Batu itu seakan-akan menjadi besi berani untuk melanjutkan perlawanan terhadap pemerintah NST.

Melihat keadaan itu pemerintahan NST juga tidak tinggal diam mereka hendak membuka pula kantor-kantor pemerintahan di daerah yang dahulunya tidak dikuasainya. Seperti misalnya di Tiga Nderket Nerus Ginting Suka pada tanggal 7 Pebruari hendak membuka kantor onder district karena katanya daerah itu masuk daerah NST. Karena tindakan Nerus Ginting Suka itu maka lahirlah reaksi dari penduduk setempat. Ada rakyat yang melaporkan peristiwa itu kepada pemerintahan Kabupaten Karo yang pada waktu itu juga berkedudukan di Tiga Nderket. Kelanjutannya terjadi pula suatu reaksi Spontan dari Rakyat dengan melakukan demonstrasi menuju ke kantor Kabupaten untuk menerima suatu komando apa saja bagi menentang berdirinya pemerintahan NST di Tiga Nderket. Spontanitas rakyat yang demikian itu mengakibatkan petugas-petugas NST itu tidak jadi untuk meneruskan niatnya dan kembali ke Kabanjahe. Karena NST mulai melakukan suatu tindakan mengacau pada daerah yang dikuasai oleh Republik maka gerakan rakyat di Tanah Karo mulai meningkatkan perjuangannya untuk mengatasi keadaan itu. Pada tanggal 29 Nopember 1949 sebagai akibat dari penangkapan terhadap pegawai-pegawai Republik Indonesia di Tanah Karo telah terbentuk suatu aksi Tuntutan Rakyat Karo yang menghendaki agar Tanah Karo digabungkan kepada Republik. Aksi Tuntutan rakyat ini dengan peristiwa di Tiga Nderket meningkatkan perjuangannya. Pada tanggal 12 Pebruari aksi tuntutan rakyat itu melahirkan suatu tuntutan-tuntutannya yang isinya sebagai berikut :

- a. Pembubaran NST dan minimum masuknya wilayah tanah Karo kepada Republik Indonesia.
- b. Yang menjadi pedoman ialah daerah yang dahulunya dikuasai Republik sebelum agresi I ditambah dengan daerah kecamatan Sinembah Tanjung Muda.

Tuntutan rakyat itu ditanda tangani oleh Rinto Gersang dan Raja kuida Sukatendel dengan beberapa temannya yang lain.

Pada tanggal 14 Pebruari itu beruntun pula terjadi suatu demonstrasi di Kabanjahe yang melakukan tuntutan yang sama. Dari sekeliling Kabanjahe berbondong-bondong penduduk pergi ke Kabanjahe dengan membawa perbekalan yang cukup. Pada tengah hari tanggal 14 Pebruari itu di kota Kabanjahe penuh dengan manusia dan menurut taksiran ada lebih kurang 65.000 orang. Alat-alat pengamanan melakukan pengawalan yang ketat dan ini dilakukan agar jangan melahirkan kekacauan-kekacauan. Sebagaimana perintah yang dikemukakan oleh Komandan Tentara Territorium Sumatera Utara yaitu setiap anasir yang melakukan pengacauan akan ditindak tegas.

Gerakan Aksi Tuntutan Rakyat itu benar-benar tidak menghiraukan suatu selain untuk menggabungkan wilayah mereka ke dalam Republik Indonesia. Mereka berjuang dengan gigih untuk mencapai hal tersebut sehingga pemerintah NST menghadapinya dengan kewalahan. Karena itu bertempat di rumah Kepala Daerah NST di Kabanjahe. Dalam pertemuan itu hadir wakil dari NST seperti Raja Kaliamsyah Sinaga, Raja Kalelong Sinulingga, Maja Purba dan Tengku Hafas.

Dalam pertemuan ini wakil-wakil NST mengajukan suatu usul agar Tanah Karo tetap merupakan bahagian dari NST dan pegawai-pegawai Republik yang ada akan dipekerjakan sebagai pegawai NST. Usul ini ditolak rakyat karena mereka bukan menghendaki hal itu tetapi bergabung dengan negara Republik Indonesia. Karena perbedaan keinginan itu maka pertemuan yang menghendaki suatu perumusan tidak berhasil dicapai. Sebagai suatu hasil dari pertemuan itu hanyalah pertemuan akan dilanjutkan kembali pada tanggal 15 Pebruari di kantor Wali Negara Sumatera Timur di Medan.

Pertemuan ini mulai antara wakil-wakil dari Aksi Tuntutan Rakyat dengan wakil dari NST. Di dalam pertemuan ini juga menemui kegagalan. Menurut wakil pemerintahan NST penggabungan daerah Tanah Karo menjadi bahagian dari Republik Indonesia itu hanya dapat dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat NST, Kabinet dan Wali Negara. Perundingan yang gagal itu menyebabkan suasana menjadi

panas sehingga terjadi terus-menerus demonstrasi-demonstrasi pada setiap kecamatan dan pada tanggal 17 Pebruari diakhiri dengan demonstrasi besar-besaran.

Bagaimana gelora rakyat untuk menuntut penggabungan daerah Tanah Karo masuk kedalam wilayah Republik Indonesia dapat kita ketahui dari laporan kepala Kejaksaan RRM Harahap kepada menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Serikat. Dalam laporan itu ia mengatakan sejak tanggal 14 Pebruari terus-menerus sebanyak 50.000 orang mengadakan demonstrasi, setiap harinya. Mereka menuntut pembubaran negara Sumatera Timur.

Tidak saja di Tanah Karo aksi tuntutan rakyat itu terjadi tetapi juga di Asahan dan Labuhan Batu. Di daerah itu selain penduduk mengadakan demonstrasi juga dengan secara serentak para pegawai meletakkan jabatannya. Selain dari pada itu kantor-kantor pemerintah Republik Indonesia secara serentak didirikan di kota-kota di daerah itu walaupun mendapat tantangan yang hebat dari petugas-petugas NST.

Didalam gerakan itu juga terjadi korban-korban. Pada tanggal 14 sampai 16 Pebruari rakyat Labuhan Batu dan Asahan dengan mengendarai kereta api ke Medan untuk menyampaikan tuntutan mereka itu. Kedatangan mereka itu berjumlah kira-kira 6 sampai 700 orang dan di Medan mendapat sambutan oleh Front Nasional yang telah berdiri sejak masa pemerintahan NST. Begitu solider penduduk atas perjuangan mereka ini dapat diketahui dari bantuan rakyat atau penduduk Medan. Mereka itu pada umumnya menginap di tempat-tempat penduduk dan memperoleh makanan ala kadarnya dari penduduk.

Pada tanggal 16 utusan penduduk Asahan dan Labuhan Batu itu mengadakan demonstrasi di Medan untuk menunjukkan keinginan dan tuntutan mereka. Dengan berbagai-bagai selogan yang menuntut pembubaran NST dan mereka melalui beberapa jalan yang penting serta kemudian berakhir di kantor Wali Negara Sumatera Timur dimana mereka menyerahkan tuntutan mereka itu. Dari gambaran-gambaran ini jelaslah bahwa seluruh daerah di Sumatera Timur tidak ingin untuk tetap berada dalam status negara bahagian yang bukan merupakan tujuan dari perjuangan mereka. Selain dari kegiatan aksi tuntutan rakyat itu, kemudian Front Nasional yang memang telah ada juga meneruskan kegiatannya. Kegiatannya itu adalah melanjutkan perjuangan negara kesatuan yang menjadi cita-cita dan tujuannya. Setelah lahirnya

Republik Indonesia Serikat maka pada tanggal 21 Januari mereka mengadakan suatu konperensi Kilat Front Nasional di Jalan Amplas Medan yang dipimpin oleh Sugondo Kartoprojo.

Di dalam konperensi kilat itu menghasilkan beberapa keputusan-keputusan untuk disampaikan kepada pemerintah pusat yang isinya mengenai bebrapa permasalahan. Di dalam resolusi itu sekali lagi meminta pembubaran NST, diadakan plebesit untuk menentukan kemana penduduk Sumatera Timur itu bergabung dan mereka tidak mengakui akan wakil-wakil NST dalam Dewan Perwakilan Indonesia Serikat. Pembahagian itu yang dilakukan di Sumatera Timur yang mengadakan perbedaan-perbedaan harus dihapuskan dan kalau dilanjutkan maka tidak boleh diadakan perbedaan-perbedaan.

Resolusi ini sempat juga disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia Serikat, yaitu Sukarno yang kebetulan singgah di Medan dalam perjalanannya ke India sewaktu India mengundang beliau dalam peristiwa lahirnya Republik India. Resolusi itu kemudian mendapat persetujuan dari berbagai tempat di Sumatera Timur seperti Lubuk Pakam, Perbaungan, Pematang Siantar, Pancur Batu dan juga kota lainnya.

Betapa gegap gempitanya keinginan rakyat untuk bergabung dengan Republik Indonesia ini dapat kita lihat pula perkembangan selanjutnya. Pada 27 April sampai 30 April terjadi pula kongres Rakyat Sumatera Timur yang mengadakan rapatnya di gedung Kapitol sekarang Juwita. Pimpinan rapat itu adalah Mohd. Said seorang wartawan kawakan dan pimpinan Harian Waspada. Di dalam rapat itu juga dihadiri oleh para pembesar dari pusat yaitu RIS, Republik Indonesia dan pembesar setempat, menghasilkan resolusi sebagai berikut :

- a. Sangat menyesalkan sikap pemerintahan pusat terhadap keterlambatan tindakan pusat untuk melaksanakan mosi Yunan Nasution.
- b. Pemerintahan pusat selekas-lekasnya dapat menghapuskan negara Sumatera Timur dan dalam pelaksanaannya pemerintah pusat senantiasa mendengarkan pendapat dari Kongres Rakyat.

Setelah selesai kongres itu empat orang dari utusan kongres Rakyat berangkat ke Jakarta dan Jogjakarta untuk menghadap Perdana Menteri RIS yaitu Dr. Modh. Hatta dan Pejabat Presiden Republik Indonesia yaitu Mr. Assaat. Dengan kedatangan ke empat utusan ke empat utusan dari Sumatera Timur itu maka pemerintah pusat akan dapat mengetahui bagaimana aspirasi penduduk mengenai perjuangan

mereka itu.

Adapun isi dari tuntutan Kongres rakyat itu mencerminkan suatu kesatuan yang bulat untuk seluruh Indonesia maka mereka tidak dapat menyetujui pembentukan negara kesatuan sebagaimana ketentuan yang dimumkan oleh Pemerintah RIS dan Republik Indonesia bertanggal 20 Mei 1950. Dalam ketentuan itu RIS mewakili Negara Indonesia Timur dan NST dalam membentuk negara kesatuan. Cara seperti ini menurut Kongres Rakyat tidak dapat diterima karena NST dan NIT adalah negara yang dibentuk Belanda untuk menghancurkan Republik Indonesia. Dengan cara ini berarti Republik Indonesia setarap dengan negara bahagian yang dibentuk Belanda itu. Sebaliknya Kongres rakyat berpendapat sebaiknya NST dibubarkan lebih dahulu sesuai dengan tuntutan rakyat. Jadi sebelum terbentuknya negara kesatuan haruslah negara boneka NST itu lebih dahulu dibubarkan.

Sebagai kelanjutan dari tuntutan rakyat itu maka kemudian tercapai suatu persetujuan RIS dengan RI untuk membentuk negara kesatuan sebagai penjelmaan dari Republik Indonesia yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, maka lahirlah suatu Panitia yang disebut PPNKST. PPNKST adalah Panitia Persiapan Negara Kesatuan untuk Sumatera Timur. Panitia ini dibentuk atas penetapan yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri Anak Agung Gde Agung. Di Sumatera Utara diketuai oleh Sarimin Reksodiharjo dengan anggotanya Mr. Mohd. Amin dan Raja Kaliamsyah Sinaga. Tetapi kemudian Raja Kaliamsyah Sinaga mengundurkan dirinya. Dengan adanya panitia ini maka peleburan NST ke dalam Republik Indonesia yang bersifat negara kesatuan nantinya menjadi kenyataan.

Peristiwa ini semuanya menunjukkan betapa hasrat penduduk Sumatera Timur yang gandrung kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Memang hal ini tepat karena Sumatera Timurlah merupakan suatu barometer dari perjuangan rakyat di Sumatera Utara dalam mencestuskan proklamasi yang diproklamirkan pada tanggal 17-8-1945.

D. KEGIATAN MASYARAKAT DI SUMATERA UTARA

Berbicara mengenai kegiatan masyarakat di Sumatera Utara pada waktu itu boleh dikatakan tidak jelas, karena seluruh kegiatan rakyat ditujukan kepada kegiatan politik sebagaimana penguraian sebelumnya. Seluruh potensi masyarakat ingin selekasnya lahir suatu propinsi di Sumatera Utara ini tanpa negara boneka NST. Karena itu

kegiatan kebudayaan terutama kesenian agak mandek atau terhenti, demikian pula pada bidang yang lainnya. Kegiatan yang jelas adalah kembalinya penduduk ke kota Medan dan arus penduduk yang kembali itu sangat banyak pula.

Selain dari kembalinya arus pengungsi tersebut maka banyak pula penduduk dari luar kota pindah ke Medan terutama para pegawai yang kantornya sudah pindah ke Medan. Kota Medan yang dahulu tidak dapat menampung penduduk yang datang sehingga banyak daerah dahulunya hanya semak belukar sekarang mulai digarap penduduk secara liar agar dapat dijadikan daerah kediaman. Di tempat itu lahirlah perumahan-perumahan darurat. Pinggiran kota Medan yang dahulunya merupakan areal perkebunan sekarang telah dijadikan perumahan rakyat. Kebanyakan penduduk menggarapnya secara liar sehingga hal ini menjadikan masalah dengan pihak perkebunan.

Pertambahan penduduk ke kota Medan menyebabkan juga arus pelajar banyak yang memasuki kota Medan karena telah pula banyak sekolah-sekolah di kota Medan seperti Yosua, Ksatriya dan SMA Darurat yang semuanya adalah sekolah-sekolah yang berhaluan Republik. Di samping itu ada pula sekolah-sekolah yang bernaung di bawah Departemen Pendidikan NST yaitu Sekolah Rakyat atau Lagere School, Middelbare School, Kweek School, Mulo dan HBS.

Sekolah-sekolah ini sewaktu pemerintahan NST berjalan terus dengan memakai kurikulum sebagaimana biasa. Sekolah-sekolah NST berjalan dan kemudian dibubarkan setelah pembubaran NST dan disatukan dengan sekolah-sekolah Republik yang ada di kota Medan. Maka Mulo, Middelbare School dijadikan SMP. HBS dan VHO dijadikan menjadi SMA dan Kweek School menjadi SGA.

Kehidupan perekonomian berjalan sebagaimana biasa kembali. Kebun-kebun tetap berada di bawah kekuasaan HVA, Deli Maatschappij dan sebagainya. Barang-barang impor juga dikuasai oleh para importir bangsa Belanda seperti Jacobson van den Berg, Deli Aceh dan Guntzel Schumaker. Persurat kabaran yang terdapat di Medan ialah *Harian Waspada*, *Mimbar Umum* yang menyuarakan Republik Indonesia, *Neraca* merupakan suara NST dan pimpinan oleh Tengku Yafizham. Demikian pula orang-orang Belanda mempunyai surat-surat kabarnya sendiri yang disebut *De Nieuwsblad voor Sumatra*. Orang-orang Cina mempunyai surat kabar yang memakai aksara Cina, yaitu *Sumatera Bin Poh*. Setiap bentuk surat khabar itu pada umumnya menyuarakan kepentingannya sendiri seperti kalau surat kabar Belan-

da menguraikan perkembangan negerinya dan surat kabar Cina mengemukakan berita dagangnya dan sebagainya. Mimbar Umum dan Waspada lebih banyak menguraikan perjuangan penduduk di Sumatera Timur untuk kembali kepada negara kesatuan. Maka karena itu banyak kegiatan wartawan-wartawan itu mengkaver berita-berita tentang demonstrasi menentang pemerintahan NST. Tidak jarang wartawan-wartawan itu dalam meliput berita tersebut dilarang oleh pemerintah NST. Larangan yang dilakukan oleh Pemerintah Negara Sumatera Timur itu adalah karena harian itu tidak sejalan dengan politik dan haluan mereka. Walaupun demikian kehidupan pers di daerah Sumatera Utara boleh dikatakan baik.

Kehidupan rakyat pada waktu itu boleh dikatakan taraf kehidupannya sangat rendah karena mereka baru pulang dari pengungsian dan hasil-hasil pertanian belum memuaskan karena selama ini sawah-sawah banyak yang ditinggalkan. Hasil yang agak memuaskan adalah hasil perkebunan rakyat seperti Karet. Pemilik kebun-kebun karet di pedalaman Sumatera Utara memperoleh pendapatan yang agak baik. Selama ini mereka tidak dapat menyedap karetnya karena situasi keamanan tetapi sekarang telah kembali normal. Harga karet yang baik menyebabkan banyak para pedagang-pedagang di kota yang mengadakan hubungan ke daerah perkebunan karet rakyat. Keadaan ini juga mendorong bagi penduduk di pedesaan pada waktu itu untuk mengirim anak-anaknya sekolah ke kota-kota melanjutkan sekolahnya. Medan, Pematang Siantar menjadi tempat-tempat pelajar-pelajar demikian pula kota Padang Sidempuan di Tapanuli Selatan dan Tarutung di Tapanuli Utara. Karena hasil pertanian pangan yang tidak mencukupi terlebih-lebih bagi daerah Sumatera Timur maka di Medan penduduk memperoleh catu beras yang diperoleh melalui toko-toko distribusi.

Kehidupan dalam bidang keagamaan berjalan dengan baik dan terdapat kerukunan beragama di mana-mana tidak ada terjadi persepilihan-perselisihan. Sekolah-sekolah yang diasuh oleh gereja atau **zending** berjalan seperti biasa hanya peranan orang-orang Belanda atau asing sudah mulai berkurang. Demikian pula madrasah dan pesantren berjalan sebagai biasa. Sekolah-sekolah itu mendapat bantuan-bantuan dari pemerintah NST dan kemudian setelah NST bubar oleh pemerintah Republik Indonesia.

E. PELAKSANAAN HASIL KMB DI SUMATERA UTARA

Kegiatan-kegiatan rakyat di Sumatera Utara dengan revolusi dan Aksi Tuntutan Rakyat kemudian mereda karena pada waktu itu telah ada suatu persetujuan antara pemerintah RIS yang menjadi wakil dari NIT dan NST dengan Republik Indonesia. Persetujuan ini terjadi pada tanggal 15 Mei 1950.

Persetujuan ini ditanda tangani oleh Drs.Mohd Hatta sebagai Perdana Menteri RIS dan Dr Halim sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia. Di dalam persetujuan itu dijelaskan mereka setuju untuk melaksanakan suatu negara kesatuan dalam waktu sesingkat-singkatnya sebagai suatu penjelmaan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 - 8 - 1945.

Dengan adanya persetujuan ini maka kelangsungan hidup dari negara boneka NST itu hanya menunggu saatnya lagi. Sebelum pembubaran NST itu maka lahir suatu kebijaksanaan Pemerintah untuk membentuk propinsi di Indonesia dalam 10 propinsi yang disebut dengan PP No 21 tahun 1950. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan ketetapan No. DP.13/9/19 tanggal 1 Agustus 1950 telah membentuk Panitia penyelenggara Pembentukan Propinsi Sumatera Utara yang terdiri dari :

1. R. Sarimin Reksodiharjo sebagai ketua
2. T. Daudsyah sebagai anggota
3. Binanga Siregar sebagai anggota
4. Raja Kaliamsyah sebagai anggota.

Panitia ini ditugaskan oleh pemerintah untuk mempersiapkan pembentukan propinsi Sumatera Utara meliputi wilayah Aceh Sumatera Timur, Tapanuli. Didalam daerah propinsi itu terdapat 15 Kabupaten. Dengan adanya peraturan Pemerintah No.21 tahun 1950 maka penetapan daerah Sumatera Utara menjadi dua propinsi dicabut dan menjadikan daerah propinsi Sumatera Utara menjadi satu Propinsi. Dengan adanya penetapan ini Aceh merasa dirugikan karena demikian ia hanya merupakan suatu bahagian dari propinsi Sumatera Utara. Pada tanggal 12 Agustus Dewan Perwakilan Rakyat dari Aceh mencetuskan suatu mosi yang menuntut Aceh tetap menjadi propinsi. Mereka mengemukakan mosi itu atas suatu pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- a. Persatuan yang telah berabad-abad itu jangan dipecahkan dengan berpusat ke kiblat yang baru.

b. Dengan segala potensi yang ada seperti budaya, historis geografi dan sebagainya Aceh meminta mengurus dirinya sendiri di bawah pemerintahan Pusat sebagai pengawas. Pembentukan pemerintah sendiri ini bertujuan untuk mengejar ketinggalan-ketinggalan sebagai suatu usaha memenuhi tuntutan rakyat.

c. Tindakan ini bukan untuk memencilkan diri dari dan ini dapat dibuktikan dari kecintaan rakyat Aceh sejak masa Proklamasi sampai sekarang.

Tetapi kalau sekiranya bergabung dengan Sumatera Utara maka akan lebih banyak kesulitan yang akan terjadi. Tuntutan mereka itu mereka di Sumatera Timur dan Tapanuli setelah keluarnya peraturan pemerintah itu terjadilah suatu reaksi di mana Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Timur dan Tapanuli pada tanggal 20 Oktober 1950 mengadakan sidangnya di Sibolga, membicarakan tentang pembentukan propinsi Sumatera Utara. Di dalam sidang itu lahir suara-suara yang mengatakan bahwa kerja P4 SU sangat lamban sekali.

Di dalam suasana tuntutan-tuntutan dari Aceh membentuk suatu propinsi sendiri maka pada tanggal 25 Januari 1951 berlangsunglah upacara pelantikan Abdul Hakim sebagai Gubernur Sumatera Utara yang dilakukan oleh Makmun Sumadipraja. atas nama Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya Sarimin Reksodiharjo menyerahkan pimpinan pemerintah kepada Gubernur yang baru diangkat yaitu Abdul Hakim. Dengan ketetapan No.SU 30/2/15 tanggal 25 Januari 1951 membubarkan panitia Penyelenggara Pembentukan Propinsi Sumatera Utara. Selanjutnya ditetapkan pula untuk tujuh kabupaten di Aceh seorang kordinator Pemerintah yaitu RM Danubroto, untuk empat kabupaten di Tapanuli seorang Kordinator, yaitu Residen Binanga Siregar.

Dengan adanya pembentukan propinsi Sumatera Utara maka segala keputusan-keputusan dari pemerintah RIS telah terlaksana dan sampai pula kepada pembubaran pemerintahan NST.

Perubahan-perubahan dalam pemerintahan sebagai akibat KMB telah diuraikan, selanjutnya dalam bidang organisasi ketentaraan juga terjadi perubahan. Dengan adanya KMB maka terbentuklah APRIS atau angkatan perang Republik Indonesia Serikat. Ini berarti terjadi penggabungan antara KNIL, dengan TNI sebagai intinya. Sesudah peleburan itu terbentuklah Komando Tentara dan Teritorium.

Sumatera Utara dengan Komandannya Kolonel AE Kawilarang. Dengan pengangkatan Kolonel AE Kawilarang sebagai komandan

Tentera dan Teritorium Sumatera Utara maka berarti seluruh unsur tentera Nasional Indonesia yang berasal dari **Sub Teritorium VII**, dan **Devisi X** serta pasukan **KNIL** dan **Barisan Pengawal (Blau Pijpers)** berada di bawah naungan **Komando Tentera Teritorium Sumatera Utara**. Jadi dibawah komando itu terbentuklah tiga brigade yang berasal dari seluruh kesatuan-kesatuan yang telah disebut di atas. Dengan demikian terjadilah suatu reorganisasi pasukan-pasukan bersenjata di Sumatera Utara.

--o0o--

BAB. VI

P E N U T U P

Perjuangan rakyat Sumatera Utara telah diuraikan sejak Bab I sampai kepada Bab V mengisahkan bagaimana penduduk di Sumatera Utara berjuang untuk melaksanakan Proklamasi dan mempertahankan proklamasi itu. Dari penguraian-penguraian itu dapatlah kita mengambil suatu kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut :

1. Perjuangan dan Pergerakan Kebangsaan yang telah tumbuh dan berkembang di tanah air kita ini juga terjadi di Sumatera Utara. Sumatera Utara tidak ketinggalan dalam setiap perjuangan bangsa untuk membebaskan diri dari belenggu penjajahan itu. Hal ini telah kita lihat dari perjuangan tokoh-tokoh di Sumatera Utara seiring dengan perjuangan para tokoh di Pulau Jawa.

2. Masa pendudukan Jepang yang penuh dengan berbagai-bagai kesulitan merupakan suatu masa yang sangat menentukan dalam perjuangan bangsa Indonesia khususnya di Sumatera Utara. Pada masa ini para pemimpin bangsa Indonesia di Sumatera Utara tidak tinggal diam. Walaupun mereka berada di ujung bayonet tentara Jepang tetapi mereka itu tetap aktif dengan berbagai cara untuk melaksanakan tujuan bangsa Indonesia, yaitu kemerdekaan. Dengan semangat rela berkorban demi untuk kepentingan bangsa dan tanah air maka di zaman Jepang ini seluruh kelompok dalam masyarakat digembleng semangat cinta tanah air dan bangsanya. Pada zaman Jepang ini juga para pemuda mendapat latihan-latihan kemiliteran seperti Gyu Gun Hei Ho dan sebagainya mempunyai nilai-nilai yang sangat menentukan sekali dalam perjuangan kemerdekaan kemudian. Latihan kemiliteran yang diperoleh mereka itu membangkitkan suatu semangat keprajuritan dari bangsa Indonesia. Walaupun pada zaman Jepang tindakan pasukan Jepang menjalankan sikap yang berbeda dengan di Jawa tetapi kaum politik bangsa Indonesia dapat juga memanfaatkan keadaan itu untuk kepentingan perjuangan bangsa Indonesia kelak.

3. Perjuangan kemerdekaan Indonesia dan realisasi proklamasi di Sumatera Utara agak terlambat dibandingkan dengan daerah lainnya terjadi karena keadaan sosial dan budaya yang berbeda-beda. Keadaan yang heterogen dalam masyarakat itu sebenarnya bukanlah menjadi penghalang melainkan karena ada sekelompok golongan yang sempat lebih dahulu berhasil menerima informasi dari pihak

Belanda yang salah sehingga kelompok ini apatis dan menentang kemerdekaan Indonesia malahan berhasil pula menarik golongan lain yang ragu-ragu. Peranan pemuda dalam realisasi kemerdekaan Indonesia di Sumatera Utara sangat penting karena merekalah sebenarnya tulang punggung dari pelaksanaan proklamasi di Sumatera Utara. Sejak dari rapat pemuda di Fuji Dori sampai kepada pernyataan berdirinya pemerintahan Republik Indonesia di Sumatera Utara peranan pemuda sangat penting.

4. Kedatangan tentera Sekutu ke Medan membawa suatu ketegangan-ketegangan karena mereka tidak melaksanakan tugas-tugas internasional yang dibebankan kepadanya tetapi mereka turut menegakkan kekuasaan Belanda. Ketegangan-ketegangan ini akhirnya melahirkan pertempuran-pertempuran antara fihak sekutu dengan pasukan-pasukan bersenjata Republik Indonesia sehingga terbentuk suatu daerah pertempuran yang disebut Medan Area. Untuk mempertahankan negara Republik Indonesia dan pemerintahan Republik Indonesia di Sumatera Utara maka pasukan-pasukan bersenjata Republik Indonesia berusaha memperoleh persenjataan dari tentera Jepang. Hal ini menerbitkan pula insiden-insiden pada beberapa tempat dan yang terkenal sebagai puncak dari insiden itu ialah peristiwa Tebing Tinggi yang membawa korban yang banyak baik dari kalangan rakyat dan pasukan bersenjata Republik Indonesia maupun tentera Jepang. Peristiwa ini dapatlah kita gambarkan sebagai suatu gambaran yang menunjukkan betapa rakyat telah begitu gandrung untuk mencapai kemerdekaan tanah air dan bangsanya. Situasi di daerah pendudukan tentera sekutu semakin tidak aman sehingga pemerintah Republik Indonesia propinsi Sumatera Utara memindahkan pemerintahannya ke Pematang Siantar. Demikian pula pemerintahan Keresidenan Sumatera Timur pindah ke Tebing Tinggi. Pemindahan ibu kota dari Medan ini diikuti pula oleh penduduk kota Medan dan mereka melaksanakan pengungsian kebagian-bagian lain dari daerah Sumatera Utara. Untuk menghancurkan Republik Indonesia atau pemerintahan Republik Indonesia itu Belanda melakukan tindakan-tindakan politik *divide et impera*. Bangsa Cina diasuhnya dan membentuk pula pasukan *Poh An tui* yang sengaja dihadapkannya kepada Republik Indonesia demikian semangat suksisme dibesar-besarkannya sehingga golongan feodal menganggap sinis terhadap Republik Indonesia dan pejuangnya. Hal inilah yang melahirkan terjadi pergolakan rakyat menentang raja-raja di Sumatera Timur yang sering disebut Revolusi sosial.

Perekonomian rakyat dikacau oleh Belanda dengan melakukan blokade terhadap daerah pantai sehingga barang-barang kebutuhan sehari-hari sangat sulit tetapi ini dihadapi rakyat dengan tabah. Di dalam menghadapi seluruh kesulitan ini penduduk Sumatera Utara bersatu padu tanpa memikirkan perbedaan-perbedaan yang ada. Hal inilah yang merupakan suatu kesulitan yang dihadapi Belanda sehingga ia gagal memperbesar wilayahnya karena cita-cita Belanda adalah untuk menguasai perkebunan-perkebunan di Sumatera Timur.

5. Setelah Inggris meninggalkan Medan mulailah Belanda mengintensipkan usahanya untuk menguasai Sumatera Timur itu apalagi pasukannya telah bertambah kuat dengan masuknya bala bantuan dari negerinya.

Peristiwa yang diharapkannya terjadi yaitu lahirnya agresi Militer Belanda I melanda Sumatera Timur.

Belanda mendobrak segala pertahanan Republik Indonesia di sekitar Medan setelah mereka berhasil mendaratkan tenteranya di Pantai Cermin. Pasukan-pasukan Republik dapat menguasai keadaan dan mundur serta menyusun kekuatan yang baru pula. Setelah berakhirnya agresi Belanda ini maka sebagian besar wilayah perkebunan di Sumatera Timur dikuasai Belanda. Mereka membentuk negara Sumatera Timur yang diharapkannya akan melahirkan suatu keamanan. Tetapi sebaliknya di daerah yang dikuasai mereka juga tidak tercapai keamanan. Apalagi setelah agresi militer Belanda II pasukan Indonesia telah menguasai keadaan seluruh Sumatera Utara terkecuali kota kotanya. Perang gerilla berhasil sukses karena pemerintah Republik Indonesia telah mengadakan konsolidasi dan juga tentera Republik Indonesia telah mengadakan organisasi. Dengan suatu kekuatan yang mempunyai komando yang satu maka perjuangan untuk menghadapi Belanda semakin kuat. Karena itu maka dalam agresi militer Belanda ke II aktivitasnya dalam perang berada pada tangan TNI.

6. Untuk menghancurkan Republik Indonesia di Sumatera Utara Belanda kembali menghidup-hidupkan perasaan kesukuan di mana mereka mulai pula menghasut penduduk di Tapanuli untuk membentuk suatu negara Tapanuli. Demikian pula melalui bonekanya Dr.Mansyur dicobanya pula membentuk suatu federasi Sumatera dengan Mukhtar Sumateranya. Kenyataan Belanda tidak mampu untuk memperkecil peranan Republik di Sumatera Utara. Karena faktor inilah maka mungkin tercapai perjanjian untuk mengadakan KMB yang membuahkan Republik Indonesia Serikat. Pem-

bentukan Republik Indonesia Serikat tidak mendapat suatu dukungan dari penduduk Sumatera Utara sebagaimana telah diuraikan karena setiap daerah lahir aksi rakyat menuntut pembubaran Negara Sumatera Timur karena itu adalah suatu cerminan dari klonialisme. Perjuangan penduduk Sumatera Timur yang tidak mengenal menyerah itu kemudian membuahkan karena Republik Indonesia Serikat bubar dan lahir Negara kesatuan dan Sumatera Utara merupakan bahagian dari propinsi dari Republik Indonesia.

—o0o—

DAFTAR ISTILAH

A

Afdeling	= Wilayah.
A T R	= Aksi tuntutan rakyat di Sumatera Timur yang menuntut NST dibubarkan.
Ambtenaar	= Pegawai penjajahan Belanda

B

Busyuco	= Bupati pada - 2 - Jepang
Bunka	= Jawatan Propaganda Jepang
Banzai	= Selamat (toh Jepang)
Bogodan	= Penjaga Kota
Bompa	= Badan Oentoek Mempertahankan Asia
Bapen	= Badan Pertahanan Negeri
B F O	= Bij zonder Federale Overleg
B P	= Blaw Pijpers - Barisan pengawal
Blokade	= Belanda menutup daerah pantai Republik Indonesia.
B P I	= Barisan Pemuda Indonesia
BKPI	= Barisan Kebaktain Pemuda Indonesia

C

Cokang Kakka	= Gubernur zaman Jepang
Cokang	= Residen
Co Sangi kai	= DPR Keresidenan
Co Sangi In	= DPR Propinsi
Comite van Ont- vangst	= Panitia penyambut kedatangan Belanda.

D

Derandi	= Ubi parut yang dimasak ganti nasi
Diametral	= Sejalan
Demarkasi	= Daerah batas masa agresi Belanda.

E

Embrio	= Benih
--------	---------

Entrepreneur	=	Wiraswasta
Eser-eser	=	Penyakit gatal.

F

Fuku Bunsyuco	=	Wakil Bupati
Fujinkai	=	Perkumpulan wanita zaman Jepang
Fuku syucokan	=	Wakil residen
Front Nasional	=	Organisasi kaum Republik kein di daerah pendudukan Belanda.

G

Gunscikanbu	=	Pusat pemerintahan militer Jepang
Gunseibu	=	Pemerintahan Jepang
Giu gun	=	Pasukan Indonesia yang dibentuk zaman Jepang di Sumatera.

H

Homogen	=	Menyeluruh
Heterogen	=	Beraneke ragam
Hongeroedeem	=	Busung lapar
Hei Ho	=	Prajurit pembantu zaman Jepang
Hokokai	=	Kebaktian
Hino maru	=	Nama bendera Jepang.

I

Irinzo Kato seja gakko (ZKS)	=	Sekolah rakyat 6 tahun zaman Jepang
-----------------------------------	---	-------------------------------------

J

Japanisasi	=	Menjepangkan
------------	---	--------------

K

Kyoren	=	Latihan jasmani
KNIL	=	Koninklijke Nederlands Indisehe Leger = Tentera Hindia Belanda.
K L	=	Koninlijke Laudmecht = Tentera Kerjaan Belanda.
Kinsei Gekidan	=	Organisasi sandiwara zaman Jepang
Kai In	=	Pembantu prajurit laut Jepang.

Keijo jogodan	=	Penjaga pantai (Hansip di pantai)
Kenko Tai Sin Toi	=	Pasukan rimba yang dilantik Jepang
Kami sibai	=	Slide yang berupa ceritera.
Ko TTSU	=	Komando Tentera Teritorium Sumatera Utara.
Kinrohomi	=	Gotong royong zaman Jepang
Kamico	=	Kepala lorong (RT)
Kempetai	=	Polisi Rahasia Jepang.

L

Langsam	=	jual barang bekas (loak)
Local Joint Committee	=	Panitia bersama dalam gencatan senjata.

M

Malay no Tora	=	Harimau malaya
Melati kotojo gak-		
ko	=	Sekolah kepandaian putri
Medan Hosokyo	=	Jawatan Radio Medan
Manabe nijsongo	=	Pakai bahasa Jepang
Makotai	=	Barisan harimau yang dibentuk Jepang
Medan Area	=	Wilayah pertempuran disekitar Medan pada masa sebelum agresinya Belanda
Muktamar Sumatera	=	Kongresi utusan daerah di Sumatera yang diadakan oleh boneka Belanda untuk menciptakan negara Federasi Sumatera di Medan.

N

Nogyo Gakko	=	Sekolah Pertanian menengah.
Nirom	=	Nederland Indiesche Radio omroep
N S T	=	Negara Sumatera Timur
N I T	=	Negara Indonesia Timur
N S S	=	Negara Sumatera Selatan.
Nieuws blad voor Sumatera	=	Surat kabar Belanda yang terbit di Medan.
Nefis	=	Polisi Rahasia Belanda
National Control	=	Organisasi yang dibentuk tokoh-tokoh nasional di Medan sesudah Jepang menyerah.

N I C A = Pemerintahan Sipil Belanda di Indonesia setelah perang Dunia II

O

Ondernening Bewakers = Pengawal kebun pada masa NST.
(O.W = Ondernewing Wachters).

Onder afdeling = Kecamatan

P

P4 SU = Panitia Penyelenggara Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.

Panitia status Tapanuli = Setelah agresi II Belanda membentuk badan ini untuk menciptakan negara Tapanuli.

R

R I S = Republik Indonesia Serikat.

Romusha = Pekerja paksa zaman Jepang

S

Seinen Rensenso = Sekolah Pegawai Tinggi zaman Jepang

Saikere = Penghormatan kepada matahari

Shonanto = Singapura

S i c o = Wali kota

Schakel School = Sekolah Indonesia yang pada kelas 4, 5, 6 diajar bahasa Belanda

Smokel = Seludup

Sihan fokko = Sekolah guru zaman Jepang

Sado = Androng, cikir, Bendi

Sendenbu = Jawatan kebudayaan, zaman Jepang

Sumatra Shinbun = Surat khabar di Medan & Jepang

Survival = bertahan

Sumatra Bin Poh = Surat khabar Cina di Medan

Sumatra Hokokai = Kebaktian Rakyat Sumatra.

DAFTAR BACAAN

- Abdul Gani Ruslan, DR.H., *Api Revolusi Tetap Berkobar*, Widjaya, Djakarta, 1956.
- Al-Djamiatul Washlijah, *21 Tahun Al-Djamiatul Washlijah*, Pustaka Al-Washlijah, Medan, 1951.
- Aziz.M.A., *Japan Colonialism and Indonesia*, The Hague, 1955.
- Benda, *Japanese Administration in Indonesia*, Yale University, New Haven, 1965.
- Biro Sejarah Prima, *Medan Area Mengisi Proklamasi*, Jilid-I, Badan Musyawarah Pejuang Republik Indonesia Medan Area, Medan, 1976.
- Dimiyati Muhammad, *Sejarah Perjuangan Indonesia*, Widjaya, Djakarta, 1951.
- Djawatan Penerangan Kotapradja I Medan, *50 Tahun Kota Pradja I Medan*, Medan, 1959.
- Djuana Muhammad dan Sulwan, *Tata Negara Indonesia*, J.B.Wolters, Jakarta, 1959.
- Edisaputra, *Simalungun Jogya-nya Sumatra Dalam Perang Kemerdekaan*, Jilid-I, Up Bina Satria 45, Medan, 1979.
- Ginting's Djamin.Letjen.Drs., *Titi Bambu*, Keluarga Alm Letjen, Drs.Djamin Ginting's, Medan.
- Hall.D.G.E, *Sejarah Asia Tenggara*, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1972.
- Hardjono.A.M., *Dokumentasi Perjuangan Pemuda Indonesia, 1915—1950*, Toko Buku Islamiyah, Medan, 1950.
- Hatta Muhammad, Dr., *Sekitar Proklamasi*, Tinta Mas, Jakarta, 1970.
- Hilton.P.B. and D.Tate., *South East Asia in World History, The Modern World*, Oxford University Press, Kuala Lumpur, 1972.
- Kementerian Penerangan Repulbik Indonesia, *Detik dan Peristiwa (17 Agustus — 23 Januari 1950)*, Djokjakarta, 1950.
- , *Republik Indonesia Sumatra Utara*, Kempen Jakarta, 1954.
- Kelompok Kerja SAB, *Sejarah Singkat Perjuangan Bersenjata Bangsa Indonesia*, Jakarta, 1964.

- Latief.A.K., *Ichisar Sekitar Revolusi Indonesia*, Gedung Pustaka, Medan, 1949.
- Leimena.J.D., *Perselisihan Indonesia Belanda*, Grafika, Jakarta, 1949.
- Malik Adam, *Riwayat Proklamasi Agustus 1945*, Widjaya Djakarta, 1956.
- Mansyur.Let.Kol.Purn,Bayo Suti, *Benteng Huraba*, Medan 1978.
- , *Gerilya di Asahan – Labuhan Batu 1947 – 1949*, Medan, 1977.
- Ministry of Information of The Republik of Indonesia, *Illustrations of the Revolutions Indonesia 1945 – 1950*, Djokjakarta, 1949.
- Nasution.A.H.DR., *Sejarah Perjuangan Nasional di Bidang Bersenjata*, Mega Book Store, Jakarta, 1966.
- Panitia Almanak Sumatra., *Almanak Sumatra*, Medan, 1969.
- Panitia Penyelenggara Buku Mengenakan Hari Proklamasi, *Mengenangkan Hari Proklamasi*, Medan, 1956.
- Pendam-II/Bukit Barisan, *20 Tahun Bukit Barisan Abdi Abadi Ampera*, Medan, 1971.
- Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, *Sejarah Daerah Sumatra Utara*, Medan, 1976/1977.
- , *Sejarah Kebangkitan Nasional*, Medan, 1977/1978.
- Proyek Rehabilitasi dan Perluasan Museum Sumatra Utara, *Monografi Kebudayaan Pak-Pak/Dairi*, Medan, 1977/1978.
- Pulungan Arifin.Kol.SH., *Kisah dari Pedalaman*, Dian Corporation, Medan, 1979.
- , *Sejarah Perjuangan Kodam-II (Medan Area sampai Perang Kemerdekaan I, II)*, Sendam-II/Bukit Barisan, Medan, 1976.
- Purba.M.D.Let.Kol.Purn., *Mengenal Kepribadian Asli Rakyat Simalungun*, Medan, 1977.
- Raliby Osman., *Documenta Historica I*, Bulan Bitang, Djakarta, 1953.
- Ratman Rustan.E., *Dari Proklamasi ke Proklamasi (1945 – 1950)*, Firma, P & P. Waspada, Jakarta, Thn
- Sa'id Bermawi., *Tindjauan Revolusi Indonesia*, N.V.Pustaka Rakjat, Djakarta, 1950.

- Said Muhammad., *Sejarah Pers di Sumatra Utara dan Masyarakat yang dicerminkannya*, Waspada, Medan, 1979.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia., *30 Tahun Indonesia Merdeka*, Jilid-I, Jakarta, 1978.
- Silangit Leiku.Kol., *Sejarah Perjuangan Kodam-II/Bukit Barisan (Sekitar Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945)*, Sendam-II/Bukit Barisan, Medan, 1976.
- Simatupang.T.B.Djend.May., *Laporan dari Banarang, P.T.Pembangunan*, Djakarta, 1965.
- Sitepu Bujur., *Mengenal Kebudayaan Karo*, Medan, 1978.
- Soekarno.Drs., *Tata Negara Republik Indonesia, sesudah kembali ke UUD'45*, N.V.Nusantara, Bukit Tinggi - Jakarta, 1962.
- Supomo.R.Prof.DR., *Statut Uni Indonesia-Belanda*, Djambatan, Djakarta, 1950.
- Surbakti.A.R.Let.Kol., *Perang Kemerdekaan di Karo Area I*, Yayasan Pro Patria, Medan, 1977.
- , *Perang Kemerdekaan II di Tanah Karo Jahe dan Dairi Area*, Yayasan Pro Patria, Medan, 1979.
- , *Sejarah perjuangan Kodam-II/Bukit Barisan (Setelah Cease - Fire - Penyerahan Kedaulatan)*.
- Team Assistensi Kodam-II/Bukit Barisan., *Sejarah Perjuangan Kodam II/Bukit Barisan*, Medan, 1977.
- Tirto Prodjo Susanto.Drs.SH., *Sejarah Revolusi Nasional Indonesia*, P.T. Pembangunan Djakarta, 1963.
- Van Mook.H.Y., *The Stages of Democracy in South East Asia*, London, 1950.
- Vlekke.B.M.H., *Nusantara, a History of the East Indian Archipelago*, Cambridge, Mass, 1943.
- Wehl David., *The Birth of Indonesia*, London, 1948.
- Wolf.C., *The Indonesian Story, the Birth, Growth and Structure of the Indonesian Republic*, New York, 1948.
- Yamin Muhammad.Mr., *Kedaulatan Indonesia atas Irian Barat*, N.V. Nusantara, Bukit Tinggi - Djakarta - Medan, 1956.
- , *Sapta Dharma (Patriotisme Indonesia)* Edisi Medan, Saiful, Medan, Tahun

- Yayasan Kesejahteraan Keluarga Pemuda 66, Panca Windhu Kebangkitan Perjuangan Pemuda Indonesia, Jakarta, 1970
- Sejarah Militer Angkatan Darat T & T-I/Bukit Barisan, Berkala Sejarah Militer, Vol.I, Medan, 1958.
- , Berkala Sejarah Militer, Vol.I, No.2, Medan, 1958.
- , Berkala Sejarah Militer, Vol.I, No.2, Medan, 1958
- Dinas Sejarah Komando Daerah Militer-II/Bukit Barisan, Gema Bukit Barisan, Medan, 1975.
- Harian Mimbar Umum, tanggal 22, 23 Desember 1969.
- Harian Sinar Pembangunan, tanggal 2, 9, 16, 23 Agustus 1979.
- Harian Waspada, tanggal 12, 13 September 1979.

--oOo--

DAFTAR INFORMAN

1. Nama : H. Marzuki Lubis
Umur : 68 tahun
Pekerjaan : Anggota DPRD Propinsi Sumatera Utara
Alamat : Jalan Kemiri No.7 Medan.
2. Nama : Kol.H.Muhammad Nurdin Nasution
Umur : 58 tahun
Pekerjaan : Pensiunan ABRI (ex.Bupati KDH Kabupaten Tapanuli Selatan)
Alamat : Jalan Durian No.2 Medan.
3. Nama : Hasan Basri
Umur : 59 tahun
Pekerjaan : Pensiunan ABRI/Perusahaan Swasta.
Alamat : Kompleks Asrama Gelugur Hong Medan
4. Nama : Bachtiar Halim
Umur : 60 tahun
Pekerjaan : Swasta/Veteran
Alamat : Kampung Timbang Deli Kabupaten Deli Ser - dang.
5. Nama : H.Ahmad Panusunan Nasution
Umur : 74 tahun
Pekerjaan : Usaha Pengangkutan Swasta/Veteran
Alamat : Jalan Brigjen Katamso Medan.
6. Nama : T.M.Kaloko
Umur : 62 tahun
Pekerjaan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Dairi
Alamat : Kota Sidikalang.
7. Nama : Sugondo Karto Projo
Umur : 65 tahun
Pekerjaan : Pengurus Perguruan Taman Siswa Medan
Alamat : Jalan Bulan Medan.
8. Nama : H.Abdul Aziz Lubis
Umur : 69 tahun
Pekerjaan : Pensiunan Residen Kantor Gubsu Prop.Sum.Uta- ra.

- Alamat : Medan/Kota Nopan Tapanuli Selatan.
9. Nama : Drs.P.E.Siagian
Umur : 65 tahun
Pekerjaan : Dosen Universitas Simalungun
Alamat : Pematang Siantar Kabupaten Simalungun.
10. Nama : Tengku Imran Hamid
Umur : 56 tahun
Pekerjaan : Purnawirawan TNI/Kapten
Alamat : Medan.
11. Nama : Abdul Aziz
Umur : 57 tahun
Pekerjaan : Kapten Purnawirawan/Swasta
Alamat : Pulau Berayan Medan.

--oOo--

Perp
Jen